

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Teori dan Praktik

Haerana | Fatmawati | Asdar | Fatmawada S



PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Teori dan Praktik

Haerana | Fatmawati | Asdar | Fatmawada S



**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
TEORI DAN PRAKTIK**

Penulis:
Haerana, Fatmawati, Asdar, Fatmawada S

Desain Cover:
Septian Maulana

Sumber Ilustrasi:
www.freepik.com

Tata Letak:
Handarini Rohana

Editor:
Evi Damayanti

ISBN:
978-623-459-873-5

Cetakan Pertama:
Desember, 2023

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian
atau
seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**PENERBIT:
WIDINA MEDIA UTAMA**

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020
Website: www.penerbitwidina.com
Instagram: @penerbitwidina
Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nyalah sehingga penyusunan buku yang berjudul: Pemberdayaan Masyarakat: Teori dan Praktik dapat terselesaikan. Buku ini adalah panduan komprehensif yang menggabungkan landasan teoritis dan studi kasus sejumlah praktik pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan sehingga pembaca mendapatkan gambaran untuk memahami, merencanakan, dan menjalankan program pemberdayaan masyarakat yang efektif.

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu konsep dan pendekatan yang memegang peran penting dalam transformasi sosial, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dalam dunia yang terus berubah dengan cepat, tantangan sosial dan ekonomi semakin kompleks. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat bukan sekadar sebuah ide, tetapi sebuah kebutuhan mendesak. Buku ini akan membantu pembaca, termasuk praktisi, peneliti, mahasiswa, dan aktivis sosial, dalam memahami dasar-dasar pemberdayaan masyarakat, menerapkan teori-teori relevan, dan merancang program-program yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mitra.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi atas Pendanaan Program penelitian dan Pengabdian Tahun 2023 (No. 0557/E5.5/AL.04/2023) pada skema Program Kemitraan Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Makassar serta sejumlah pihak yang telah mendukung kami dalam proses penyusunan buku ini dan semoga keberadaan buku ini dapat bermanfaat dan akhirnya kami menantikan saran dan kritik yang membangun pada perbaikan buku di masa depan. Semoga buku ini memberikan wawasan dan inspirasi bagi semua pembaca.

Makassar, 12 Oktober 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 PERMASALAHAN SOSIAL	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Ketidaksetaraan Sosial.....	1
C. Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial.....	5
D. Harapan Untuk Masa Depan	11
BAB 2 KONSEP DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	13
A. Pendahuluan.....	13
B. Definisi dan Ruang Lingkup Pemberdayaan Masyarakat	14
C. Ruang Lingkup Pemberdayaan Masyarakat	17
D. Sejarah Perkembangan Pemberdayaan Masyarakat.....	20
BAB 3 PROSES PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	23
A. Pendahuluan.....	23
B. Identifikasi Masalah dan Kebutuhan Komunitas.....	23
C. Perencanaan dan Strategi Pemberdayaan	26
D. Pelaksanaan Program Pemberdayaan.....	31
BAB 4 DINAMIKA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.....	35
A. Pendahuluan.....	35
B. Pendekatan Pemberdayaan	35
C. Monitoring dan Evaluasi.....	38
D. Faktor-Faktor Yang Menghambat Pemberdayaan	41
E. Cara Mengatasi Tantangan Dalam Pemberdayaan Masyarakat	44
BAB 5 PELATIHAN DIVERSIFIKASI PRODUK DAN PEMASARAN DIGITAL BAGI KELOMPOK PENGRAJIN ANYAMAN BAMBU DI DESA SAWAKONG	47
A. Pendahuluan.....	47
B. Metode Pelaksanaan	49
C. Hasil dan Pembahasan.....	50

BAB 6 PELATIHAN PEMBUKUAN KEUANGAN DAN PEMASARAN ONLINE BAGI PENGRAJIN DAUN LONTAR DI DESA TINDANG, KABUPATEN GOWA, SULAWESI SELATAN	57
A. Pendahuluan.....	57
B. Metode Pelaksanaan.....	59
C. Hasil dan Pembahasan.....	60
D. Evaluasi.....	66
BAB 7 PENINGKATAN KETERAMPILAN PENGAJUAN PENGADUAN ONLINE ATAS PELAYANAN PUBLIK	67
A. Pendahuluan.....	67
B. Metode Pelaksanaan.....	69
C. Hasil dan Pembahasan.....	69
D. Evaluasi.....	76
BAB 8 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERKAIT LITERASI DIGITAL DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KOTA MAKASSAR	79
A. Pendahuluan.....	79
B. Metode Pelaksanaan.....	82
C. Hasil dan Pembahasan.....	83
D. Evaluasi.....	87
BAB 9 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGOLAHAN LIMBAH PLASTIK MENJADI KERAJINAN TANGAN BERNILAI EKONOMIS BERBASIS WEB DI KELURAHAN KARUNRUNG, KOTA MAKASSAR	89
A. Pendahuluan.....	89
B. Metode Pelaksanaan.....	92
C. Hasil dan Pembahasan.....	94
DAFTAR PUSTAKA	112
PROFIL PENULIS	125



PERMASALAHAN SOSIAL

A. PENDAHULUAN

Permasalahan sosial di Indonesia adalah topik yang sangat penting dan kompleks. Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya dan sumber daya alam, namun juga dihadapkan pada banyak tantangan sosial yang perlu diatasi. Tantangan Sosial tersebut diantaranya: kemiskinan, ketidaksetaraan sosial, pendidikan yang tidak merata, isu lingkungan hidup, tingkat kesehatan masyarakat, isu hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi, peran perempuan dalam permasalahan sosial, kesenjangan gender, migrasi dan urbanisasi, agama dan pluralisme, korupsi dan tata kelola yang baik, konflik sosial, kemajuan teknologi dan dampaknya, pengungsi dan migran. Dengan sejumlah permasalahan sosial tersebut maka menjadi sangat penting untuk dilaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat demi peningkatan *hardskill* dan *softskill* masyarakat di berbagai kalangan.

B. KETIDAKSETARAAN SOSIAL

Ketidaksetaraan sosial adalah ketidakadilan atau perbedaan yang signifikan dalam distribusi sumber daya, peluang, dan hak di antara anggota masyarakat. Hal ini terutama mengacu pada ketidaksetaraan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap berbagai sumber daya. Ketidaksetaraan sosial dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan tingkat, dan sering kali memiliki dampak negatif pada masyarakat yang lebih rentan.

Ketidaksetaraan sosial adalah ketidaksetaraan yang signifikan dalam distribusi kekayaan, pendapatan, dan akses ke sumber daya ekonomi di antara individu, kelompok, atau wilayah tertentu dalam masyarakat. Ketidaksetaraan ini mencakup berbagai aspek, seperti pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan akses ke layanan dasar. Seringkali, ketidaksetaraan sosial menyebabkan lingkungan yang tidak merata, di mana kelompok masyarakat tertentu memiliki lebih banyak peluang daripada yang lain. Ini dapat menyebabkan konflik sosial, ketegangan, dan kesenjangan yang lebih besar antara kelompok.

Beberapa contoh ketidaksetaraan sosial di Indonesia meliputi:

1. Ketidaksetaraan Ekonomi: Ini mencakup perbedaan dalam pendapatan dan kekayaan antara kelompok masyarakat. Orang-orang yang berada di kelompok ekonomi lebih tinggi memiliki akses lebih besar ke peluang ekonomi dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan mereka, sementara mereka di kelompok ekonomi lebih rendah mungkin hidup dalam kemiskinan atau ketidakpastian ekonomi.
2. Ketidaksetaraan Pendidikan: Akses dan kualitas pendidikan juga bisa sangat berbeda di antara kelompok masyarakat. Anak-anak yang lahir dalam keluarga yang kurang mampu mungkin memiliki akses terbatas ke pendidikan berkualitas, sementara anak-anak dari keluarga yang lebih kaya memiliki lebih banyak peluang pendidikan.
3. Ketidaksetaraan Kesehatan: Ketidaksetaraan dalam akses terhadap layanan kesehatan dapat menghasilkan perbedaan dalam harapan hidup dan kesejahteraan antara kelompok masyarakat. Masyarakat yang kurang mampu mungkin menghadapi kendala dalam mendapatkan perawatan kesehatan yang berkualitas.
4. Ketidaksetaraan Akses ke Layanan Dasar: Orang-orang yang tinggal di daerah pedesaan atau terpencil seringkali memiliki akses yang lebih terbatas terhadap air bersih, sanitasi, dan infrastruktur dasar lainnya dibandingkan dengan mereka yang tinggal di kota-kota besar.

Beberapa hal dapat menjadi penyebab munculnya ketidaksetaraan sosial (Nuraini, 2018), diantaranya:

1. Stratifikasi Sosial

Pada kelompok masyarakat tertentu dianut sistem stratifikasi tertutup yang menyebabkan tidak adanya peluang bagi perpindahan strata. Sehingga hal ini menyebabkan ketidaksetaraan sosial sebab akses didasarkan pada tingkat strata sosial.

2. Sikap Prejudice

Sikap ini mengarah pada generalisasi yang mengacu pada fakta dan lebih dominan sangat subjektif, dimana sikap ini cenderung untuk mengkategorikan seseorang berdasarkan pada rasa suka dan tidak suka. Sikap prejudice dapat ditujukan pada usia, suku, strata sosial, gender, partai politik.

3. Diskriminasi

Ketidaksetaraan juga dapat disebabkan dari adanya ketidakadilan. Sejumlah implementasi program pembangunan dapat dirasakan ketidakadilan bagi sebagian masyarakat jika mereka tidak puas atas pendistribusian kemanfaatan atas program tersebut sehingga banyak terjadi penolakan atau protes atas program pemerintah yang hanya menguntungkan segelintir orang/kelompok saja.

Ketidaksetaraan sosial dapat menjadi sumber konflik sosial, kurangnya kemajuan ekonomi, dan memperlambat perkembangan sosial suatu negara. Oleh karena itu, upaya untuk mengurangi ketidaksetaraan sosial sangat penting. Ini dapat mencakup perbaikan dalam distribusi kekayaan, peningkatan akses ke layanan dasar, dan upaya untuk memastikan bahwa semua anggota masyarakat memiliki peluang yang setara untuk berkembang. Pendidikan yang lebih merata, perluasan akses terhadap perawatan kesehatan, dan kebijakan yang mendukung kelompok masyarakat yang rentan dapat membantu mengurangi ketidaksetaraan sosial dan menciptakan masyarakat yang lebih adil.

Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk mengatasi ketidaksetaraan sosial di negara ini. Beberapa bukti nyata dari upaya ini termasuk:

1. Program Bantuan Sosial (Bansos): Pemerintah telah meluncurkan berbagai program bantuan sosial untuk membantu kelompok masyarakat yang kurang mampu. Contohnya adalah Program Keluarga Harapan (PKH) yang memberikan bantuan keuangan kepada keluarga miskin dengan syarat tertentu. Program seperti ini bertujuan untuk mengurangi ketidakesetaraan ekonomi.
2. Pendidikan Merata: Upaya telah dilakukan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Program wajib belajar 12 tahun adalah salah satu langkah penting dalam upaya ini. Pemerintah juga memberikan beasiswa kepada siswa yang kurang mampu untuk membantu mereka melanjutkan pendidikan mereka.
3. Pengembangan Infrastruktur: Pemerintah telah menginvestasikan dalam pembangunan infrastruktur dasar di daerah pedesaan. Ini termasuk pembangunan jalan, air bersih, sanitasi, dan akses listrik. Ini membantu mengurangi ketidakesetaraan akses terhadap layanan dasar.
4. Program Kesehatan Masyarakat: Pemerintah telah meluncurkan program kesehatan seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang memberikan akses terhadap layanan kesehatan kepada keluarga miskin. Program imunisasi dan layanan kesehatan ibu dan anak juga telah diperluas.
5. Pemberdayaan Perempuan: Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Berbagai program dan kebijakan telah diterapkan untuk meningkatkan akses perempuan ke pendidikan, pekerjaan, dan keputusan politik.
6. Pengentasan Kemiskinan Berbasis Masyarakat (PBBM): Program ini bertujuan untuk menggerakkan masyarakat dalam mengatasi kemiskinan dengan memberdayakan mereka dalam usaha ekonomi, pelatihan, dan pengembangan keterampilan.

Reformasi Sistem Perpajakan: Pemerintah telah melakukan reformasi perpajakan untuk meningkatkan penerimaan pajak dan memastikan bahwa mereka yang mampu membayar pajak sesuai dengan kontribusi ekonomi mereka. Hal ini membantu mendukung program-program sosial.

C. KEMISKINAN DAN KESENJANGAN SOSIAL

Menurut Abdain dalam Ketidakseimbangan sosial yang menyebabkan perbedaan yang sangat mencolok di masyarakat disebut kesenjangan sosial. Bisa juga diartikan sebagai situasi di mana orang kaya memiliki posisi dan kekuatan yang lebih besar daripada orang miskin. Disebabkan oleh perbedaan kualitas hidup yang mencolok, kesenjangan sosial muncul di masyarakat Indonesia dan di seluruh dunia. Faktanya, fenomena ini dapat terjadi di negara mana pun. Kesenjangan sosial adalah suatu keadaan ketidakseimbangan sosial yang ada di masyarakat yang menjadikan suatu perbedaan yang sangat mencolok. Kesenjangan sosial dan kemiskinan merupakan masalah yang saling berkaitan (Septiani, Fasa, & Suharto, 2022).

Suharto menuturkan kemiskinan atau poverty merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh negara, terutama di negara-negara yang masih berkembang dan tertinggal. Masalah kemiskinan bersifat multidimensional yang disebabkan oleh banyak faktor yang tidak hanya menjadi domain bidang ekonomi saja, tetapi juga berasal dari faktor politik, sosial, budaya dan sistem sosial lainnya. Kemiskinan adalah suatu keadaan di mana seseorang atau rumah tangga menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka sementara lingkungan mereka kurang memberikan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan mereka atau keluar dari masalah kemiskinan tersebut (Adawiyah, 2020).

Sementara itu, Bappenas mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang baik laki dan perempuan yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar manusia tersebut meliputi: terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, pemenuhan air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik (Purwanto, 2007).

Kemiskinan bukan sekadar tentang ketiadaan uang, tetapi juga tentang ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, air bersih, perumahan yang layak, pendidikan, dan layanan kesehatan. Ini

menciptakan siklus yang sulit untuk diputus, di mana kemiskinan dapat diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Pendapat para ahli tentang kemiskinan di Indonesia bervariasi, tetapi secara umum, mereka sepakat bahwa kemiskinan adalah masalah serius yang memerlukan perhatian serius dan tindakan segera. Berikut adalah beberapa pendapat ahli tentang kemiskinan:

1. Prof. Dr. Mubyarto (Ekonom): Profesor ekonomi terkenal Indonesia, Mubyarto, telah menyatakan bahwa kemiskinan di Indonesia terkait erat dengan masalah ketidaksetaraan dalam distribusi pendapatan dan akses terhadap sumber daya. Dia percaya bahwa langkah-langkah yang lebih tegas dalam redistribusi kekayaan dan kesempatan perlu diambil untuk mengatasi kemiskinan.
2. Prof. Dr. Emil Salim (Ekonom): Emil Salim adalah seorang ekonom dan mantan Menteri Lingkungan Hidup Indonesia. Dia telah menekankan pentingnya perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan dalam mengatasi kemiskinan. Menurutnya, pemahaman tentang sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan adalah kunci untuk mengurangi kemiskinan jangka panjang.
3. Dr. Sri Mulyani Indrawati (Ekonom): Sri Mulyani Indrawati adalah seorang ekonom dan Menteri Keuangan Indonesia yang sangat dihormati. Dia telah menyoroti pentingnya perbaikan tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara untuk mengurangi kemiskinan. Dia juga telah menekankan pentingnya investasi dalam pendidikan dan kesehatan.
4. Prof. Dr. Armida Alisjahbana (Sosiolog): Seorang sosiolog terkemuka, Armida Alisjahbana, telah menyoroti dampak sosial kemiskinan, terutama pada anak-anak dan perempuan. Dia percaya bahwa untuk mengatasi kemiskinan, perlu fokus pada perlindungan hak anak dan perempuan, serta meningkatkan akses mereka ke pendidikan dan pekerjaan.
5. Prof. Dr. Muhammad Yunus (Penerima Hadiah Nobel Perdamaian): Muhammad Yunus, yang dianugerahi Hadiah Nobel Perdamaian untuk perannya dalam pengembangan mikrokredit, telah menyatakan bahwa upaya untuk memberdayakan mereka yang kurang mampu ekonomi adalah kunci untuk mengurangi kemiskinan. Pendekatan seperti mikrofinansial dan kewirausahaan sosial dapat membantu mereka yang hidup dalam kemiskinan untuk memperbaiki kondisi mereka.

Pendapat ahli-ahli ini mencerminkan kompleksitas masalah kemiskinan di Indonesia dan berbagai pendekatan yang dapat diambil dalam upaya mengatasi masalah ini. Meskipun pendapat mereka mungkin berbeda, semuanya setuju bahwa tindakan nyata dan berkelanjutan diperlukan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Kemiskinan memiliki dampak yang luas pada masyarakat. Itu tidak hanya memengaruhi kehidupan individu yang hidup dalam kondisi miskin, tetapi juga merusak perkembangan sosial dan ekonomi negara secara keseluruhan. Masalah seperti kesehatan yang buruk, kurangnya pendidikan, dan ketidaksetaraan dapat memperburuk kemiskinan. Data kemiskinan di Indonesia dapat bervariasi tergantung pada sumber data dan metodologi pengukuran yang digunakan. Namun, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, data kemiskinan di Indonesia pada tahun 2020 menunjukkan sekitar 9,22%. Ini berarti sekitar 24 juta penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan nasional.

Pemerintah Indonesia telah mengadopsi beberapa kebijakan yang mendukung pemberdayaan masyarakat. Beberapa di antaranya termasuk:

1. Undang-Undang Desa: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan salah satu instrumen kebijakan yang mendorong pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Undang-Undang ini memberikan wewenang kepada desa untuk mengelola sumber daya dan mengambil keputusan dalam pembangunan desa.
2. Program Dana Desa (DD): Dana Desa adalah program yang memberikan alokasi dana langsung kepada desa untuk mendukung pembangunan lokal. Program ini memberikan kesempatan kepada komunitas desa untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.
3. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan: Pemerintah telah mengadopsi berbagai kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Ini termasuk program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan.
4. Kebijakan Gender dan Perlindungan Anak: Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan kesetaraan gender dan perlindungan anak-anak dalam

berbagai aspek kehidupan. Ini mendukung pemberdayaan perempuan dan anak-anak.

5. Program Pemberdayaan Ekonomi: Pemerintah telah meluncurkan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan program-program pelatihan kewirausahaan.
6. Program Pengentasan Kemiskinan Pedesaan (PNPM Mandiri): Program ini adalah inisiatif pemerintah untuk meningkatkan akses masyarakat pedesaan ke layanan dasar, termasuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
7. Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Adat: Pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat, serta mendukung pemberdayaan mereka dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.
8. Kebijakan Lingkungan Hidup: Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan lingkungan hidup yang bertujuan untuk melibatkan masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam.
9. Program-program Kesejahteraan Sosial: Program-program seperti BPJS Kesehatan, Bantuan Sosial Tunai (BST), dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
10. Kebijakan Partisipasi Publik: Pemerintah juga telah mendorong partisipasi publik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan program-program pemerintah.

Pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai program pengentasan kemiskinan, dan beberapa di antaranya masih sedang berlangsung. Berikut adalah beberapa program yang telah atau sedang dilaksanakan:

1. Program Keluarga Harapan (PKH): Program PKH memberikan bantuan keuangan kepada keluarga miskin dengan syarat tertentu. Program ini bertujuan untuk membantu keluarga miskin memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.
2. Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT): Program ini memberikan bantuan pangan berupa kartu elektronik yang dapat digunakan untuk membeli

bahan makanan. Tujuannya adalah memastikan keluarga miskin memiliki akses ke makanan yang cukup.

3. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM): PNPM adalah program yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat miskin dengan memberikan dukungan dalam pengembangan usaha mikro dan koperasi, serta infrastruktur sosial.
4. Program Keluarga Berencana (KB): Pemerintah telah melaksanakan program KB untuk membantu keluarga miskin mengendalikan pertumbuhan keluarga mereka. Ini melibatkan penyediaan informasi, layanan kesehatan reproduksi, dan kontrasepsi.
5. Pendidikan Merata: Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Program wajib belajar 12 tahun adalah langkah penting dalam upaya ini.
6. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN): JKN adalah program jaminan kesehatan nasional yang bertujuan untuk memberikan akses terhadap layanan kesehatan yang terjangkau kepada semua warga negara. Program ini membantu mengurangi beban biaya kesehatan bagi masyarakat miskin.
7. Pembangunan Infrastruktur: Investasi dalam pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, sanitasi, dan listrik di daerah pedesaan adalah langkah penting untuk mengurangi ketidaksetaraan akses terhadap layanan dasar.
8. Program Desa Mandiri Energi (MAMPU): Program ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat pedesaan dalam hal pengembangan sumber daya energi yang berkelanjutan, yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan peluang ekonomi mereka.
9. Bantuan Pendidikan: Pemerintah memberikan bantuan pendidikan kepada siswa miskin melalui beasiswa dan program-program lainnya untuk memastikan mereka dapat melanjutkan pendidikan mereka hingga tingkat yang lebih tinggi.

Program-program ini mencerminkan upaya pemerintah Indonesia dalam mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan sosial. Namun, meskipun telah ada kemajuan, masih banyak pekerjaan yang perlu dilakukan untuk mencapai kemajuan yang lebih besar dalam pengentasan kemiskinan. Pemerintah terus

bekerja keras untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan bagi seluruh warga Indonesia.

Pandangan para ahli tentang kemiskinan dan kesenjangan sosial di Indonesia mencerminkan pemahaman mendalam tentang masalah ini serta berbagai pendekatan untuk mengatasinya. Berikut adalah beberapa pandangan ahli:

1. Prof. Dr. Aris Ananta (Sosiolog): Aris Ananta telah menyoroti dampak globalisasi dan urbanisasi terhadap ketidaksetaraan di Indonesia. Ia menganggap perubahan sosial dan ekonomi yang cepat sebagai faktor penting yang berkontribusi pada kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan. Ia juga menyoroti peran teknologi dan globalisasi dalam menciptakan peluang baru namun juga meningkatkan ketidaksetaraan dalam akses terhadap sumber daya.
2. Prof. Dr. Rizal Sukma (Ekonom): Rizal Sukma telah menekankan pentingnya perbaikan tata kelola dan reformasi ekonomi dalam mengatasi kemiskinan dan kesenjangan. Ia percaya bahwa pengentasan kemiskinan memerlukan perbaikan dalam distribusi kekayaan dan perluasan akses terhadap peluang ekonomi bagi mereka yang kurang mampu.
3. Prof. Dr. Sri Adiningsih (Ekonom): Sri Adiningsih telah menyoroti masalah pendidikan dan kesehatan sebagai faktor penting dalam ketidaksetaraan sosial. Ia menekankan pentingnya perbaikan dalam kualitas dan akses pendidikan serta layanan kesehatan yang merata untuk mengurangi kesenjangan.
4. Prof. Dr. Sudarno Sumarto (Ekonom): Sudarno Sumarto telah menyatakan bahwa program-program bantuan sosial seperti PKH memiliki potensi untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Ia menekankan pentingnya memastikan bahwa program-program ini mencapai keluarga yang membutuhkan dengan efisien.
5. Dr. Laksmi Savitri (Pengembangan Manusia): Laksmi Savitri telah menyoroti peran perempuan dalam pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial. Ia percaya bahwa pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender adalah kunci untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

Para ahli ini menunjukkan berbagai dimensi masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial di Indonesia, termasuk isu-isu ekonomi, sosial, pendidikan, dan gender. Pandangan mereka juga mencerminkan keragaman pendekatan yang dapat digunakan dalam upaya mengatasi masalah ini. Kesamaan dalam pandangan mereka adalah pemahaman bahwa pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan memerlukan kerja keras, perbaikan tata kelola, dan program-program yang berkelanjutan yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia.

D. HARAPAN UNTUK MASA DEPAN

Harapan untuk masa depan dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia adalah menciptakan masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Beberapa aspirasi penting untuk masa depan adalah:

1. Pengurangan Tingkat Kemiskinan yang Signifikan: Diharapkan bahwa dengan program-program pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan, tingkat kemiskinan di Indonesia akan terus berkurang. Tujuannya adalah agar setiap warga negara memiliki akses yang cukup terhadap makanan, pendidikan, perumahan, dan layanan kesehatan.
2. Kesejahteraan dan Kesetaraan: Masyarakat Indonesia berharap untuk menciptakan kondisi di mana setiap individu memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang. Ini mencakup kesetaraan gender, kesetaraan akses ke pendidikan dan pekerjaan, serta kesetaraan dalam akses terhadap layanan dasar.
3. Kualitas Pendidikan yang Lebih Baik: Meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia adalah tujuan penting. Diharapkan bahwa anak-anak Indonesia akan memiliki akses ke pendidikan berkualitas yang memungkinkan mereka untuk mencapai potensi maksimal mereka.
4. Pelayanan Kesehatan yang Merata: Harapan untuk masa depan melibatkan penyediaan layanan kesehatan yang merata dan terjangkau untuk semua warga. Ini mencakup upaya dalam mengurangi stunting pada anak-anak, menurunkan tingkat kematian ibu dan anak, serta mengatasi isu-isu kesehatan masyarakat.
5. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat: Diharapkan bahwa program-program seperti PNPM dan bantuan sosial akan membantu meningkatkan

pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama di daerah pedesaan. Ini melibatkan pengembangan usaha mikro, koperasi, dan peluang ekonomi lainnya.

6. **Perlindungan Lingkungan yang Lebih Baik:** Masyarakat Indonesia semakin sadar akan perlunya perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Harapannya adalah melindungi sumber daya alam yang berharga sambil memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
7. **Penurunan Ketidaksetaraan Sosial:** Di masa depan, diharapkan bahwa kesenjangan sosial di antara kelompok masyarakat akan semakin mengecil. Ini mencakup pengurangan ketidaksetaraan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok etnis.
8. **Partisipasi Aktif Masyarakat:** Diharapkan bahwa masyarakat Indonesia akan semakin aktif dalam proses pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Ini mencakup partisipasi dalam pengambilan keputusan, advokasi untuk hak-hak mereka, dan berkontribusi dalam upaya pengentasan kemiskinan.
9. **Ketahanan Terhadap Krisis:** Masyarakat Indonesia berharap untuk memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap krisis ekonomi dan bencana alam. Ini melibatkan diversifikasi ekonomi, penyediaan jaringan keselamatan sosial yang kuat, dan perencanaan bencana yang lebih baik.

Dengan komitmen pemerintah, kerja sama antar lembaga dan masyarakat, serta upaya berkelanjutan, Indonesia memiliki potensi untuk mencapai tujuan-tujuan ini dan menciptakan masa depan yang lebih cerah dan berkelanjutan bagi semua warganya



KONSEP DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

A. PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat adalah konsep yang mendalam dan penuh makna dalam konteks pembangunan komunitas. Konsep ini telah menjadi sorotan utama dalam berbagai program pembangunan, penelitian, dan praktik sosial di seluruh dunia. Buku ini akan membahas secara menyeluruh tentang pemberdayaan masyarakat, menguraikan teori-teori yang mendasarinya, serta memberikan pandangan praktis mengenai implementasinya.

Konsep pemberdayaan masyarakat bukanlah sekadar sebuah frasa populer, tetapi sebuah landasan penting dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam bab ini, kita akan memulai perjalanan untuk memahami dasar-dasar konsep ini. Pertama-tama, kita akan mendefinisikan apa yang dimaksud dengan pemberdayaan masyarakat dan menguraikan batasannya. Setelah itu, kita akan melihat bagaimana konsep ini berkembang seiring waktu dan bagaimana teori-teori yang berbeda telah membentuk pemahaman kita tentang pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat bukanlah sekadar memberikan bantuan atau sumber daya kepada masyarakat. Ini adalah tentang memberikan komunitas kontrol atas nasib mereka sendiri, memberikan mereka alat dan pengetahuan untuk mengatasi tantangan yang mereka hadapi, dan mendorong partisipasi

aktif dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Konsep ini juga menekankan pentingnya kolaborasi, keterlibatan, dan tanggung jawab bersama dalam mencapai perubahan positif.

Melalui pemahaman yang mendalam tentang konsep pemberdayaan masyarakat, kita dapat menginspirasi dan membantu komunitas-komunitas untuk menjadi lebih mandiri, kuat, dan mampu mengatasi permasalahan mereka sendiri. Dalam bab-bab berikutnya, kita akan menjelajahi tahapan-tahapan proses pemberdayaan, faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya, studi kasus yang mengilustrasikan prinsip-prinsipnya, serta tantangan dan hambatan yang mungkin dihadapi dalam upaya pemberdayaan komunitas.

Dengan demikian, mari kita mulai perjalanan kita dalam memahami konsep dasar pemberdayaan masyarakat yang akan membantu kita memahami betapa pentingnya konsep ini dalam menciptakan perubahan positif dan membangun masyarakat yang lebih kuat dan berkelanjutan.

B. DEFINISI DAN RUANG LINGKUP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Kata “pemberdayaan” adalah terjemahan dari bahasa Inggris “*commission*”, dengan “*power*” sebagai kata dasar yang berarti kekuatan berbuat, mencapai, melakukan atau memungkinkan. Awalan “*em*” pemberdayaan dapat berarti kekuatan dalam diri manusia, suatu sumber kreativitas (M. Z. Tanjung, 2017).

Chamber menuturkan bahwa Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang dengan keberadaan nilai-nilai masyarakat dalam desain paradigma baru yang diperuntukkan pada pembangunan yang bersifat *people-centered, participatory, commission and sustainable*. Lebih jauh Chamber menjelaskan bahwa konsep ini tidak hanya sekedar pemenuhan kebutuhan dasar (*introductory need*) masyarakat tetapi diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi lokal. Berbagai literatur dan perspektif telah memperkenalkan pemberdayaan masyarakat (*commission*) sebagai pendekatan alternatif untuk pembangunan, tetapi belum secara efektif diterapkan. Banyak orang berbicara tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat karena itu terkait dengan kemajuan dan perubahan bangsa ke depan (Munawar, 2011).

Hendra Hamid menyatakan bahwa salah satu tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan kekuatan masyarakat, terutama bagi kelompok lemah yang tidak berdaulat karena faktor internal(persepsi mereka sendiri) dan eksternal(struktur sosial yang tidak adil (Ir. Hendra Hamid, 2018)

Konsep dasar pemberdayaan masyarakat adalah suatu pendekatan dalam pembangunan sosial yang bertujuan untuk memberikan kontrol, pengetahuan, sumber daya, dan kekuatan kepada masyarakat agar mereka dapat mengatasi permasalahan yang mereka hadapi, meningkatkan kualitas hidup, dan mengambil peran aktif dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Berikut adalah deskripsi lebih rinci tentang konsep dasar pemberdayaan masyarakat:

- a. Kontrol dan Kemandirian: Pemberdayaan masyarakat menekankan pentingnya memberikan kontrol kepada masyarakat atas nasib mereka sendiri. Ini berarti memungkinkan mereka untuk mengambil inisiatif, membuat keputusan, dan merencanakan aksi-aksi yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka. Kemandirian merupakan kunci utama dalam konsep ini, di mana masyarakat menjadi lebih mandiri dalam mengatasi permasalahan mereka.
- b. Partisipasi Aktif: Konsep ini mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam semua aspek kehidupan komunitas, termasuk dalam perencanaan, pelaksanaan program, dan pengambilan keputusan. Partisipasi ini bukan hanya sebagai pelaku, tetapi juga sebagai pembuat keputusan yang memiliki suara dalam proses-proses tersebut.
- c. Pengembangan Sumber Daya: Pemberdayaan masyarakat juga melibatkan penyediaan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengatasi permasalahan mereka. Ini bisa berupa pelatihan, pendidikan, akses ke sumber daya ekonomi, atau informasi yang berguna.
- d. Keadilan Sosial: Konsep pemberdayaan masyarakat seringkali terkait dengan tujuan mencapai keadilan sosial. Ini berarti memberikan kesempatan yang sama kepada semua anggota masyarakat, termasuk yang berada di lapisan masyarakat yang lebih rentan, untuk berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari upaya pemberdayaan.

- e. Perubahan Struktural: Pemberdayaan masyarakat tidak hanya berfokus pada perbaikan individu, tetapi juga pada perubahan struktural dalam masyarakat yang mungkin menghambat kemajuan dan pemberdayaan. Ini bisa termasuk perubahan dalam kebijakan, budaya, dan praktik yang memungkinkan terciptanya masyarakat yang lebih adil dan berdaya.
- f. Kolaborasi dan Keterlibatan Bersama: Konsep ini menekankan pentingnya kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan berbagai pihak lainnya dalam mencapai tujuan pemberdayaan. Keterlibatan bersama ini memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang masalah yang dihadapi dan solusi yang efektif.

Konsep dasar pemberdayaan masyarakat memandang masyarakat sebagai subjek bukan objek pembangunan, yang berarti mereka bukan hanya penerima manfaat tetapi juga aktor utama dalam menciptakan perubahan positif dalam komunitas mereka. Pemberdayaan masyarakat bukanlah proses singkat atau instan, melainkan pendekatan jangka panjang yang membutuhkan kerja keras, kesabaran, dan komitmen untuk mencapai perubahan yang berkelanjutan.

Berikut ini rangkaian definisi tentang pemberdayaan masyarakat:

1. Memberdayakan masyarakat yaitu usaha melepaskan masyarakat dari perangkap kemiskinan, ketertinggalan dan kebodohan demi peningkatan harkat dan martabatnya, sehingga secara tidak langsung tidak hanya kapasitas pribadi yang meningkat tetapi juga terjadi peningkatan pada strata sosial mereka (M. Noor, 2011).
2. Pemberdayaan masyarakat merupakan bagian dari daya seseorang untuk melakukan pengenalan, perlindungan dan peningkatan kesejahteraannya sendiri (Mansur, 2022).
3. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya peningkatan kemampuan masyarakat dimana menjadikan tersedianya akses ke sejumlah sarana dan prasarana, pengembangan kelembagaan serta sistem informasi (Maryani dkk 2019).

Pendapat-pendapat para ahli ini menggarisbawahi pentingnya konsep dasar pemberdayaan masyarakat, yang melibatkan kontrol, partisipasi, peningkatan kapabilitas, dan perubahan struktural. Pemberdayaan masyarakat adalah pendekatan yang menciptakan perubahan yang berkelanjutan dan berfokus pada kesejahteraan komunitas serta kemampuan mereka untuk mengatasi permasalahan dan membangun masa depan yang lebih baik.

C. RUANG LINGKUP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Ruang lingkup pemberdayaan masyarakat mencakup berbagai aspek yang berfokus pada memberikan kontrol, pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya kepada masyarakat agar mereka dapat mengatasi permasalahan dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang ruang lingkup pemberdayaan masyarakat:

1. **Partisipasi Aktif:** Ruang lingkup pemberdayaan mencakup mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Ini melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan dan kebijakan.
2. **Pengembangan Kapasitas:** Pemberdayaan melibatkan pengembangan kapasitas masyarakat. Ini termasuk memberikan pelatihan, pendidikan, dan bantuan teknis kepada individu dan kelompok agar mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan mereka sendiri.
3. **Pemberian Kontrol:** Salah satu aspek penting pemberdayaan adalah memberikan masyarakat kontrol atas nasib mereka sendiri. Ini berarti memberikan mereka kemampuan untuk membuat keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka dan mengelola sumber daya yang ada di lingkungan mereka.
4. **Keadilan Sosial:** Ruang lingkup pemberdayaan mencakup tujuan mencapai keadilan sosial. Ini berarti memberikan kesempatan yang sama kepada semua anggota masyarakat, termasuk yang berada di lapisan yang lebih rentan, untuk berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari upaya pemberdayaan.

5. **Perubahan Struktural:** Pemberdayaan masyarakat tidak hanya berfokus pada perbaikan individu, tetapi juga pada perubahan struktural dalam masyarakat yang mungkin menghambat kemajuan dan pemberdayaan. Ini bisa termasuk perubahan dalam kebijakan, budaya, dan praktik yang memungkinkan terciptanya masyarakat yang lebih adil dan berdaya.
6. **Kolaborasi dan Keterlibatan Bersama:** Ruang lingkup pemberdayaan mencakup kerjasama dan keterlibatan bersama antara masyarakat, pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan berbagai pihak lainnya dalam mencapai tujuan pemberdayaan. Kolaborasi ini memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang masalah yang dihadapi dan solusi yang efektif.
7. **Pengembangan Ekonomi:** Pemberdayaan masyarakat seringkali mencakup upaya untuk meningkatkan ekonomi komunitas. Ini bisa termasuk pengembangan usaha mikro, koperasi, pelatihan keterampilan, dan akses ke sumber daya ekonomi.
8. **Pengelolaan Lingkungan:** Pemberdayaan juga dapat mencakup upaya untuk melibatkan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang ada di lingkungan mereka.

Ruang lingkup pemberdayaan masyarakat adalah pendekatan yang komprehensif yang bertujuan untuk menciptakan perubahan positif dalam komunitas. Ini melibatkan berbagai tindakan yang dirancang untuk meningkatkan kontrol, kualitas hidup, dan kemandirian masyarakat.

Kesuksesan kegiatan pemberdayaan ditentukan oleh sejumlah indikator yang dapat menunjukkan masyarakat tersebut mendapatkan kemanfaatan dari program pemberdayaan tersebut atau tidak. Pengukuran tingkat berhasil atau tidaknya pemberdayaan dapat diukur dari 5 (lima) dimensi (Sutangsa & Endang, 2023), yakni:

1. **Kesejahteraan**

Tujuan utama Program pemberdayaan adalah kesejahteraan maka dengan demikian masyarakat yang telah diberdayakan harus diukur tingkat peningkatan pemenuhan kebutuhan dasarnya, seperti sandang, pangan, papan, tingkat penghasilan, level pendidikan dan kualitas kesehatan.

2. Akses

Setiap kelompok masyarakat harus memiliki kesetaraan akses kepada sumber daya dan manfaat yang dari keberadaan sumber daya. Apabila terjadi ketiadaan dan atau pembatasan atas akses tersebut maka menjadi penyebab dari pencapaian kesejahteraan masyarakat. Dalam dinamika masyarakat seringkali diperlihatkan bahwa akses kemanfaatan sumber daya hanya diperuntukkan sepenuhnya pada masyarakat kelas tinggi dan sangat terbatas pada masyarakat kelas rendah. Dimana yang dimaksudkan dengan sumber daya adalah: waktu, tenaga, lahan, kredit, informasi, keterampilan dan yang lainnya.

3. Kesadaran Kritis

Peningkatan kesejahteraan sosial hanya dapat dicapai jika telah dengan sepenuhnya seluruh masyarakat memiliki kesadaran kritis akan pentingnya keberdayaan. Untuk itu maka hal ini perlu untuk senantiasa di galakan dikembangkan.

4. Partisipasi

Senantiasa melibatkan diri dalam suatu kegiatan pemberdayaan maka secara otomatis akan berpengaruh pada penentuan kebijakan dan dengan demikian akan dapat mengakomodir kepentingan mereka.

5. Kontrol

Masyarakat dengan hak-haknya sebagai warga negara maka dapat menjadi pengontrol atas penggunaan sumber daya. Sehingga bukan hanya pemegang kekuasaan saja atautkah kelompok kepentingan saja yang dapat memanfaatkan sumber daya tetapi semua pihak dapat dengan bebas untuk melakukan kontrol, evaluasi, mengendalikan dan melakukan pengelolaan atas sumber daya.

Stakeholders juga memegang peranan penting dalam mensukseskan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebab dengan adanya otoritas dari pejabat pemerintah setempat dan juga dilengkapi dengan unsur adanya penerimaan program maka dipastikan akan dorongan pengaruh agar masyarakat dapat berubah lebih maju sejalan dengan tujuan dari program pemberdayaan tersebut (Reskiaddin, Yulia Anhar², Sholikah, & Wartono, 2020).

D. SEJARAH PERKEMBANGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Sejarah perkembangan pemberdayaan masyarakat mencakup perkembangan konsep dan praktik ini dari waktu ke waktu. Di bawah ini adalah gambaran singkat tentang sejarah perkembangan pemberdayaan masyarakat:

Akar dalam Gerakan Sosial: Sejarah pemberdayaan masyarakat memiliki akar yang dalam gerakan sosial dan politik yang berfokus pada keadilan sosial dan kemandirian komunitas. Banyak gerakan sosial dan filosofi seperti gerakan hak sipil, gerakan hak perempuan, dan pemikiran pembebasan seperti yang diusung oleh Paulo Freire telah memberikan kontribusi pada pengembangan konsep ini.

Pemberdayaan di Bidang Pembangunan: Konsep pemberdayaan masyarakat menjadi semakin terkait dengan pembangunan di tingkat internasional pada tahun 1960-an dan 1970-an. Organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mulai mempromosikan pemberdayaan sebagai strategi penting dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan.

Pemberdayaan Perempuan: Selama beberapa dekade terakhir, pemberdayaan perempuan telah menjadi fokus penting dalam diskusi pemberdayaan masyarakat. Gerakan feminis dan upaya-upaya untuk meningkatkan peran dan status perempuan dalam masyarakat telah menjadi bagian integral dari pemberdayaan.

Konsep yang Berkembang: Konsep pemberdayaan masyarakat telah berkembang seiring waktu. Pada awalnya, fokusnya seringkali pada pemberian akses kepada masyarakat terhadap sumber daya dan peluang ekonomi. Namun, seiring dengan perkembangan, pemberdayaan semakin dianggap sebagai pendekatan yang holistik yang mencakup aspek-aspek seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan perubahan sosial.

Pemberdayaan Lokal: Terdapat peningkatan minat pada pemberdayaan komunitas lokal sebagai respons terhadap tantangan global. Pemberdayaan ini seringkali terfokus pada pengembangan kapasitas komunitas untuk mengatasi permasalahan mereka sendiri dan mengambil alih tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya lokal.

Teknologi dan Akses Informasi: Perkembangan teknologi informasi telah memberikan peluang baru untuk pemberdayaan masyarakat. Akses yang lebih besar terhadap informasi dan komunikasi memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan dan kampanye untuk perubahan sosial.

Pemberdayaan dalam Konteks Internasional: Konsep pemberdayaan masyarakat juga telah memengaruhi praktik dan kebijakan internasional. Organisasi internasional seperti PBB telah mengakui pentingnya pemberdayaan dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Seiring dengan perubahan sosial, politik, dan ekonomi, konsep pemberdayaan masyarakat terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan tantangan zaman. Pemberdayaan masyarakat tetap menjadi pendekatan penting dalam upaya meningkatkan kualitas hidup komunitas dan mencapai pembangunan berkelanjutan.



PROSES PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

A. PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat merupakan prinsip yang mendasari pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Dalam upaya menciptakan masyarakat yang lebih kuat, mandiri, dan berdaya, program kegiatan pemberdayaan masyarakat memiliki peran yang sangat penting. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas hidup masyarakat, khususnya mereka yang berada dalam situasi rentan dan kurang mampu. Pemberdayaan masyarakat bukan sekadar penyediaan bantuan, tetapi lebih merupakan proses yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program-program yang memengaruhi kehidupan mereka.

B. IDENTIFIKASI MASALAH DAN KEBUTUHAN KOMUNITAS

Identifikasi masalah dan kebutuhan komunitas adalah langkah awal yang krusial dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Ini merujuk pada proses mengidentifikasi permasalahan konkret yang dihadapi oleh suatu komunitas dan kebutuhan yang harus dipenuhi agar mereka dapat mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Identifikasi ini merupakan dasar untuk merancang program dan proyek yang relevan dan efektif dalam upaya pemberdayaan komunitas. Beberapa aspek penting dari identifikasi masalah dan kebutuhan komunitas adalah:



Gambar 3.1. Dimensi identifikasi masalah dan kebutuhan komunitas

1. Pengumpulan Informasi: Langkah awal adalah mengumpulkan informasi tentang kondisi komunitas. Informasi ini dapat berupa data statistik, hasil survei, wawancara dengan warga, dan observasi lapangan. Tujuannya adalah untuk memahami dengan lebih baik konteks sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan di mana komunitas berada.
2. Penentuan Masalah Utama: Setelah data dikumpulkan, langkah berikutnya adalah menentukan masalah utama yang dihadapi oleh komunitas. Ini dapat mencakup masalah seperti kemiskinan, ketidaksetaraan gender, kurangnya akses terhadap pendidikan atau layanan kesehatan, pengangguran, atau masalah lingkungan seperti polusi atau kekeringan.
3. Analisis Kebutuhan: Selain masalah, perlu juga menganalisis kebutuhan komunitas. Kebutuhan ini mencakup apa yang dibutuhkan oleh

komunitas untuk mengatasi masalah tersebut. Contohnya, jika masalahnya adalah kurangnya akses ke pendidikan, maka kebutuhan mungkin termasuk sekolah yang lebih dekat, bantuan pendidikan, atau pelatihan guru.

4. **Prioritisasi:** Tidak semua masalah dan kebutuhan memiliki tingkat urgensi yang sama. Oleh karena itu, perlu memprioritaskan masalah dan kebutuhan yang akan diatasi. Prioritas ini bisa didasarkan pada dampak yang lebih besar terhadap komunitas atau pada sumber daya yang tersedia.
5. **Partisipasi Komunitas:** Penting untuk melibatkan komunitas dalam proses identifikasi masalah dan kebutuhan. Masyarakat harus merasa memiliki proses ini dan memiliki kesempatan untuk menyampaikan pandangan dan aspirasi mereka.

Identifikasi masalah dan kebutuhan komunitas adalah landasan untuk merancang program pemberdayaan yang tepat sasaran dan efektif. Dengan pemahaman yang baik tentang masalah dan kebutuhan yang ada, program dapat dikembangkan untuk mengatasi permasalahan konkret yang dihadapi oleh komunitas dan memberikan manfaat yang berkelanjutan. Identifikasi masalah dan kebutuhan komunitas adalah tahap kunci dalam setiap upaya pemberdayaan masyarakat yang berhasil. Kegiatan ini memiliki nilai yang luar biasa dalam mengarahkan upaya pemberdayaan menuju solusi yang lebih relevan dan efektif. Berikut adalah beberapa alasan mengapa identifikasi masalah dan kebutuhan komunitas sangat penting:

1. **Kepentingan Berbasis pada Fakta:** Identifikasi masalah dan kebutuhan berdasarkan data empiris, bukan pada asumsi atau tebakan. Hal ini memastikan bahwa upaya pemberdayaan didasarkan pada informasi yang akurat dan realitas yang dihadapi oleh komunitas.
2. **Relevansi:** Dengan memahami masalah dan kebutuhan komunitas, program pemberdayaan dapat dirancang untuk mengatasi permasalahan yang sesungguhnya dihadapi oleh komunitas. Ini mencegah pemborosan sumber daya pada proyek yang tidak relevan.
3. **Partisipasi Aktif:** Identifikasi masalah dan kebutuhan melibatkan komunitas dalam proses pengambilan keputusan. Ini memberi mereka

suara dan peran dalam merancang solusi, yang pada gilirannya meningkatkan tingkat partisipasi dan keterlibatan komunitas.

4. Sumber Daya Terfokus: Dengan mengetahui masalah dan kebutuhan yang paling mendesak, program pemberdayaan dapat lebih fokus dalam alokasi sumber daya. Ini membuat penggunaan sumber daya menjadi lebih efisien dan efektif.
5. Peningkatan Keberlanjutan: Dengan mengatasi masalah dan kebutuhan yang mendasar, program pemberdayaan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi komunitas. Ini membantu dalam memastikan keberlanjutan perubahan yang dicapai.
6. Pemberdayaan Sesungguhnya: Pemberdayaan bukan sekadar memberikan bantuan, tetapi memberdayakan komunitas untuk mengambil kendali atas nasib mereka sendiri. Identifikasi masalah dan kebutuhan adalah langkah awal dalam mendorong komunitas untuk berperan aktif dalam proses pemberdayaan mereka.

Upaya pemberdayaan masyarakat yang benar-benar berdampak membutuhkan landasan yang kuat dalam pemahaman yang mendalam tentang masalah dan kebutuhan komunitas. Ini adalah langkah pertama yang kritis dalam perjalanan menuju masyarakat yang lebih kuat, berdaya, dan berkelanjutan. Dengan pendekatan yang berfokus pada komunitas dan partisipatif, kita dapat menciptakan perubahan yang positif yang sejalan dengan aspirasi dan kebutuhan mereka.

C. PERENCANAAN DAN STRATEGI PEMBERDAYAAN

Ermaya menuturkan bahwa strategi adalah suatu upaya yang dilakukan secara logis dengan memperhitungkan sejumlah aspek sebagai bagian dari pencapaian tujuan dan sasaran. Pemberdayaan adalah proses memberikan atau menyerahkan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kompetensi kepada kelompok masyarakat dengan tujuan meningkatkan daya hidup mitra (*survival of the fittes*). Tahapan tersebut bisa disempurnakan dengan upaya untuk membangun aset material yang nantinya mengarahkan pihak tersebut berkembang menjadi lebih mandiri (Ir. Hendra Hamid, 2018).

Selain itu, seperti yang dinyatakan oleh Prasojo bahwa strategi pemberdayaan masyarakat membutuhkan pelibatan sektor lain, seperti kewenangan, manajemen, program, dan pembiayaan. Dalam hal ini, masyarakat yang menentukan tema atau topik pemberdayaan dengan disesuaikan pada dasar kebutuhan, dimana Pemerintah hanya berfungsi sebagai pengaturan dan fasilitator. Pada dasarnya, masyarakat harus melakukan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sendiri melalui lembaga yang berwenang (Kehik, 2018).

Perencanaan kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat adalah proses yang terstruktur dan terorganisasi untuk merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan serangkaian tindakan atau program yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, kualitas hidup, dan kemandirian komunitas. Perencanaan kegiatan ini merupakan langkah penting dalam menjalankan program pemberdayaan yang efektif. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi:

1. Tujuan yang Jelas: Menentukan tujuan yang spesifik dan terukur adalah langkah pertama dalam perencanaan kegiatan. Tujuan ini harus sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi komunitas serta memberikan arah yang jelas bagi program.
2. Partisipasi Komunitas: Komunitas harus terlibat dalam perencanaan kegiatan. Partisipasi mereka dalam menentukan tujuan, merancang program, dan membuat keputusan adalah kunci untuk mencapai pemberdayaan yang sesungguhnya.
3. Analisis Kebutuhan: Mengidentifikasi masalah dan kebutuhan komunitas adalah dasar perencanaan. Proses ini memastikan bahwa program akan mengatasi masalah konkret yang dihadapi komunitas.
4. Sumber Daya yang Diperlukan: Perencanaan kegiatan juga mencakup penentuan sumber daya yang diperlukan, termasuk anggaran, tenaga kerja, dan fasilitas. Hal ini penting untuk memastikan kelancaran implementasi program.
5. Pengukuran dan Evaluasi: Membuat sistem pengukuran dan evaluasi adalah bagian penting dalam perencanaan. Ini memungkinkan pemantauan terhadap kemajuan program dan perbaikan berkelanjutan.
6. Kemitraan dan Jaringan: Dalam beberapa kasus, perencanaan kegiatan juga melibatkan mencari kemitraan dengan organisasi lain atau pihak-

pihak eksternal yang dapat memberikan dukungan dan sumber daya tambahan.

7. Rencana Tindakan: Merancang langkah-langkah konkret yang akan diambil, termasuk waktu pelaksanaan, tugas, tanggung jawab, dan pemantauan, adalah bagian penting dalam perencanaan kegiatan.
8. Komunikasi dan Pelibatan Masyarakat: Komunikasi yang efektif dengan komunitas dan pihak-pihak terkait adalah kunci dalam perencanaan. Masyarakat harus memiliki pemahaman yang jelas tentang program dan merasa terlibat dalam setiap tahap.

Perencanaan kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat membantu dalam memastikan bahwa program berjalan dengan terstruktur dan terfokus pada hasil yang diinginkan. Ini juga memungkinkan komunitas untuk merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap perkembangan program. Dengan pendekatan partisipatif dan terorganisasi, program pemberdayaan dapat lebih efektif dalam mencapai tujuannya dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi komunitas yang dilayani.

Perencanaan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat memiliki sejumlah alasan yang sangat penting. Berikut adalah beberapa alasan mengapa perencanaan dalam pemberdayaan masyarakat sangat diperlukan:

1. Mengarahkan Tujuan yang Jelas: Perencanaan membantu dalam menetapkan tujuan dan sasaran yang jelas. Hal ini penting karena tanpa tujuan yang jelas, program pemberdayaan dapat kehilangan fokus dan akhirnya tidak mencapai hasil yang diinginkan.
2. Optimalkan Penggunaan Sumber Daya: Perencanaan membantu dalam mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan program pemberdayaan, termasuk anggaran, waktu, dan tenaga kerja. Ini memastikan penggunaan sumber daya yang efisien dan efektif.
3. Mengidentifikasi Masalah dan Kebutuhan: Melalui perencanaan, kita dapat mengidentifikasi masalah konkret yang dihadapi oleh komunitas dan kebutuhan yang harus dipenuhi. Hal ini memastikan bahwa program pemberdayaan relevan dengan kebutuhan komunitas.
4. Partisipasi Komunitas: Perencanaan yang partisipatif melibatkan komunitas dalam merumuskan tujuan dan rencana tindakan. Hal ini

memberi mereka perasaan memiliki dan bertanggung jawab terhadap perkembangan program.

5. Mengukur Kemajuan dan Evaluasi: Dengan perencanaan yang baik, kita dapat menetapkan indikator kinerja dan sistem pengukuran yang memungkinkan pemantauan terhadap kemajuan program. Evaluasi yang teratur membantu dalam perbaikan berkelanjutan.
6. Meningkatkan Keberlanjutan: Perencanaan yang matang mempertimbangkan keberlanjutan program. Ini melibatkan pemikiran tentang bagaimana program akan berlanjut setelah dana awal habis.
7. Menyediakan Rencana Darurat: Perencanaan juga mencakup perencanaan darurat untuk mengatasi permasalahan yang mungkin timbul selama pelaksanaan program. Ini membantu dalam menghindari gangguan yang tak terduga.
8. Menjamin Akuntabilitas: Dengan perencanaan yang baik, tanggung jawab dan peran setiap pihak terdefinisi dengan jelas. Hal ini menciptakan akuntabilitas dalam pelaksanaan program.
9. Komunikasi yang Efektif: Perencanaan mencakup komunikasi yang efektif dengan semua pihak yang terlibat, termasuk komunitas, mitra, dan pemangku kepentingan lainnya.
10. Menghindari Pemborosan Sumber Daya: Tanpa perencanaan, sumber daya dapat dihabiskan pada aktivitas yang tidak produktif atau tidak relevan. Perencanaan membantu dalam menghindari pemborosan sumber daya.
11. Pemberdayaan Sesungguhnya: Melalui perencanaan yang melibatkan komunitas, program pemberdayaan sesungguhnya memberdayakan masyarakat untuk mengambil kendali atas nasib mereka sendiri.

Kesimpulannya, perencanaan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah fondasi yang kritis untuk program yang efektif dan berkelanjutan. Hal ini memastikan bahwa program sesuai dengan tujuan dan kebutuhan komunitas, dan memberikan manfaat yang nyata dan berkelanjutan.

Dengan adanya perencanaan pemberdayaan masyarakat yang baik, berbagai strategi pemberdayaan dapat dilakukan untuk mencapai hasil yang lebih efektif dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan dalam konteks perencanaan pemberdayaan masyarakat:

1. Pendidikan dan Pelatihan: Menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat. Ini dapat mencakup pelatihan keterampilan, pelatihan wirausaha, dan peningkatan akses ke pendidikan formal.
2. Pemberdayaan Ekonomi: Mendukung pembentukan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam komunitas. Ini mencakup penyediaan modal usaha, akses ke pasar, dan dukungan teknis.
3. Partisipasi dan Pengambilan Keputusan: Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi mereka. Ini bisa melibatkan pendirian forum komunitas, pertemuan partisipatif, dan advokasi.
4. Akses Terhadap Layanan Dasar: Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan, layanan kesehatan, air bersih, dan sanitasi.
5. Kesejahteraan Sosial: Menyediakan program-program bantuan sosial dan perlindungan untuk kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, dan penyandang disabilitas.
6. Infrastruktur dan Fasilitas: Membangun dan meningkatkan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan fasilitas komunitas. Hal ini dapat meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup.
7. Pemberdayaan Perempuan: Mendorong pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender melalui program-program khusus dan pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan.
8. Pengembangan Kapasitas Organisasi: Memperkuat organisasi komunitas atau lembaga yang bertanggung jawab atas program pemberdayaan. Ini termasuk pelatihan pengelolaan dan perencanaan.
9. Penggunaan Teknologi dan Inovasi: Memanfaatkan teknologi dan inovasi untuk memperbaiki akses informasi, layanan, dan peluang ekonomi bagi masyarakat.
10. Rencana Tindakan Bersama: Menciptakan rencana tindakan yang disepakati bersama antara komunitas, lembaga pemerintah, dan mitra lainnya. Hal ini memastikan kolaborasi dan komitmen terhadap tujuan bersama.

Strategi pemberdayaan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks komunitas tertentu. Dalam perencanaan pemberdayaan yang baik, penting untuk memahami masalah dan kebutuhan komunitas, melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan, dan merancang program yang sesuai dengan tujuan dan aspirasi mereka.

D. PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN

Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat adalah tahap di mana rencana dan strategi yang telah dirancang dalam fase perencanaan diterapkan dan dilaksanakan secara nyata. Ini melibatkan serangkaian kegiatan, intervensi, dan tindakan konkret yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan kualitas hidup komunitas sasaran. Dalam konteks pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, beberapa poin penting adalah:

1. Implementasi Rencana: Pelaksanaan program pemberdayaan melibatkan implementasi semua elemen yang telah dirumuskan dalam rencana tindakan, termasuk kegiatan, anggaran, dan sumber daya yang diperlukan.
2. Partisipasi Aktif: Komunitas harus terlibat secara aktif dalam pelaksanaan program. Partisipasi mereka adalah kunci untuk mencapai pemberdayaan yang sesungguhnya.
3. Pengelolaan Sumber Daya: Manajemen yang baik dari sumber daya program, termasuk anggaran dan personil, adalah kunci dalam memastikan pelaksanaan yang lancar dan efisien.
4. Pemantauan dan Evaluasi: Sistem pemantauan dan evaluasi harus diterapkan selama pelaksanaan program untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran program tercapai. Ini memungkinkan perbaikan berkelanjutan.
5. Komunikasi yang Efektif: Komunikasi yang efektif dengan semua pihak terkait, termasuk komunitas, mitra, dan pemangku kepentingan lainnya, adalah penting untuk menjaga semua pihak terinformasi dan terlibat.
6. Perubahan dan Adaptasi: Terkadang, selama pelaksanaan, mungkin muncul perubahan dalam kondisi atau kebutuhan komunitas. Program harus dapat beradaptasi dengan perubahan ini.

7. Pengukuran Kinerja: Indikator kinerja harus dipantau secara teratur untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai rencana dan mencapai hasil yang diinginkan.
8. Pengelolaan Konflik: Dalam beberapa kasus, konflik atau hambatan mungkin muncul selama pelaksanaan program. Pengelolaan konflik yang efektif penting untuk menjaga kelancaran program.

Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat adalah langkah kunci dalam mengubah rencana dan visi pemberdayaan menjadi tindakan nyata yang bermanfaat bagi komunitas. Dengan perhatian pada partisipasi komunitas, manajemen yang baik, dan pemantauan yang cermat, program pemberdayaan dapat mencapai dampak yang positif dan berkelanjutan.

Pemberdayaan berbasis potensi komunitas lokal dapat diselenggarakan jika telah memenuhi tiga (3) syarat (Hadiyanti, 2008) sebagai berikut:



Gambar 3.2. Syarat Pemberdayaan berbasis komunitas lokal

1. Restrukturisasi kelembagaan komunitas
Pemerintahan yang berpola feodalistis dan kolonial harus dapat ditata kembali ke arah pemerintahan yang berdasarkan profesional dan memiliki dinamisasi masyarakat yang baik. Pola tatanan baru diharapkan dapat menjamin peningkatan kreatifitas masyarakat dalam mendorong ide kreatif berbasis kearifan lokal dalam pemenuhan sejumlah kebutuhan dasarnya. Masyarakat harus dijadikan sebagai pelaku utama dan pemegang kendali atas arah kebijakan pembangunan.
2. Telaah kebijakan harus dilakukan kepada sejumlah kebijakan yang melemahkan kebudayaan masyarakat dan kemudian menciptakan kebijakan yang dapat mendukung semakin baiknya keberdayaan masyarakat desa dengan tujuan untuk perbaikan kesejahteraan.
3. Pada aras program, *top down approach* harus dirubah ke arah *bottom up approach* dimana hal ini tercermin dalam penentuan kebijakan dan pelaksanaan program. Sebaiknya setiap program bersumber dari lokasi pelaksanaannya, dimana sebelum suatu program pemerintah dilaksanakan maka terlebih dahulu harus dilakukan identifikasi masalah dan kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pemanfaatan. Dengan prinsip dari lahirnya program tersebut maka dapat dipastikan sukses tidaknya menjadi tanggung jawab bersama masyarakat.



DINAMIKA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

A. PENDAHULUAN

Pendekatan dalam pemberdayaan membantu dalam merancang tujuan yang jelas dan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Ini memastikan bahwa program pemberdayaan relevan dan sesuai dengan kebutuhan komunitas. Dengan pemahaman yang baik tentang pendekatan, hal ini membantu menghindari pemborosan sumber daya pada kegiatan yang tidak relevan atau tidak efektif. Dan untuk memaksimalkan pencapaian tujuan maka dengan dilengkapi monitoring dan evaluasi menjadikan semua kegiatan yang dilaksanakan dalam pemberdayaan masyarakat dapat diukur tingkat ketercapaiannya.

B. PENDEKATAN PEMBERDAYAAN

Secara umum dalam konsep pemberdayaan maka pendekatan yang digunakan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri. Faktor yang dapat mendukung tercapainya sasaran kegiatan pemberdayaan masyarakat sangat dipengaruhi oleh jenis pendekatan yang digunakan dalam melakukan kegiatan tersebut (Sujarwo, 2021). Dalam hal ini, pendekatan yang dimaksud terkait dengan cara membuat kelompok yang menjadi sasaran kegiatan pemberdayaan terbuka untuk menerima berbagai

jenis inovasi, semua dengan tujuan untuk memberi mereka kesempatan untuk melepaskan diri dari kebiasaan yang tidak sehat (Haris, 2014).

Pemberdayaan masyarakat melibatkan berbagai pendekatan yang dirancang untuk memperkuat kapasitas, partisipasi, dan kemandirian komunitas. Berikut adalah beberapa pendekatan yang digunakan dalam pemberdayaan masyarakat:

1. Pendekatan Berbasis Masalah: Pendekatan ini mengutamakan identifikasi dan penyelesaian masalah-masalah konkret yang dihadapi oleh komunitas. Ini melibatkan komunitas dalam mengidentifikasi masalah-prioritas mereka dan merancang solusi yang sesuai.
2. Partisipasi Aktif: Partisipasi aktif komunitas adalah prinsip inti pemberdayaan. Pendekatan ini menekankan peran sentral komunitas dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan program.
3. Pendekatan Berbasis Sumber Daya: Pendekatan ini berfokus pada pengembangan dan pemanfaatan sumber daya lokal yang ada dalam komunitas. Ini mencakup pemanfaatan sumber daya alam, keahlian, dan aset komunitas.
4. Pendekatan Kemitraan: Kemitraan dengan organisasi eksternal seperti pemerintah, LSM, atau sektor swasta dapat memperkuat program pemberdayaan melalui bantuan teknis, sumber daya, dan akses ke jaringan yang lebih luas.
5. Pendekatan Berorientasi Pendidikan: Pemberdayaan sering mencakup pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan komunitas. Ini bisa meliputi pelatihan keterampilan, edukasi kesehatan, atau pendidikan pertanian.
6. Pendekatan Berorientasi Gender: Untuk mencapai kesetaraan gender, pendekatan ini memberikan fokus khusus pada pemberdayaan perempuan dan peningkatan peran serta mereka dalam komunitas.
7. Advokasi dan Pengaruh Kebijakan: Pendekatan ini mencakup upaya untuk memengaruhi kebijakan pemerintah atau tindakan lainnya untuk mendukung pemberdayaan komunitas dan mengatasi isu-isu struktural.
8. Pendekatan Berorientasi Sosial: Pendekatan ini memperhatikan aspek sosial dan budaya dalam pemberdayaan, termasuk memperkuat identitas dan solidaritas komunitas.

9. Pendekatan Berbasis Pendidikan Politik: Pendidikan politik dan kewarganegaraan adalah bagian penting dalam pemberdayaan, memungkinkan komunitas untuk mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan dan memahami hak-hak mereka.
10. Pendekatan Berbasis Jaringan: Memanfaatkan jaringan dan aliansi dengan komunitas lain, organisasi, atau lembaga adalah cara untuk memperluas dampak pemberdayaan.

Pendekatan-pendekatan ini dapat digabungkan atau disesuaikan sesuai dengan kebutuhan dan konteks komunitas tertentu. Tujuan utama dari setiap pendekatan adalah memungkinkan komunitas untuk mengambil alih nasib mereka sendiri, meningkatkan kualitas hidup mereka, dan berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam buku ini disajikan sejumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan kemitraan. Pendekatan kemitraan dalam pemberdayaan masyarakat memiliki beberapa keunggulan yang membuatnya menjadi pendekatan yang efektif dalam mencapai tujuan pemberdayaan. Berikut adalah beberapa keunggulan dari pendekatan kemitraan:

1. Akses ke Sumber Daya Tambahan: Dalam kerangka kemitraan, berbagai pihak, seperti organisasi pemerintah, LSM, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta, dapat berkontribusi dengan sumber daya tambahan. Hal ini mencakup sumber daya finansial, teknis, dan sumber daya manusia, yang dapat memperkuat program pemberdayaan.
2. Peningkatan Diversifikasi Sumber Daya: Kemitraan memungkinkan program pemberdayaan untuk mengakses berbagai sumber daya yang mungkin tidak tersedia jika program hanya mengandalkan satu lembaga atau pihak. Diversifikasi sumber daya ini dapat membuat program lebih tahan terhadap perubahan kondisi atau pemotongan anggaran.
3. Pendukung Teknis dan Ahli: Melalui kemitraan, program pemberdayaan dapat mengakses keahlian dan pengetahuan dari berbagai pihak, termasuk ahli di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, dan lainnya. Ini dapat memperkaya program dengan wawasan yang berbeda.
4. Peningkatan Kapasitas: Kemitraan memberikan kesempatan untuk saling belajar dan memperkuat kapasitas semua pihak yang terlibat. Ini berarti

bahwa komunitas penerima manfaat, mitra, dan organisasi terlibat dapat tumbuh dan berkembang bersama-sama.

5. Perluasan Jaringan: Kemitraan membuka pintu untuk memperluas jaringan komunikasi dan kerjasama. Ini dapat membantu dalam membangun hubungan dengan organisasi lain, serta meningkatkan visibilitas program pemberdayaan.
6. Solusi yang Lebih Holistik: Dengan berbagai pihak yang terlibat, program pemberdayaan dapat merancang solusi yang lebih holistik untuk masalah-masalah yang kompleks. Pendekatan yang beragam dapat menghasilkan berbagai sudut pandang yang berbeda untuk pemecahan masalah.
7. Legitimasi dan Kredibilitas: Kemitraan dengan organisasi yang sudah memiliki legitimasi dan kredibilitas dalam mata publik dapat memberikan program pemberdayaan dengan legitimasi tambahan dalam pandangan masyarakat dan pemangku kepentingan.
8. Pengurangan Duplikasi: Melalui kemitraan, organisasi dapat menghindari duplikasi upaya dan bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang sama. Ini dapat menghemat sumber daya dan mengoptimalkan efisiensi.
9. Dukungan Politik: Kemitraan dengan pemerintah atau institusi lain dapat memberikan dukungan politik yang penting, yang dapat membantu program pemberdayaan dalam mengatasi hambatan kebijakan atau politik.

Pendekatan kemitraan, ketika dikelola dengan baik, dapat membawa manfaat besar dalam program pemberdayaan masyarakat dengan memperkaya sumber daya, pengetahuan, dan jaringan yang tersedia. Keunggulan-keunggulan ini memungkinkan program untuk lebih efektif dan berkelanjutan dalam mencapai tujuan pemberdayaan komunitas

C. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring adalah proses mengumpulkan dan menyajikan informasi yang berkaitan dengan pencapaian tujuan spesifik secara sistematis. monitor sebagai menyediakan aktivitas terus menerus untuk melacak kemajuan pelaksanaan program apakah telah sesuai dengan perencanaan. Tujuan dilakukannya monitoring adalah untuk memberikan pengawasan reguler

mengenai pelaksanaan program dalam kaitannya dengan penerimaan input, penjadwalan tugas, hasil yang akan dicapai, dll. Sedangkan, evaluasi adalah suatu proses untuk memberikan informasi tentang seberapa jauh suatu tugas atau kegiatan tertentu telah diselesaikan, bagaimana pencapaian itu berbeda dengan suatu standar tertentu, dan bagaimana pencapaian itu memberikan manfaat jika dibandingkan dengan harapan yang diharapkan (Mustofa, 2012)

Monitoring dan evaluasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah dua proses yang berbeda, tetapi saling terkait, yang digunakan untuk mengukur dan memahami dampak serta kemajuan program pemberdayaan. Berikut penjelasan singkat tentang keduanya:

1. Monitoring (Pemantauan):

- Tujuan Utama: Monitoring adalah proses pengumpulan data dan informasi secara berkala selama pelaksanaan program pemberdayaan. Tujuannya adalah untuk melacak kemajuan, penggunaan sumber daya, dan implementasi program.
- Kegiatan: Ini melibatkan pemantauan indikator kinerja yang telah ditetapkan, termasuk pengukuran kegiatan yang sudah dilakukan dan hasil yang telah dicapai.
- Manfaat: Monitoring membantu dalam menjaga program agar tetap berada dalam jalur yang benar, mengidentifikasi masalah atau hambatan yang mungkin muncul selama pelaksanaan, dan memungkinkan perbaikan segera jika diperlukan.

2. Evaluasi:

- Tujuan Utama: Evaluasi adalah proses yang lebih mendalam dan terstruktur yang dilakukan setelah program pemberdayaan selesai atau mencapai titik tertentu dalam pelaksanaannya. Tujuannya adalah untuk menilai sejauh mana program telah mencapai tujuan dan dampak yang diinginkan.
- Kegiatan: Evaluasi melibatkan analisis menyeluruh terhadap seluruh program, termasuk pengumpulan data, analisis, dan perbandingan hasil dengan tujuan awal program.
- Manfaat: Evaluasi membantu dalam mengevaluasi keberhasilan program, menentukan pembelajaran yang dapat diterapkan di masa

depan, dan memutuskan apakah program perlu diteruskan, diubah, atau dihentikan.

Perbedaan utama antara monitoring dan evaluasi adalah waktu pelaksanaannya dan tingkat kedalaman analisis. Monitoring dilakukan sepanjang program berjalan untuk mengikuti perkembangan harian atau bulanan, sementara evaluasi dilakukan secara lebih menyeluruh setelah program selesai atau mencapai titik tertentu.

Kedua proses ini penting dalam memastikan program pemberdayaan masyarakat efektif dan berkelanjutan. Monitoring memungkinkan kita untuk membuat perbaikan berkelanjutan sepanjang perjalanan, sementara evaluasi memberikan gambaran besar tentang dampak program secara keseluruhan. Kombinasi keduanya membantu dalam memastikan bahwa program memberikan manfaat yang maksimal bagi komunitas yang dilayani.

Monitoring dan evaluasi sangat penting dalam konteks pemberdayaan masyarakat karena mereka memberikan manfaat yang krusial dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian program-program pemberdayaan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa monitoring dan evaluasi penting dalam pemberdayaan masyarakat:

1. Mengukur Dampak dan Keberhasilan: Monitoring dan evaluasi membantu dalam mengukur sejauh mana program pemberdayaan mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Hal ini memungkinkan untuk menilai keberhasilan program secara objektif.
2. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas: Monitoring dan evaluasi menciptakan tingkat transparansi dan akuntabilitas yang tinggi dalam penggunaan dana dan sumber daya. Ini membantu menghindari penyalahgunaan sumber daya dan menunjukkan bahwa program beroperasi dengan baik.
3. Perbaikan Berkelanjutan: Monitoring memungkinkan pengidentifikasian masalah sejak dini selama pelaksanaan program. Hal ini memungkinkan untuk membuat perbaikan dan perubahan segera jika diperlukan, sehingga program dapat berjalan lebih efisien.
4. Pembelajaran dan Inovasi: Evaluasi membantu dalam mengidentifikasi pelajaran yang bisa dipetik dari program yang telah berjalan. Ini membantu dalam meningkatkan desain program di masa depan dan memungkinkan inovasi.

5. Mengukur Keberlanjutan: Monitoring dan evaluasi membantu dalam mengevaluasi apakah dampak program dapat berlanjut setelah dana program habis. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pemberdayaan adalah berkelanjutan.
6. Partisipasi Komunitas: Melalui monitoring dan evaluasi, komunitas dapat terlibat dalam menilai dampak program dan memberikan masukan yang berharga. Hal ini meningkatkan partisipasi dan keterlibatan mereka dalam program.
7. Pengambilan Keputusan yang Berbasis Bukti: Hasil dari monitoring dan evaluasi memberikan bukti yang kuat untuk mendukung pengambilan keputusan. Ini membantu pemangku kepentingan dalam membuat keputusan yang lebih baik dalam mengalokasikan sumber daya dan merancang program-program yang lebih baik.
8. Pemantauan Isu-isu Tidak Terduga: Monitoring dan evaluasi dapat membantu dalam mengidentifikasi isu-isu yang muncul secara tiba-tiba selama pelaksanaan program, seperti konflik atau perubahan kebijakan, sehingga langkah-langkah yang tepat dapat diambil.
9. Menjaga Fokus pada Hasil: Monitoring dan evaluasi membantu dalam menjaga fokus pada hasil yang diinginkan. Ini mencegah pemborosan sumber daya pada kegiatan yang tidak relevan.
10. Menunjukkan Pertanggungjawaban: Monitoring dan evaluasi mendukung pertanggungjawaban terhadap pendana dan pemangku kepentingan lainnya. Ini menciptakan kepercayaan dalam program pemberdayaan.

Monitoring dan evaluasi adalah alat yang sangat penting dalam mengelola program pemberdayaan masyarakat dengan baik. Mereka memungkinkan pemantauan yang cermat, evaluasi berdasarkan bukti, dan perbaikan berkelanjutan dalam upaya pemberdayaan.

D. FAKTOR-FAKTOR YANG MENGHAMBAT PEMBERDAYAAN

Kegagalan dalam program pemberdayaan masyarakat bisa disebabkan oleh berbagai faktor yang kompleks. Beberapa alasan umum mengapa program pemberdayaan masyarakat dapat gagal meliputi:

1. Kurangnya Partisipasi Aktif Komunitas: Keberhasilan pemberdayaan sangat tergantung pada partisipasi aktif komunitas. Jika komunitas tidak terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengambilan keputusan, program cenderung gagal.
2. Kurangnya Sumber Daya: Kegagalan dapat terjadi jika program kekurangan sumber daya, baik finansial maupun manusia. Tanpa dukungan yang cukup, program mungkin tidak dapat mencapai tujuannya.
3. Tidak Memahami Masalah Komunitas: Program yang tidak memahami dengan baik masalah yang dihadapi oleh komunitas atau tidak melakukan analisis yang cukup mendalam mungkin tidak mampu menyajikan solusi yang relevan.
4. Kekurangan Dukungan Pemerintah: Dukungan pemerintah, baik dalam bentuk kebijakan atau bantuan finansial, seringkali penting untuk keberlanjutan program. Jika pemerintah tidak mendukung program tersebut, kegagalan dapat terjadi.
5. Kurangnya Evaluasi dan Pembelajaran: Program yang tidak melakukan pemantauan dan evaluasi yang berkala mungkin tidak dapat mengidentifikasi masalah atau perubahan yang diperlukan selama pelaksanaan.
6. Perubahan Konteks atau Kebijakan: Faktor-faktor eksternal seperti perubahan politik atau kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi keberlanjutan program pemberdayaan.
7. Kurangnya Keberlanjutan: Program yang tidak dirancang dengan fokus pada keberlanjutan jangka panjang mungkin berhenti setelah dana program habis, menyebabkan hilangnya dampak positif.
8. Ketidaksetaraan Gender dan Diskriminasi: Ketidaksetaraan gender dan diskriminasi dapat menghambat pemberdayaan, terutama dalam hal partisipasi perempuan. Ini dapat menyebabkan ketidakadilan dalam program.
9. Konflik dan Ketidakstabilan: Daerah yang terkena konflik atau ketidakstabilan politik dapat membuat pelaksanaan program pemberdayaan sulit atau bahkan berbahaya.
10. Kurangnya Kepemimpinan yang Efektif: Kepemimpinan yang kurang efektif dalam tim program atau dalam komunitas sendiri dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakjelasan dalam pelaksanaan.

11. Tidak Mengakomodasi Perbedaan Budaya: Tidak memahami atau menghormati perbedaan budaya dan nilai-nilai dalam komunitas dapat menyebabkan ketidakberhasilan program.

Pada sejumlah kegiatan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam skala kecil maka seringkali terjadi kegagalan dalam pemberdayaan masyarakat dikarenakan:

1. Pelaksana kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak melakukan observasi awal atau analisis situasi terlebih dahulu sehingga kondisi riil calon mitra tidak teridentifikasi dengan baik.
2. Tema pelatihan/penyuluhan tidak disosialisasikan terlebih dahulu dengan mitra, sehingga terkadang tidak terjadi koordinasi waktu dan tempat dengan baik.
3. Materi yang diajarkan atau diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan mitra
4. Kurangnya partisipasi mitra pada setiap tahapan pelatihan dan atau pendampingan yang dilakukan pelaksana.
5. Penyajian materi yang tidak menarik minat para peserta dan suasana tempat pelatihan/penyuluhan kurang kondusif.

Hambatan yang juga paling sering ditemui dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat (Reskiaddin et al., 2020) adalah :

1. Minimnya data terkait fokus dari pemberdayaan, misalnya data kesehatan di Posyandu jika fokus kegiatan pemberdayaan terkait tentang kesehatan masyarakat.
2. Adanya intervensi dari pihak lain dimana terkadang terjadi proses perbandingan antara kegiatan yang akan dilaksanakan dengan kegiatan yang telah dilaksanakan.
3. Sejumlah stakeholders terkadang menginginkan program kegiatan pemberdayaan yang sama dengan sebelumnya

Kegagalan program pemberdayaan masyarakat bisa terjadi akibat satu atau lebih dari faktor-faktor ini. Oleh karena itu, sangat penting untuk merancang program dengan cermat, melibatkan komunitas, melakukan pemantauan dan evaluasi yang berkala, dan memiliki kemampuan untuk

beradaptasi dengan perubahan kondisi dan kebijakan. Kesalahan dan kegagalan juga harus dijadikan pelajaran untuk perbaikan di masa depan

E. CARA MENGATASI TANTANGAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Mengatasi tantangan dalam pemberdayaan masyarakat adalah langkah penting dalam memajukan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah beberapa cara untuk menghadapi tantangan tersebut:

1. **Edukasi dan Kesadaran:** Penting untuk memberikan pendidikan dan kesadaran kepada masyarakat tentang peran mereka dalam pemberdayaan. Ini melibatkan pelatihan, seminar, dan kampanye pendidikan untuk meningkatkan pemahaman mereka.
2. **Kolaborasi:** Kerja sama antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta sangat penting. Mereka dapat bekerja bersama untuk menggabungkan sumber daya dan pengalaman mereka guna mencapai hasil yang lebih baik.
3. **Partisipasi Masyarakat:** Masyarakat harus terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Ini dapat dilakukan melalui konsultasi, forum masyarakat, atau program partisipatif.
4. **Pendekatan Berkelanjutan:** Pemberdayaan masyarakat bukanlah proses yang cepat. Tantangan ini dapat diatasi dengan pendekatan berkelanjutan yang melibatkan perencanaan jangka panjang dan komitmen yang kuat.
5. **Sumber Daya Finansial:** Tantangan dalam pemberdayaan masyarakat termasuk keterbatasan sumber daya finansial. Oleh karena itu, perlu mencari sumber dana yang berkelanjutan dan efisien.
6. **Teknologi dan Inovasi:** Pemanfaatan teknologi dan inovasi dapat membantu memecahkan masalah yang kompleks dalam pemberdayaan masyarakat. Misalnya, teknologi informasi dapat digunakan untuk meningkatkan akses informasi dan peluang bisnis.
7. **Pengembangan Keterampilan:** Memberdayakan masyarakat melibatkan pengembangan keterampilan yang relevan. Pelatihan dan pendidikan keterampilan dapat membantu masyarakat menjadi lebih mandiri.

8. Evaluasi dan Monitoring: Penting untuk terus memantau dan mengevaluasi program pemberdayaan untuk mengukur dampaknya dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.
9. Keberagaman Budaya dan Konteks: Memahami keberagaman budaya dan konteks sosial adalah kunci dalam mengatasi tantangan dalam pemberdayaan masyarakat. Pendekatan yang sesuai harus disesuaikan dengan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat yang beragam.
10. Keberlanjutan Lingkungan: Pemberdayaan masyarakat juga harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Upaya yang merusak lingkungan dapat berdampak negatif pada jangka panjang.

Pemberdayaan masyarakat adalah proses yang berkelanjutan, dan mengatasi tantangan dalam proses ini memerlukan kesabaran, kerja sama, dan komitmen dari berbagai pihak yang terlibat.



PELATIHAN DIVERSIFIKASI PRODUK DAN PEMASARAN DIGITAL BAGI KELOMPOK PENGRAJIN ANYAMAN BAMBU DI DESA SAWAKONG

A. PENDAHULUAN

Para pengrajin anyaman bambu di Desa Sawakong, Galesong Selatan, Kabupaten Takalar telah lama mengabdikan diri pada produksi kerajinan tangan yang dibuat dari bambu, karena keterampilan ini telah diwariskan dari generasi ke generasi. Kelompok ini, yang dikenal sebagai "Sinar Sawakong," terdiri dari 20 anggota yang aktif, terutama terdiri dari anak perempuan yang telah putus sekolah dan ibu rumah tangga. Kegiatan ini memberikan peluang bisnis yang berpotensi di pedesaan melalui upaya pemberdayaan ekonomi sebagai bentuk gerakan sosial (Y. Tanjung, Saputra, & Hardiyanto, 2021)

Namun, hasil observasi menunjukkan bahwa usaha kerajinan bambu ini menghadapi kesulitan dalam perkembangan dan memberikan penghidupan yang layak bagi para pengrajin. Hal ini terutama karena pengelolaan usaha yang belum profesional, dengan produksi yang terbatas pada satu model tirai bambu selama bertahun-tahun. Untuk mengatasi tantangan ini, dibutuhkan inovasi produk yang dapat bersaing dengan produk sejenis yang berkembang pesat. Dengan beragamnya jenis produk, pengrajin akan lebih mudah

memasarkannya, yang pada gilirannya akan meningkatkan perputaran produksi.

Untuk mencapai tujuan ini, dilakukan pelatihan diversifikasi produk yang mencakup pembuatan tudung saji bulat dan bakul nasi dalam berbagai ukuran. Dua model produk ini dipilih karena memiliki potensi nilai jual tinggi, baik untuk diunggah di platform e-commerce maupun untuk ditawarkan ke restoran dan rumah makan di sekitar Kabupaten Gowa dan Kota Makassar. Sebagai komitmen untuk mendukung program diversifikasi produk, telah disusun booklet panduan yang berisi teknik pembuatan berbagai produk anyaman bambu. Panduan ini diharapkan akan menjadi pedoman bagi anggota kelompok pengrajin "Sinar Sawakong" untuk mempelajari dan menciptakan model-model anyaman baru, yang kemudian dapat diunggah ke toko online mereka.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengembangan usaha melalui diversifikasi produk sangat penting. Anggota kelompok pengrajin berharap dapat terlibat dalam kegiatan lanjutan, seperti pemasaran dan keuangan (Sumarno, Gimin, Mujiono, & Pernantah, 2020). Hal ini sejalan dengan gagasan bahwa pelatihan produk inovatif adalah upaya untuk memberikan pelatihan tentang produk kerajinan baru dan inovatif agar produk kelompok pengrajin yang menjadi mitra dapat bervariasi dan bersaing dengan kelompok pengrajin lain yang menggunakan bahan baku yang sama (Haerana, Tahir, Fatmawada, & Harakan, 2022). Namun, tantangan pemasaran tetap menjadi kendala, karena produk hanya dijual di desa sekitar, yang menghambat produksi dan mengurangi penghasilan pengrajin.

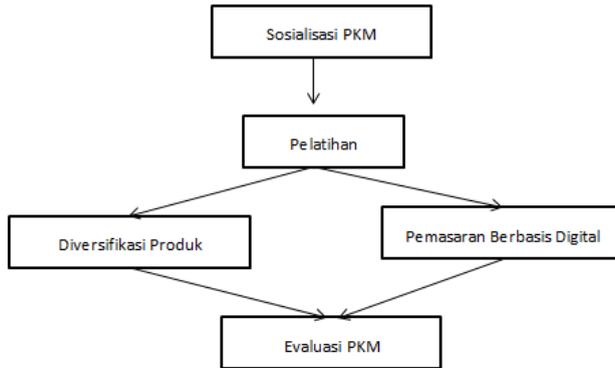
Pemasaran online, yang mencakup media sosial, website, dan iklan berbayar, menjadi solusi untuk meningkatkan jangkauan dan promosi produk (Mukti & Ahmadi, 2022). Media sosial adalah alternatif pemasaran yang efektif karena mudah, cepat, dan memiliki jangkauan luas melalui internet (Nugrahaningsih et al., 2021) Melalui pelatihan, penggunaan media sosial seperti Facebook, Instagram, Pinterest, dan WhatsApp serta penjualan online di platform seperti Shopee dan Tokopedia dapat ditingkatkan (Agusintadewi, Muktiwibowo, Manik, Pebriyanti, & Wiryawan, 2022), Keberadaan Media sosial yang terhubung dengan internet menjadi salah satu solusi pemasaran yang sangat memudahkan penjual dan cakupan yang tak terbatas (Hendri & Yulinda, 2019).

Heri dkk (2015) dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengrajin anyaman bambu di Desa Sawakong, Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar kesulitan dalam permodalan dan juga mereka tidak pernah mendapatkan pendidikan dan pelatihan dalam memvariasikan produknya serta bidang pemasaran yang belum optimal dilaksanakan (Heri, Mappamiring, & Mahsyar, 2015). Peningkatan pengetahuan tentang pemasaran online adalah upaya bagi pelaku usaha dalam menangkap peluang penjualan yang lebih besar sebab tidak ada batasan ruang dan waktu (Rahayu, Muhairah, & Nazipawati, 2021). Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memiliki proporsi sebesar 99,99% dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia atau sebanyak 64,1 juta unit (Satria & Nofiansyah, 2021). tetapi perkembangan mereka terhambat, terutama karena dampak pandemi COVID-19. Oleh karena itu, pendampingan dan pelatihan dalam inovasi produk dan pemasaran digital menjadi langkah kunci untuk mengatasi tantangan ini dan mendorong pertumbuhan sektor UMKM

B. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dimulai dengan tahap persiapan, yang melibatkan sosialisasi kepada mitra. Kemudian, pada tahap berikutnya, dilakukan pelaksanaan Program Kemitraan Masyarakat (PKM) yang mencakup penyuluhan dan pelatihan dalam dua aspek utama. Aspek pertama adalah diversifikasi produk, yang difokuskan pada peningkatan keterampilan dalam teknik menganyam untuk menciptakan berbagai model produk anyaman bambu. Sedangkan pada aspek kedua, yaitu pemasaran berbasis digital, peserta diberikan pengetahuan tentang e-commerce dan dilatih dalam pembuatan toko online. Terakhir, tahap evaluasi dilakukan dengan mendistribusikan kuesioner sebelum pelaksanaan PKM (pre test) dan juga setelah PKM selesai (post test) untuk mengukur dampak dan efektivitas kegiatan

Rangkaian tahapan kegiatan pelaksanaan PKM adalah sebagai berikut:



C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan kelompok pengrajin bambu dilakukan di Desa Sawakong, Kabupaten Takalar, pada tanggal 29 dan 30 Juli 2023. Kegiatan ini diikuti oleh 39 peserta dengan rincian sebagai berikut: 20 anggota kelompok pengrajin, 3 dosen, 4 mahasiswa, 11 warga masyarakat, dan 1 narasumber yang secara khusus diundang untuk memberikan pelatihan dalam aspek diversifikasi produk. Dalam program pemberdayaan ini, terdapat dua materi utama yang disajikan, yaitu pemasaran produk berbasis digital dan diversifikasi produk. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai kegiatan ini:

1. Diversifikasi Produk

Peserta sangat antusias saat mengikuti pelatihan diversifikasi produk karena ini merupakan hal yang relatif baru di desa mereka, dengan target jenis produk yang akan diajarkan 2 jenis yaitu bakul nasi, besek hampers.



Gambar 5.1. Pelatihan Teknik Penganyaman

Sasaran utama dari diversifikasi produk adalah meningkatkan penjualan dan sekaligus menjadi bagian dari upaya perbaikan kualitas produk. Kegiatan diversifikasi produk ini bertujuan untuk memacu kreativitas pengrajin dan menciptakan daya tarik bagi calon pembeli (Khairani & Pratiwi, 2018). Dalam dunia pemasaran, langkah pertama yang harus dilakukan oleh penjual adalah memperkenalkan produk kepada pelanggan. Dengan desain produk yang menarik, penjual dapat lebih mudah memengaruhi pembeli untuk melakukan pembelian pertama. Selanjutnya, apakah pembeli akan melakukan pembelian berulang sangat tergantung pada kualitas produk.

Anyaman bambu dari desa Sawakong, khususnya produk tirai bambu, sudah sangat terkenal karena menggunakan bahan dasar bambu yang berkualitas. Dengan adanya program diversifikasi produk, kami juga berusaha mengurangi pemborosan potongan bambu dari sisa anyaman tirai, karena model produk anyaman yang kami ajarkan hanya memerlukan potongan kecil. Sebagai hasil dari pelatihan diversifikasi produk ini, pengrajin telah mempelajari dua model produk kerajinan anyaman seperti berikut:



Model 1
Bakul Nasi

Model 2
Besek Hampers

Sebagai bukti komitmen dari tim pelaksana PKM, untuk menjaga kelangsungan proses diversifikasi produk di masa depan, kami telah berhasil menyusun buku panduan yang berisi teknik menganyam bambu untuk berbagai model kerajinan. Buku panduan ini tersedia dalam bentuk online dengan tautan yang dapat diakses melalui internet: <https://anyflip.com/xcohd/qnhh/>.



Gambar 5.2. Booklet Penganyaman Bambu

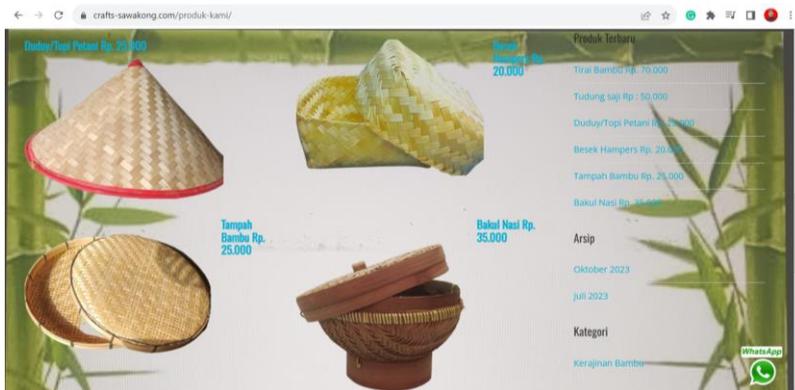
2. Pemasaran digital

Digital Marketing adalah istilah umum untuk pemasaran barang atau jasa yang ditargetkan, terukur, dan interaktif dengan menggunakan teknologi digital. Tujuan utama dari digital marketing adalah untuk mempromosikan merek, membentuk preferensi dan meningkatkan traffic penjualan melalui beberapa teknik pemasaran digital

Kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) telah memicu pergeseran dari metode pemasaran yang sebelumnya sepenuhnya offline menuju pemasaran berbasis digital. Saat ini, sejumlah UMKM memanfaatkan media sosial untuk menjual produk mereka. Metode manual, yang memiliki risiko kesalahan dan keterbatasan aksesibilitas informasi, dapat diatasi dengan menerapkan pendekatan yang terintegrasi dan digital (Baskoro, Maipita, Fitriawaty, & Dongoran, 2023).

Untuk meningkatkan pemahaman peserta, upaya dilakukan dengan memberikan penyuluhan tentang pentingnya pemasaran online. Pemasaran berbasis digital dapat dijalankan melalui website, baik yang menggunakan domain berbayar maupun yang gratis, dan pelaksana PKM juga memberikan pelatihan pembuatan website secara gratis melalui tautan yang telah disediakan: <https://sites.google.com/>, dengan hasil website berikut : <https://sites.google.com/view/craft-sawakong/home?authuser=0> . Pelatihan pembuatan dan pengaturan website ini mudah dipahami peserta karena fitur-fiturnya sederhana. Selain itu, juga ada pelatihan pembuatan website dengan domain berbayar, dan setelah pelatihan selesai, telah berhasil dipublikasikan website toko online mitra, dengan link: <https://crafts-sawakong.com/>, Diharapkan bahwa website ini akan berfungsi sebagai saluran penjualan

online dan juga sebagai alat promosi untuk meningkatkan visibilitas kelompok pengrajin bambu di Desa Sawakong di kalangan pihak luar. UMKM perlu mengimplementasikan strategi pemasaran yang efektif guna meningkatkan minat konsumen terhadap produk mereka dan meningkatkan volume penjualan (Rizki Indrawan, 2023).



Gambar 5.4. Website mitra

Setelah proses pembuatan website toko online selesai, pemateri memberikan panduan tentang cara mengunggah foto-foto produk yang dimiliki mitra. Dengan demikian, setelah foto-foto tersebut dipublikasikan, mitra akan memiliki website yang siap digunakan sebagai alat pemasaran produk mereka.



Gambar 5.5. Pelatihan Pemasaran Berbasis Website

Apabila pemasaran dilakukan secara daring, akan diperlukan seorang pengelola toko online yang memiliki kemampuan digital yang handal. Oleh karena itu, dalam pelatihan pemasaran berbasis digital ini, peserta yang lebih muda dipilih dan dilatih untuk menjadi administrator website.



Gambar 5.6. Melatih Admin. Website Mitra

Pengumpulan data melalui kuesioner kepada peserta kegiatan pemberdayaan masyarakat dilakukan sebelum dan sesudah pelatihan dilaksanakan. Hasil Pre Test dan Post Test tersebut mengindikasikan adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta dalam hal diversifikasi produk dan pemasaran digital (Tabel 1).

Tabel 5.1. Evaluasi Pelaksanaan PKM

Indikator	Pre Test	Post Test
Penguasaan teknik menganyam atas sejumlah model	100 % peserta hanya mengetahui 1 jenis model teknik menganyam	80 % peserta mengetahui 4 model dan 20 % peserta yang hanya mengetahui 3 model
Pengetahuan tentang sejumlah e-commerce	100 % peserta belum mengetahui tentang bentuk e-commerce	85 % sudah mengetahui dan 15 % belum mengetahui tentang bentuk e-commerce
Pengetahuan tentang pembuatan website toko online	100 % peserta tidak mengetahui tentang pembuatan website toko online	80 % peserta mengetahui dan 20 % tidak mengetahui tentang pembuatan website toko online

Pengetahuan tentang pengelolaan toko online	100 % peserta tidak mengetahui tentang pengelolaan toko online	80 % peserta sudah mengetahui dan 20 % lainnya tidak mengetahui tentang pengelolaan toko online
Kepemilikan atas buku panduan teknik menganyam sejumlah model	100 % peserta tidak memiliki buku panduan menganyam	100 % peserta sudah memiliki booklet panduan menganyam sejumlah model

Kemampuan teknik menganyam berbagai model anyaman mengalami perkembangan yang signifikan, dengan awalnya hanya menguasai satu model saja. Setelah pelatihan, sekitar 80% peserta telah memperoleh pengetahuan tentang tiga model produk anyaman bambu yang berbeda. Kemajuan ini berpotensi untuk terus meningkat karena pelaksana PKM telah menyusun panduan teknik menganyam untuk berbagai model anyaman bambu dalam bentuk booklet yang telah diserahkan kepada mitra. Di sisi pemasaran, pengetahuan peserta meningkat, dengan rata-rata peningkatan sekitar 82% dalam tiga indikator penilaian.

Kesuksesan PKM ini tidak terlepas dari dukungan yang diberikan oleh pemerintah desa setempat, dan terutama dukungan yang sangat positif dari ketua kelompok pengrajin bambu desa Sawakong. Ketua kelompok pengrajin sangat mengapresiasi pelaksana PKM karena materi yang disampaikan telah dinantikan sejak lama, dan ini merupakan bagian dari upaya kelompok pengrajin untuk tetap relevan dalam persaingan UMKM saat ini. Adanya beberapa peserta yang tidak membawa perangkat berbasis Android atau laptop menjadi salah satu kendala dalam kegiatan ini, mengingat pelatihan pemasaran berbasis digital memerlukan fasilitas tersebut.



PELATIHAN PEMBUKUAN KEUANGAN DAN PEMASARAN ONLINE BAGI PENGRAJIN DAUN LONTAR DI DESA TINDANG, KABUPATEN GOWA, SULAWESI SELATAN

A. PENDAHULUAN

Peningkatan penghasilan masyarakat pedesaan merupakan sebuah isu yang layak mendapatkan perhatian baik dari pemerintah maupun sektor swasta. Namun, sayangnya, seringkali program-program pemberdayaan ekonomi di beberapa daerah terpencil kurang melibatkan kelompok-kelompok yang bergerak di bidang usaha kecil, terutama di Desa Tindang, Kabupaten Gowa. Mayoritas penduduk di desa ini adalah petani, sehingga penyuluhan dan program pemberdayaan ekonomi cenderung difokuskan pada kelompok tani saja. Namun, selama bertahun-tahun, beberapa kelompok keluarga, yang sebagian besar terdiri dari perempuan, telah aktif dalam usaha kecil pembuatan kerajinan tangan dari daun lontar. Dua di antaranya adalah kelompok pengrajin daun lontar "Seruni" dan kelompok pengrajin daun lontar "Tulip"

Dampak dari tidak pernahnya diselenggarakan pelatihan dan pengembangan usaha kerajinan daun lontar yang ditekuni masyarakat di Desa Tindang tersebut sehingga produk yang diproduksi dari dulu hingga saat ini hanya satu jenis produk saja yaitu tudung kue/makanan dan variasinya

hanya terlihat dari ukurannya saja yang berbeda yaitu kecil, sedang dan besar. Permasalahan lainnya yang dihadapi oleh kelompok pengrajin daun lontar selanjutnya adalah sistem pengelolaannya atau manajemen usahanya yang belum dikelola secara profesional.

Kedua kelompok usaha kecil ini mengalami beberapa kendala antara lain: permodalan, kreativitas dalam inovasi produk dan pemasaran. Dalam hal permodalan, kedua kelompok ini masih terkendala modal, hal ini dapat terlihat dari ketidakmampuan kedua kelompok pengrajin untuk memproduksi dalam jumlah besar, dan karena keterbatasan modal itulah maka produksi kedua kelompok pengrajin tersebut hanya dilakukan apabila ada orang/pihak yang memesan produknya saja.

Kerajinan daun lontar di Desa Tindang hanya berupa satu jenis produk saja sehingga hal tersebut membatasi ruang pemasarannya. Untuk itu diperlukan inovasi produk yang mampu bersaing di tengah perkembangan kreatifitas produk sejenis yang tumbuh dengan cepat. Dengan jenis produk yang variatif maka akan memudahkan pengrajin dalam memasarkannya dan hal tersebut akan berdampak baik pada peningkatan penghasilan pengrajin.

Masalah terbesar selanjutnya kelompok pengrajin daun lontar tersebut adalah dari segi pemasaran. Sebuah produk dalam suatu usaha kerajinan akan bertahan lama dan menjanjikan penghasilan terbaik apabila didukung oleh sistem pemasaran yang dikelola dengan baik pula. Tetapi sistem pemasaran yang dijalankan bagi kedua kelompok pengrajin daun lontar tersebut hanya menunggu bola, yang artinya bahwa kedua kelompok kerajinan hanya menunggu pesanan. Dan jika tidak ada yang memesan maka proses produksi dihentikan.



Gambar 6.1. Proses Produksi

Kerajinan daun lontar memiliki nilai budaya yang tinggi, terutama dalam konteks budaya Bugis-Makassar. Ini berarti bahwa dengan menjaga kelangsungan produksi kerajinan ini setiap tahunnya, kita juga ikut serta dalam melestarikan budaya masyarakat Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan. Produk kerajinan seperti tudung makanan/kue, yang dikenal sebagai "Bosara," memiliki nilai seni yang tinggi sebagai peralatan dalam upacara perjamuan. Program Kemitraan Masyarakat (PKM) ini bertujuan menciptakan inovasi produk agar kerajinan daun lontar dapat dipasarkan secara nasional dan internasional. Istilah "kemitraan" berasal dari kata "partnership," yang berarti kerjasama. Dalam konteks ini, kemitraan diartikan sebagai kolaborasi atau kerjasama. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1997 tentang kemitraan menyatakan bahwa untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional yang kuat, diperlukan upaya nyata untuk membentuk kemitraan usaha yang solid di antara semua pemangku kepentingan ekonomi, berdasarkan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

Semua tantangan yang dihadapi oleh kedua mitra tersebut di atas akan berusaha untuk diatasi dalam Program Kemitraan Masyarakat (PKM) ini. Namun, karena terbatasnya sumber daya finansial dan waktu, pelaksana PKM akan memusatkan perhatian pada pelatihan dalam bidang pembukuan keuangan dan pemasaran. Kemitraan adalah kolaborasi antara individu untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.

B. METODE PELAKSANAAN

Secara umum pelatihan mencakup tiga tahapan yakni kebutuhan pelatihan, pelaksanaan pelatihan dan yang terakhir adalah tahapan evaluasi kegiatan (Kurniadi, 2007). Rancangan PKM ini diberlakukan sebagai langkah dalam memberdayakan komunitas perajin daun lontar melalui rangkaian pelatihan kewirausahaan yang menekankan pada pengembangan usaha. Cara pelaksanaan program ini melibatkan: (1) Pelatihan pembukuan keuangan; (2) pelatihan pemasaran; serta (3) pendampingan. Ke semua metode ini terintegrasi sebagai satu kesatuan yang kokoh. Dalam pelatihan, pendekatan yang digunakan meliputi role play, observasi, diskusi, dan brainstorming.

Dalam pelaksanaannya, partisipasi aktif dari para peserta menjadi unsur krusial. (Saripuddin, 2021). Metode pemberdayaan yang paling banyak digunakan adalah teknik Edukasi dan pelatihan (Saputro & Hastomo, 2020).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pelaksanaan Kegiatan

Program Kemitraan Masyarakat ini diadakan dalam upaya menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh mitra kami. Untuk mendukung usaha penyelesaian masalah ini, kami akan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan berikut:

1. Pelatihan Pembukuan Keuangan: Fokus dari pelatihan ini adalah menyusun kembali proses pembukuan keuangan para mitra yang selama ini belum tertata dengan baik.
2. Pelatihan Pembuatan Website dan Pemasangan Iklan Online (Pemasaran): Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan keterampilan kepada mitra dalam pembuatan website atau blogspot.

Hal ini akan membantu mereka memperkenalkan produk-produk mereka kepada khalayak yang lebih luas. Kami percaya bahwa kemajuan informasi dan teknologi melalui internet adalah salah satu sarana terbaik untuk meningkatkan volume penjualan produk yang dihasilkan oleh mitra kami.

b. Pembahasan

Pada acara pelatihan tersebut, kami memiliki 14 peserta yang hadir dengan penuh semangat. Mereka terlihat sangat antusias mengikuti pelatihan ini. Hal ini dapat dimengerti karena kegiatan ini berbasis web, dan ini merupakan pengalaman pertama bagi mereka dalam menghadapi materi yang berhubungan dengan internet di daerah mereka.

Pelatihan Pembukuan

Banyak pelaku usaha mengalami kegagalan dalam menjaga kelangsungan usaha mereka, dan salah satu penyebab utamanya adalah kurangnya kemampuan dalam mengelola pembukuan keuangan. Terkadang, para pengusaha cenderung hanya fokus pada tahap pembelian dan pemasokan produk yang akan dijual, tanpa memberikan perhatian yang memadai pada

arus keuangan sepanjang proses pengadaan bahan baku, biaya produksi, gaji karyawan, dan pengelolaan pendapatan dari penjualan produk. Dalam kerangka yang lebih sederhana, pembukuan keuangan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. *Buku Arus Kas atau buku kas*

Dalam catatan ini, kita mencatat setiap uang yang masuk dan keluar secara nyata. Fokus utama catatan ini adalah mencatat uang yang berpindah dari pos mana pun, dan ini merupakan langkah awal yang penting.

2. *Buku Persediaan Barang*

Di buku ini, kita mencatat setiap peningkatan persediaan barang saat kita membeli dari pemasok dan pengurangan saat barang terjual. Ini memberikan gambaran yang jelas tentang perubahan dalam persediaan barang kita.

3. *Buku Pembelian dan Penjualan*

Catatan ini berfokus pada uang yang dikeluarkan untuk pembelian barang, mencatat nilainya secara rinci setiap kali kita membeli dari pemasok. Di sisi lain, catatan ini juga mencatat uang yang masuk sebagai hasil penjualan. Buku ini dapat berfungsi sebagai ringkasan dari buku kas, dengan fokus khusus pada transaksi pembelian dan penjualan. Data dari buku kas harian disatukan di sini. Dengan bantuan buku ini, kita dapat memantau total pembelian dan penjualan (omzet) serta menghitung laba kotor sebelum mengurangkan biaya-biaya.

4. *Catatan Hutang dan Piutang*

Dalam buku ini, kita mencatat hutang yang harus dibayar oleh pelanggan kepada kita dan piutang yang harus kita bayarkan kepada pemasok. Ini penting untuk menjaga kejelasan mengenai jumlah hutang dan piutang yang perlu diperhitungkan, mendukung prinsip keuangan yang sehat.

5. *Catatan Biaya dan Pendapatan Lainnya*

Buku ini berisi catatan tentang berbagai biaya operasional dan pendapatan selain dari hasil penjualan barang atau jasa. Catatan biaya ini mencakup pengeluaran seperti listrik, telepon, dan lain-lain. Selain itu, pendapatan yang tidak berasal dari penjualan barang juga dicatat di sini. Ini membantu dalam penghitungan laba bersih secara akurat.

Melalui pelatihan pembukuan ini, diharapkan para peserta Program Kemitraan Masyarakat akan mampu memahami pentingnya mengelola arus dana dengan baik, termasuk pemisahan dan pengkategorisasian yang tepat. Hal ini akan membantu mereka menyusun laporan keuangan yang rinci, yang pada gilirannya akan memungkinkan mereka untuk dengan jelas mengetahui besarnya keuntungan yang diperoleh. Dengan pengetahuan ini, mereka dapat lebih berfokus pada upaya pengembangan usaha mereka.



Gambar 6.2.
Pelatihan Pembukuan keuangan

Pembukuan keuangan melibatkan proses perencanaan, analisis, dan pengendalian aktivitas keuangan yang berkaitan dengan beragam bidang, seperti yang diuraikan oleh Fahmi (2014). Penting untuk diingat bahwa bahkan bagi usaha kecil, memiliki sistem pembukuan keuangan yang terstruktur adalah suatu keharusan. Mengapa demikian? Karena bahkan dalam skala kecil, manajemen keuangan yang terencana akan memberikan gambaran yang jelas mengenai arus dana, termasuk pemasukan dan pengeluarannya.

Salah satu fungsi utama dari manajemen kas adalah untuk merencanakan, mengalokasikan, dan memaksimalkan penggunaan kas dengan berbagai cara. Dengan melakukan ini, tujuan utamanya adalah meningkatkan laba investasi (ROI) dengan cara meningkatkan kontribusi laba yang berasal dari kas dan mengurangi jumlah investasi yang terkait dengan kas. Tidak hanya itu, manajemen kas yang efektif juga membantu dalam mencapai efisiensi biaya, mengurangi risiko, dan meningkatkan efisiensi operasional, sebagaimana dikemukakan oleh Mulyawan (2017).

Bagi seseorang yang telah memutuskan untuk menjalani peran seorang entrepreneur, penguasaan dalam bidang pembukuan keuangan menjadi kunci. Mengelola keuangan dengan teratur dan cermat memungkinkan pengembangan usaha yang lebih sukses di masa depan. Ini karena pembukuan keuangan tidak hanya berfokus pada pelaporan keuangan, tetapi juga mengarahkan pada pentingnya investasi dana, penelitian pasar yang teliti, dan upaya peningkatan produksi yang efisien.

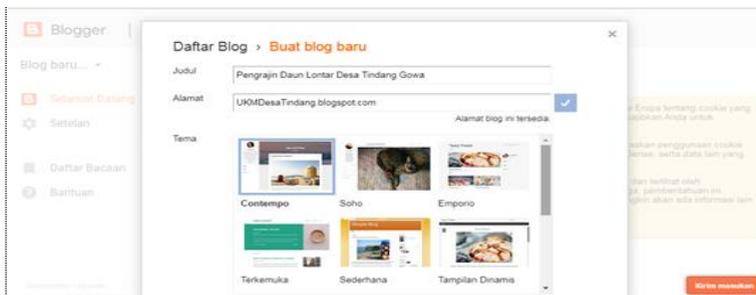
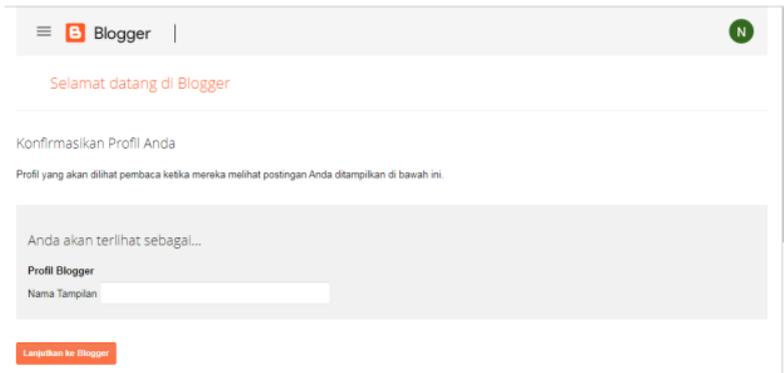
Pelatihan pembuatan Website dan Pemasangan Iklan Online (Pemasaran)

Penggunaan teknologi internet memberikan manfaat yang signifikan bagi para pelaku bisnis dalam era persaingan bisnis global yang semakin ketat (Mochamad Mas'ud, 2017). Era digital saat ini telah membuka peluang pemasaran tanpa batas, di mana seseorang dari mana saja di dunia dapat menjadi calon pelanggan bagi bisnis kita. Keahlian dalam pemasaran online dapat menghasilkan pendapatan yang tak terduga.

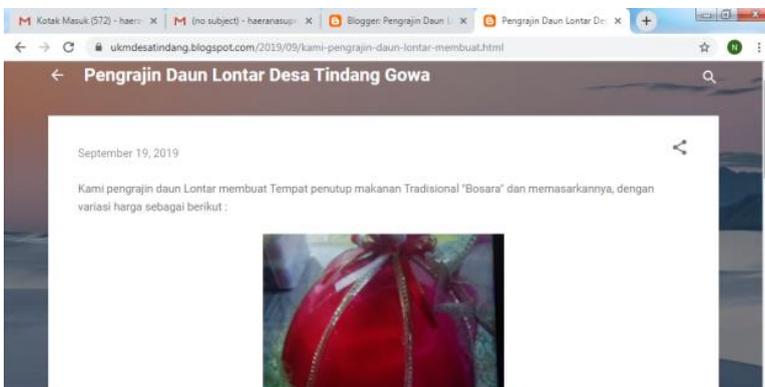
Website menurut Sebok dkk dalam (Ahmad Syamsu Rijal, 2020) adalah kumpulan halaman yang saling terhubung yang di dalamnya terdapat beberapa item seperti dokumen dan gambar yang tersimpan di dalam web server. Aplikasi web biasanya menampilkan data user dan informasi dari server dan dapat diakses melalui browser.

Website, sebagai sebuah platform online, memiliki potensi besar sebagai alat untuk berbagi informasi tentang produk atau usaha kita kepada khalayak luas. Informasi yang lebih lengkap tentang produk yang ditawarkan memiliki dampak positif yang signifikan pada perkembangan bisnis.

Peserta dalam pelatihan ini sangat bersemangat, karena mereka sudah lama menginginkan produk mereka untuk dikenalkan secara online. Pelatihan berbasis web ini merupakan sarana untuk mewujudkan harapan mereka. Dalam tahap awal pembuatan website, langkah pertama adalah membuat alamat email (gmail) sebagai persyaratan utama untuk membuat sebuah website. Setelah tahap email, langkah selanjutnya adalah membuat website dengan mengakses platform Blogger.com:



Website yang dibuat akhirnya melalui platform Blogger.com ini merupakan hasil dari kolaborasi tim pelaksana Program Kemitraan Masyarakat dengan para peserta pelatihan. Bersama-sama, mereka berhasil menciptakan sebuah situs yang diberi nama “UKMDesaTindang.blogspot.com” dan tampilannya sebagai berikut:





Website mitra ini berfungsi sebagai platform untuk berbagi informasi mengenai kegiatan yang dilakukan oleh para pengrajin daun lontar, dan juga sebagai sarana penjualan produk secara online. Hal ini memungkinkan produk-produk kerajinan tangan dari masyarakat setempat untuk dikenal oleh sebanyak mungkin orang yang mengunjungi situs ini.

Peran internet yang sebelumnya hanya sebagai alat komunikasi biasa telah berkembang menjadi media komunikasi baru dalam dunia pemasaran. Melalui internet, komunikasi menjadi lebih cepat, dan informasi dapat menyebar dengan efisien kepada pengguna. Inilah sebabnya mengapa para pemasar semakin intens menggunakan internet sebagai wadah pemasaran dan bisnis (Sandy & Ixora, 2015). Meskipun begitu, masih ada banyak masyarakat yang belum memanfaatkan teknologi digital secara optimal (Herlina S, 2014).

Perkembangan teknologi yang pesat mendorong kreativitas manusia dalam memanfaatkan internet untuk melakukan pemasaran yang lebih efektif. Salah satu bentuk perkembangan ini adalah melalui e-marketing menggunakan platform web (Susanto, Susilo, Riyadi, 2013).

Pemasaran produk saat ini jauh lebih efisien melalui media online dibandingkan dengan metode pemasaran konvensional. Keuntungan utama adalah jangkauan konsumen yang lebih luas. Meski demikian, ada beberapa potensi risiko seperti praktek penipuan, oleh karena itu, tim pelaksana Program Kemitraan Masyarakat mengingatkan mitra untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan transaksi penjualan mereka.

D. EVALUASI

Tahap evaluasi dilakukan sebagai upaya pengukuran tingkat keberhasilan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, dengan melakukan Pre Test dan Post Test (Tabel 1).

Tabel 6.1. Evaluasi Pelaksanaan PKM

Indikator	Pre Test	Post Test
Pengetahuan tentang pembukuan keuangan (pembukuan sederhana)	80 % peserta tidak mengetahui tentang pembukuan keuangan, dan terdapat 20 % cukup mengetahui	95 % peserta sangat mengetahui pembukuan keuangan, dan terdapat 5 % cukup mengetahui
Keterampilan pembuatan website dan teknik pemasangan iklan online	85 % peserta tidak mengetahui tentang pembuatan website dan teknik pemasangan iklan online, 15 % cukup mengetahui	95 % peserta sangat mengetahui tentang teknik pembuatan website dan teknik pemasangan iklan online, dan 5 % cukup mengetahui



PENINGKATAN KETERAMPILAN PENGAJUAN PENGADUAN ONLINE ATAS PELAYANAN PUBLIK

A. PENDAHULUAN

Dalam konteks pelayanan publik, *E-Government* membantu memudahkan akses masyarakat terhadap berbagai jenis layanan yang mereka butuhkan, serta menyederhanakan proses penyampaian aspirasi dan keluhan. Visi *E-Government* adalah membuat teknologi informasi menjadi landasan utama kesuksesan peralihan menuju pemerintahan yang lebih efisien dan transparan (Indrayani, 2016). Karena *E-Government* didasarkan pada teknologi informasi, maka penting bagi masyarakat untuk siap dan mampu mengakses aplikasi yang telah disediakan oleh pemerintah kota Makassar. Tujuan utama dari *E-Government* adalah memberikan kemudahan dan kecepatan dalam pelayanan publik.

Menurut berita online yang diterbitkan pada tanggal 08 Agustus 2016 di website Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Replatformasi Birokrasi, Komisioner Ombudsman Republik Indonesia, Ahmad Alamsyah Saragih, mencatat bahwa hingga Juni 2016 sudah ada lebih dari 4 ribu laporan pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah.

Pembentukan Sistem Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) yang diinisiasi oleh Perpres 76/2013 dan Permenpan-RB No. 24/2014 bertujuan untuk memberikan penyelenggara pelayanan publik alat yang sederhana, cepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik dalam mengelola pengaduan masyarakat. Selain itu, pembentukan SP4N juga bertujuan untuk memberikan masyarakat akses yang lebih baik dalam berpartisipasi dalam menyampaikan pengaduan mereka, sekaligus meningkatkan mutu pelayanan publik.

Selain SP4N, terdapat juga LAPOR! (layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat) yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB No.3 Tahun 2015. LAPOR! adalah layanan yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan pengaduan secara online dan dikelola oleh Kantor Staf Kepresidenan.

Namun, agar partisipasi masyarakat dalam menggunakan fasilitas pengaduan online ini dapat maksimal, maka penting bagi masyarakat untuk memahami dan mengetahui cara pengisian yang benar. Diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mendukung sistem *E-Government*.

Tabel 7.1. Solusi Dan Target Luaran

No.	Permasalahan Mitra	Solusi dan Target Luaran
1.	Masyarakat tidak mengetahui bahwa sebagai warga negara, mereka berhak untuk mendapatkan pelayanan terbaik dari para aparatur negara pada setiap instansi pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan publik.	Diselenggarakan penyuluhan tentang hak dan kewajiban warga negara sebagai pengguna layanan serta akan dijelaskan hak dan kewajiban aparatur negara dalam memberikan pelayanan publik.
2.	Masyarakat tidak memahami tentang pelaksanaan sistem E-Government yang saat ini Kota Makassar sedang berusaha untuk di jalankan.	Diselenggarakan penyuluhan singkat tentang pemerintahan dengan sistem E-Government dan pada sesi ini juga akan diadakan tanya jawab tentang sejumlah keluhan masyarakat terkait pelayanan publik yang selama ini di rasakan.

3.	Masyarakat tidak mengetahui bahwa dengan sistem E-Government maka pemerintah menyediakan sejumlah website untuk pengaduan masyarakat.	Mengadakan pelatihan tata cara pengisian pengaduan di aplikasi aduan pemerintah Kota Makassar dan website Lapor Nasional.
----	---	---

B. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan program pelatihan ini dilakukan dengan cara partisipatif, dengan tahapan kegiatan: 1) di awal pertemuan dilakukan sosialisasi kegiatan pada masyarakat, pembentukan kelompok. 2). Pelatihan dengan konsep praktek langsung agar masyarakat cepat terampil dalam pengisian platform pengaduannya. Di tahapan akhirnya dilakukan evaluasi kegiatan untuk mengukur keberhasilan PKM.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Kegiatan

Keseluruhan rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam Ipteks bagi masyarakat ini difokuskan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh mitra. Untuk membantu dalam penyelesaian permasalahan tersebut, berbagai kegiatan akan dijalankan:

- 1) Forum Diskusi (Penyuluhan): Kegiatan ini akan berfokus pada penyampaian informasi tentang cakupan pengaduan terkait pelayanan publik.
- 2) Pelatihan Membuat Email: Sebagai salah satu persyaratan dalam proses pengaduan, peserta akan diberikan pelatihan untuk membuat alamat email.
- 3) Pelatihan Teknik Pengaduan dengan Aplikasi Sodarata': Peserta akan diajarkan cara menggunakan aplikasi Sodarata' untuk mengajukan pengaduan.
- 4) Pelatihan Teknik Pengaduan melalui Website Nasional Pengaduan Pelayanan Publik: Peserta akan dibekali dengan pengetahuan tentang cara mengajukan pengaduan melalui situs web nasional pengaduan pelayanan publik.
- 5) Metode yang akan digunakan dalam pelaksanaan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) ini adalah:

- 6) Metode Ceramah dan Tanya Jawab: Digunakan dalam forum diskusi untuk memberikan pemahaman tentang cakupan pengaduan pelayanan publik.
- 7) Metode Demonstrasi: Akan digunakan untuk mengajarkan peserta tentang teknik-teknik pengaduan melalui aplikasi ponsel pintar Android dan situs web.

Beberapa alat yang akan digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini meliputi:

- 1) LCD: Digunakan untuk presentasi materi.
- 2) Laptop: Digunakan untuk demonstrasi teknik pengaduan.
- 3) WiFi: Digunakan untuk koneksi internet dalam pembuatan blog dan situs web.
- 4) Aplikasi Gmail dan Yahoo: Digunakan untuk pembuatan alamat email.
- 5) Ponsel Pintar Android: Digunakan untuk pelatihan teknik pengaduan dengan aplikasi Sodarata'.
- 6) Kamera Digital: Digunakan untuk mendokumentasikan kegiatan pelatihan.

2. Pembahasan

Pada acara pelatihan tersebut dihadiri sebanyak 11 orang masyarakat sebagai peserta PKM.

Berikut ini pembahasan tentang rangkaian pelaksanaan kegiatan PKM:

1) Penyuluhan (Forum Diskusi)



Gambar 7.1
Materi Diskusi (Penyuluhan)

Dalam sesi penyuluhan ini, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang konsep pelayanan publik berbasis E-Government, materi disampaikan oleh Bapak Dr. Abdi, M.Pd. Berikut adalah kutipan dari penyuluhan (diskusi) tersebut:

Pelayanan publik di Indonesia seharusnya dapat dilaksanakan secara efisien karena telah memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009. Dasar pemikiran di balik pembentukan undang-undang ini adalah bahwa negara memiliki kewajiban untuk melayani setiap warganya dalam memenuhi hak dan kebutuhan dasar mereka melalui pelayanan publik, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Terkait dengan undang-undang pelayanan publik tersebut, ada penjelasan mengenai hak-hak masyarakat sebagai penerima layanan. Pasal 18 menyatakan bahwa masyarakat berhak untuk:

- a. Mengetahui isi standar pelayanan;
- b. Mengawasi pelaksanaan standar pelayanan;
- c. Mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan;
- d. Mendapat advokasi, perlindungan, dan/atau pemenuhan pelayanan;
- e. Memberi tahu kepada pimpinan penyelenggara untuk memperbaiki pelayanan jika tidak sesuai dengan standar;
- f. Memberitahu pelaksana untuk memperbaiki pelayanan jika tidak sesuai dengan standar;
- g. Melaporkan pelaksana yang melanggar standar pelayanan dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada penyelenggara dan ombudsman;
- h. Melaporkan penyelenggara yang melanggar standar pelayanan dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada pembina penyelenggara dan ombudsman;
- i. Mendapat pelayanan berkualitas sesuai dengan prinsip dan tujuan pelayanan.

Sejalan dengan pelaksanaan *E-Government* di Kota Makassar, upaya terus dilakukan untuk memberikan pelayanan publik dengan standar yang tinggi. Oleh karena itu, pemerintah Kota Makassar berkomitmen untuk menjadikan Kota Makassar sebagai *Smart City*.

Kualitas pelayanan publik sangat tergantung pada interaksi yang baik antara penyelenggara pelayanan, masyarakat sebagai penerima layanan, sarana dan prasarana pendukung, serta kualitas barang dan jasa yang menjadi objek layanan. Untuk mengukur tingkat kualitas pelayanan publik, umpan balik dari masyarakat sangat penting. Umpan balik ini dapat berupa saran, kritik, pujian, atau keluhan terkait penyelenggaraan pelayanan.

Selanjutnya, dalam pelatihan teknik pengaduan menggunakan aplikasi 'Sodarata', pelaksanaan pembuatan email akan dilakukan bersamaan dengan pelatihan teknik pengaduan. Hal ini karena peserta diharuskan memiliki alamat email sebelum menggunakan aplikasi atau situs web untuk mengajukan pengaduan.

Pelayanan publik harus terus mengikuti perkembangan teknologi global yang terus berubah dengan cepat. Saat ini, pengaduan masyarakat tidak lagi harus dilakukan secara tatap muka atau melalui telepon/sms. Dengan kemajuan teknologi, keluhan dapat diajukan melalui aplikasi pada ponsel pintar Android. Sebagai contoh, Pemerintah Kota Makassar telah meluncurkan aplikasi pengaduan terpadu bernama "Sodarata'."

Demikianlah gambaran singkat tentang materi penyuluhan dalam program Ipteks Bagi Masyarakat ini.



Gambar 7.2
Pelatihan Aplikasi 'Sodarata' (Menggunakan Hp Android)

'Sodarata' adalah sebuah aplikasi yang dibuat untuk mewujudkan konsep Makassar *Smart City* dan ditujukan khususnya bagi warga kota agar dapat berinteraksi langsung dengan birokrasi baik berupa saran, pujian, kritikan

bahkan keluhan atas pelayanan yang diberikan oleh aparat pemerintahan. Dan, diharapkan semua komentar interaktif tersebut dilakukan secara Sombere atau mengedepankan sifat dan sikap sopan santun dan ramah sekaligus cerdas sesuai cerminan tradisi lokal warga Makassar. Dengan demikian, Makassar Smart City dapat terbangun oleh Smart Citizen yang Sombere dan pada akhirnya tercipta pula pemerintahan yang bersih, akuntabel dan transparan.

2) Pelatihan Teknik pengaduan melalui website Lapor:



Gambar 7.3

Petunjuk Teknis Sebelum Pelatihan Melalui Website Lapor

Pada dasarnya di sejumlah kota besar yang juga mengimplementasikan E-Government memiliki website sebagai pusat informasi kepada masyarakat, sebagai contoh Kota Yogyakarta (<https://jogjaprov.go.id/>), Surabaya (<https://www.surabaya.go.id>) dan kota-kota lainnya. Website kota Makassar ada dua situs yaitu: (<http://makassarkota.go.id/>) dan website (<http://makassar.rakyatku.com/>), website-website tersebut tidak memiliki kanal aduan, website ini hanya berisi tentang informasi Kota Makassar dan seputar kegiatan yang sedang dan akan dilaksanakan oleh Kota Makassar.

Berdasar pada Undang-Undang no. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dan tentang pengelolaan pengaduan, maka oleh pemerintah pusat melalui Kantor staf kepresidenan bekerjasama dengan Kementerian Pan dan Reformasi Birokrasi kemudian meluncurkan portal Pengaduan yaitu LAPOR (<http://lapor.go.id>), pada website tersebut masyarakat bisa melaporkan semua permasalahan terkait pembangunan dan layanan publik.



Gambar 7.4
Pelatihan Teknik Aduan Melalui Website Lapor

Tampilan Website:

LAPOR! - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat

<https://lapor.go.id/>



Langkah-Langkah pengisian pengaduan di website Lapor tersebut adalah sebagai berikut:

- Masyarakat yang hendak melaporkan dan pengaduan layanan publik yang dialaminya, maka untuk dapat menggunakan website tersebut dia harus sudah memiliki E-mail atau surat elektronik, baik yang menggunakan domain gmail maupun yahoo.
- Buatlah ID Lapor Anda, dengan mengisi form di sebelah kanan tampilan website.
- Khusus untuk kolom Password, masukkanlah password yang nantinya akan dipakai untuk Log in di website Lapor, jadi bukan password Email.

- d. Setelah selesai mengisi semua data, tekan tombol:



- e. Setelah klik tombol Daftar Lapor, maka tampilannya sebagai berikut:



- f. Silahkan ikuti instruksi tersebut, masuk ke Inbox Email anda (akun email yang digunakan pada saat membuat ID Lapor) dan buka Email dari Lapor (Selamat datang ke Lapor) klik tombol Aktivasi Email. Tampilan di Email seperti berikut ini:



- g. Setelah Tombol Aktivasi Email di klik, maka akun Lapo anda sudah berhasil diaktifkan. Tampilannya akan seperti di bawah ini:



- h. Akhirnya SELAMAT, anda sudah memiliki akun di website Lapo dan bisa langsung digunakan serta kapanpun bisa anda Log in untuk memantau perkembangan penanganan pengaduan anda.

Dalam pelatihan teknik pengaduan ini, peserta diberitahu bahwa saat menulis laporan aduan, disarankan untuk menggunakan bahasa yang sederhana dan jelas, serta menghindari penggunaan kata-kata yang dapat menimbulkan kebingungan. Laporan aduan perlu disusun secara singkat, padat, dan mudah dimengerti, sementara identitas diri peserta juga perlu diungkapkan sebagai bukti komitmen dalam menyampaikan aduan. Jika diperlukan, sangat penting untuk menggambarkan potensi konsekuensi jika aduan tidak mendapat tanggapan dari pihak yang dituju. Setelah aduan mendapat respons atau tanggapan dari instansi yang dituju, serta permasalahan dalam aduan telah terselesaikan dengan baik, tindakan yang tepat adalah mengucapkan rasa terima kasih sebagai bentuk apresiasi.

D. EVALUASI

Tahapan evaluasi dilakukan sebagai upaya pengukuran keberhasilan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, dengan membagikan kuesioner sebagai Pre Test dan Post Test (Tabel 1).

Tabel 7.2. Evaluasi Pelaksanaan PKM

Indikator	Pre Test	Post Test
Pengetahuan tentang Hak & Kewajiban warga negara dalam Pelayanan Publik	80 % peserta tidak mengetahui hak dan kewajiban dalam pelayanan publik, dan terdapat 20 % cukup mengetahui	95 % peserta sangat mengetahui hak dan kewajiban warga negara dalam pelayanan publik, dan terdapat 5 % cukup mengetahui
Pengetahuan tentang sistem pemerintahan <i>E-Government</i>	85 % peserta tidak mengetahui tentang sistem pemerintahan berbasis <i>e-government</i> , 15 % cukup mengetahui	95 % peserta sangat mengetahui tentang sistem pemerintahan berbasis <i>e-government</i> , dan 5 % cukup mengetahui
Keterampilan tentang teknik pengajuan pengaduan lokal dan Nasional	85 % peserta tidak mengetahui teknik pengaduan lokal dan nasional, 15 % cukup mengetahui	95 % peserta sangat mengetahui teknik pengajuan pengaduan pelayanan tingkat lokal dan nasional, 5 % cukup mengetahui



PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERKAIT LITERASI DIGITAL DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KOTA MAKASSAR

A. PENDAHULUAN

Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63/Kep/M.PAN/7/2003, esensi dari pelayanan publik (*public service*) dijelaskan sebagai pemberian pelayanan yang optimal kepada masyarakat, yang mencerminkan kewajiban aparatur negara sebagai abdi masyarakat. Pelayanan publik adalah tindakan yang dilakukan oleh kelompok atau birokrasi tertentu dengan tujuan memberikan bantuan kepada masyarakat guna mencapai sasaran tertentu (Rukayat, 2017). Dengan kata lain, pelayanan publik harus selalu bermanfaat bagi masyarakat, di mana pun dan kapan pun.

Konsep *E-Government* dalam pelayanan publik telah mengubah citra birokrasi penyelenggara pelayanan publik yang sebelumnya terkesan lambat dan rumit menjadi lebih cepat dan mudah diakses oleh masyarakat. *Tujuan E-Government* adalah untuk menjadikan pemerintah lebih efisien dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat (Indrayani, 2016). *E-Government*, atau pemerintahan elektronik, adalah pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan kepada warganya, serta mengelola urusan bisnis dan aspek-aspek lain yang terkait dengan pemerintahan.

Penerapan *E-Government* membawa sejumlah manfaat, seperti kemudahan akses pelayanan publik bagi masyarakat yang berada di lokasi jauh dari kantor pelayanan, penghematan waktu dan biaya bagi pengguna layanan, transparansi informasi, percepatan penanganan pengaduan yang dapat dipantau oleh masyarakat, pencegahan pungutan liar (pungli) dalam proses pelayanan, serta memudahkan masyarakat dalam memahami persyaratan dan prosedur layanan.

Namun, kemudahan dalam pelayanan ini tidak dirasakan secara merata dalam masyarakat, karena pelayanan publik berbasis E-Government memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang hanya bisa dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat yang memiliki kecakapan digital.

Situasi ini semakin penting dalam era pandemi Covid-19, di mana hampir semua aspek kehidupan beralih ke ranah daring. Hal ini membuat pemerintah menyadari perlunya peningkatan literasi digital secara besar-besaran. Literasi digital mencakup kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam menemukan, mengevaluasi, memanfaatkan, membuat, dan berkomunikasi dengan konten atau informasi, baik dari segi pemahaman maupun teknis (Nasrullah, 2017).

Literasi digital dalam konteks pelayanan publik akan menciptakan masyarakat yang mampu memanfaatkan berbagai situs web dan aplikasi pelayanan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik untuk mendapatkan pelayanan maupun mengajukan pengaduan terkait kualitas pelayanan yang tidak sesuai dengan harapan.

Dalam konteks penyediaan sarana/aplikasi pelayanan publik berbasis digital di Kota Makassar, pandemi Covid-19 telah mendorong banyak inisiatif. Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan publik mulai meluncurkan layanan online. Misalnya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar telah mengembangkan sejumlah layanan online, seperti akta kelahiran, pengambilan KTP, pengaktifan data kependudukan, pencetakan Kartu Keluarga, dan berbagai layanan lainnya yang dapat diakses melalui situs web <https://dukcapil.makassar.go.id/app>.

Selain itu, Kantor Pengadilan Agama Kota Makassar juga telah menghadirkan sejumlah layanan online melalui situs webnya (<http://ptsp.pamakassar.go.id/>). Ini mencakup aplikasi MGM (Media Gugatan Mandiri) yang

memudahkan pembuatan surat gugatan atau permohonan. Serta ada layanan SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang memungkinkan masyarakat untuk melihat perkembangan perkara yang sedang berlangsung di Pengadilan Agama.

Dalam hal pengaduan, Sistem Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) telah dibentuk berdasarkan regulasi yang bertujuan untuk memudahkan penyelenggaraan pelayanan publik, memastikan pengaduan masyarakat ditangani dengan cepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik. Selain SP4N, juga ada LAPOR! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) yang memungkinkan masyarakat untuk mengajukan aspirasi dan pengaduan secara online, dan ini dikelola oleh Kantor Staf Kepresidenan.

Selain itu, di Kota Makassar, banyak aplikasi pengaduan lokal yang telah dikembangkan dan diterapkan. Salah satu contohnya adalah aplikasi Qlue, yang diluncurkan pada tahun 2019. Aplikasi ini memungkinkan warga Kota Makassar untuk melaporkan masalah pelayanan publik, dan laporan mereka akan ditindaklanjuti oleh enam OPD, yaitu Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Satpol PP, dan Dinas Kesehatan. Selain itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar juga meluncurkan aplikasi Japri Ka (Jaringan Aduan dan Laporan Masyarakat) untuk memudahkan warga dalam melaporkan pelanggaran terkait pemilihan umum.

Meskipun pelayanan publik berbasis digital telah banyak tersedia, penting untuk diingat bahwa pemanfaatan teknologi ini belum merata di kalangan masyarakat. Sebagian besar masyarakat Kota Makassar masih belum mahir dalam hal literasi digital, seperti yang terlihat pada penggunaan aplikasi pengaduan 'Sodarata' pada tahun 2017, yang hanya diakses oleh sejumlah kecil pengguna. Aplikasi ini bahkan sudah tidak lagi tersedia di toko aplikasi online. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum akrab dengan berbagai layanan publik online dan tidak paham cara menggunakannya.

Penyebaran teknologi digital telah luas, tetapi masih ada sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya mampu memanfaatkannya dengan produktif (Herlina S, 2014). Inilah sebabnya mengapa literasi digital menjadi kunci untuk membantu individu beradaptasi dengan perubahan, menggali pengetahuan, dan meningkatkan kualitas hidup (Utami, 2020). Hasil

wawancara dengan sejumlah warga mengungkapkan bahwa mereka merasa kebingungan ketika mengunjungi kantor pelayanan yang hanya memberikan tautan ke layanan online tanpa memberikan panduan tentang cara menggunakannya. Oleh karena itu, pelatihan dan penyuluhan tentang literasi digital dalam pelayanan publik di Kota Makassar sangat penting.

B. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan masyarakat dalam menggunakan situs web/aplikasi pelayanan publik. Dengan demikian, program PKM ini berkontribusi untuk mendukung program Literasi Digital yang saat ini ditekankan oleh pemerintah. Kegiatan pengabdian ini akan ditujukan kepada warga Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.

Program pelatihan umumnya terdiri dari tiga tahapan: analisis kebutuhan pelatihan, pelaksanaan program pelatihan, dan evaluasi pelatihan (Kurniadi, 2007). Tujuan utama pelatihan adalah meningkatkan pengetahuan melalui proses pembelajaran, dan pemilihan metode pelatihan yang tepat sangat mempengaruhi pencapaian tujuan pelatihan (Achmat, 2009). Pelatihan yang efektif dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti role-play, observasi, diskusi, dan brainstorming, dengan syarat peserta harus aktif terlibat (Saputro & Hastomo, 2020).

Dalam konteks kegiatan pengabdian kepada masyarakat, metode yang digunakan adalah metode edukasi dan pelatihan. Tahapan pelaksanaan PKM ini mencakup: 1) Sosialisasi kegiatan kepada masyarakat dan pembentukan kelompok, 2) Penyuluhan untuk memberikan pemahaman tentang pelayanan publik berbasis digital, 3) Pelatihan penggunaan situs web/aplikasi untuk akses pelayanan publik, 4) Pelatihan mengenai cara menyampaikan pengaduan dalam skala nasional maupun daerah melalui situs web/aplikasi pengaduan. Tahap terakhir melibatkan penyebaran kuesioner kepada peserta PKM untuk mengukur perubahan dalam pemahaman dan keterampilan masyarakat setelah mengikuti program ini. Selain itu, tim pelaksana juga akan melakukan tes kinerja pada hari kedua pelatihan, dengan fokus pada

mendampingi peserta dalam praktek langsung dalam menguasai penggunaan situs web/aplikasi pelayanan publik.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat diselenggarakan pada tanggal 25 Oktober 2021 di kelurahan Karunrung Kota Makassar.



Gambar 8.1. Foto Bersama Mitra

Kegiatan pengabdian ini awalnya direncanakan akan dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 23 Oktober 2021 tetapi dengan pertimbangan bahwa terdapat aplikasi pelayanan publik yang menu layanannya tidak bisa muncul di luar jam kerja kantor pemerintah maka terpaksa waktu pelaksanaannya ditunda ke hari senin tanggal 25 Oktober 2021.

Pada penjelasan berikut ini adalah gambaran kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan:

1. Deskripsi Empat Pilar Literasi Digital

Kegiatan Tahap pertama yang dilakukan adalah penyuluhan terkait ruang lingkup literasi digital, dimana materi yang disampaikan adalah tentang gambaran empat (4) pilar literasi digital sebagaimana Kementerian Komunikasi dan Informatika telah meluncurkan modul-modul tersebut.



Gambar 8.2. Materi 4 Pilar Literasi Digital

Keempat pilar tersebut adalah Budaya Digital, Etika Digital, Keamanan Digital, dan Keterampilan Digital. Berdasarkan hasil kuesioner awal (Pre Test), sebanyak 55% peserta tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang Literasi Digital, 25% peserta memiliki pemahaman yang cukup, dan 20% peserta memiliki pemahaman yang kurang. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman mitra terkait literasi digital masih terbatas. Namun, hasil kuesioner juga menunjukkan bahwa 100% responden menyadari pentingnya literasi digital dalam konteks pelayanan publik. Artinya, semua peserta telah memahami betapa pentingnya pengetahuan dan keterampilan dalam bermedia digital, terutama dalam konteks pelayanan publik, karena sebagian besar penyelenggara pelayanan publik saat ini telah beralih ke platform digital.

Budaya Digital adalah kemampuan individu untuk membaca, menguraikan, menginternalisasi, mengevaluasi, dan membangun pemahaman tentang nilai-nilai kebangsaan, Pancasila, dan semangat persatuan dalam kehidupan sehari-hari (Astuti et al., 2021). Etika Digital mencakup kemampuan seseorang untuk menyadari, mengikuti, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan memajukan prinsip-prinsip etika digital (netiquette) dalam interaksi harian mereka (Kusumastuti et al., 2021).. Keamanan Digital melibatkan kemampuan individu untuk mengidentifikasi, melindungi, mengamankan, menganalisis, dan meningkatkan kesadaran tentang keamanan digital dalam kehidupan mereka (Adikara et al., 2021).. Keterampilan Digital adalah kemampuan

seseorang untuk memahami, menggunakan, dan menguasai perangkat keras, perangkat lunak, serta sistem operasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka menuju kehidupan yang lebih baik (Monggilo, 2021).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Budaya Digital adalah upaya pemerintah untuk memperkuat karakter warga modern melalui sikap dan perilaku yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan prinsip Bhinneka Tunggal Ika dalam era digital. Etika Digital mencakup sikap dan perilaku yang berlaku di dunia digital dengan mempertimbangkan prinsip etika yang baik, sebagian besar mengikuti etika yang berlaku dalam kehidupan nyata karena interaksi di dunia digital juga melibatkan manusia. Keamanan Digital adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu untuk melindungi data pribadi dan akun mereka dari potensi ancaman keamanan yang mungkin datang dari pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Keterampilan Digital adalah kemampuan individu dalam menguasai perangkat elektronik dan memanfaatkannya untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan mereka menuju kehidupan yang lebih baik

2. Pelatihan Website/Aplikasi Layanan dan Pengaduan

Kegiatan kedua adalah penyelenggaraan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat tentang mekanisme penggunaan sejumlah website dan atau aplikasi dalam mendapatkan pelayanan dan bagaimana tahapan pengajuan suatu pengaduan pelayanan publik.



Gambar 8.3. Pengenalan URL Website/Aplikasi Layanan dan Pengaduan

Sebagai pengantar dalam pelatihan, materi awal mencakup pengenalan beberapa *Uniform Resource Locator* (URL) dari website dan aplikasi pelayanan serta pengaduan pelayanan publik.

Pentingnya keteraturan dalam sistem pemerintahan dari berbagai aspek menuntut bahwa administrasi publik harus memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan (Haerana, 2021). Salah satu layanan yang sangat diminati oleh masyarakat adalah layanan kependudukan dan pencatatan sipil. Oleh karena itu, pemateri memperkenalkan fungsi dari setiap fitur yang tersedia di website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, yang dapat diakses melalui tautan berikut: <https://dukcapil.makassar.go.id/> . Di dalam website tersebut, terdapat menu utama yang disebut "layanan." Ketika menu ini di klik, masyarakat akan diarahkan ke "layanan online" dengan URL: <https://dukcapil.makassar.go.id/app/> . Penting untuk dipahami bahwa menu "layanan online" hanya akan aktif selama jam kerja, yaitu dari hari Senin hingga Jumat, antara pukul 08.00 hingga 14.00 WITA. Di luar jam kerja, hanya menu "Lihat Progres Layanan Anda" akan tersedia dengan URL: <https://dukcapil.makassar.go.id/app/dasbor/progres>.



Gambar 8.4. Pelatihan Mekanisme Penggunaan Layanan Digital

Selain itu, pemateri juga memberikan pendampingan untuk meningkatkan keterampilan digital terkait pemahaman tentang berbagai inovasi layanan yang disediakan oleh Kota Makassar, salah satunya adalah inovasi Kucata'Ki. Mengacu pada Permendagri Nomor 9 tahun 2016 dan

perpres 96 tahun 2018 tentang percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar mengembangkan inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan cakupan akte kelahiran secara efektif dan efisien, yakni berbasis Aplikasi (Musabry, Burhanuddin, & Haerana, 2021). Aplikasi Kucata'Ki hanya dapat diunduh melalui Google Play Store dengan URL: https://play.google.com/store/apps/details?id=makassar.dukcapil.com.dukcapil_makassar. Pada awalnya, aplikasi ini ditujukan untuk mempermudah layanan kepada masyarakat, tetapi saat ini pemerintah Kota Makassar memberikan batasan penggunaan aplikasi ini, yaitu hanya diperuntukkan bagi Rumah Sakit, Puskesmas, dan kelurahan dalam aspek pelayanan kelahiran, kematian, dan pengaduan.

Partisipasi masyarakat dalam penggunaan fasilitas pengaduan online hanya dapat terwujud jika masyarakat memahami mekanisme pengisiannya). Terkait dengan pengaduan pelayanan publik, masyarakat dapat mengajukan pengaduan melalui website pemerintah pusat dengan URL: <https://www.lapor.go.id/>. Pada website ini, laporan aduan yang diunggah akan diteruskan ke instansi pemerintah yang dituju, dan performa dari website pelayanan publik ini cukup baik. Terdapat tiga pilihan klasifikasi laporan di website ini, yaitu pengaduan, aspirasi, dan permintaan informasi.

Antusiasme masyarakat dalam mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang kami jalankan menunjukkan bahwa materi PKM kali ini sangat bermanfaat bagi mereka. Hal ini dapat dilihat melalui video PKM yang dapat diakses melalui URL berikut: <https://youtu.be/rhqPeDKuvaw>.

D. EVALUASI

Berikut ini adalah tabel perbandingan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, yang merupakan hasil analisis dari pengumpulan data kuesioner yang dibagikan sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat:

Tabel 1. Evaluasi Pelaksanaan PKM

Indikator	Pre Test	Post Test
Pengetahuan tentang URL Layanan	90 % peserta tidak mengetahui, 5 % cukup mengetahui dan 5 % kurang mengetahui	95 % peserta sangat mengetahui dan 5 % cukup mengetahui
Keterampilan tentang mekanisme mendapatkan layanan digital	95 % peserta tidak mengetahui dan 5 % peserta kurang mengetahui	95 % peserta sangat mengetahui dan 5 % peserta cukup mengetahui
Keterampilan tentang mekanisme pengajuan pengaduan	95 % peserta tidak mengetahui dan 5 % peserta cukup mengetahui	95 % peserta sangat mengetahui dan 5 % peserta cukup mengetahui

Dari hasil analisis data dari tanggapan para peserta terhadap kuesioner yang disebarakan dalam bentuk Pre-Test dan Post-Test di atas, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan mengenai literasi digital mengalami peningkatan yang signifikan. Selain itu, keterampilan dalam menggunakan layanan dan mengajukan pengaduan juga mengalami peningkatan yang sangat tinggi, meskipun ada 5% peserta yang menyatakan pengetahuannya masih cukup terbatas. Hal ini disebabkan oleh peserta yang tidak membawa ponsel Android mereka ke dalam pelatihan, sehingga mereka tidak dapat memanfaatkan pelatihan dengan maksimal.

BAB 9

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGOLAHAN LIMBAH PLASTIK MENJADI KERAJINAN TANGAN BERNILAI EKONOMIS BERBASIS WEB DI KELURAHAN KARUNRUNG, KOTA MAKASSAR

A. PENDAHULUAN

Kemakmuran rakyat adalah bukti konkret dari kesuksesan pembangunan yang dikelola oleh pemerintah. Setiap tahun, pemerintah terus berusaha meningkatkan produktivitasnya sambil tetap memperhatikan pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat secara relatif. Upaya untuk meningkatkan taraf ekonomi rakyat terwujud dalam berbagai program kerja yang dilaksanakan baik oleh pemerintah sendiri maupun dalam kerjasama dengan pihak atau negara lain, dan bahkan sebagian program peningkatan kesejahteraan masyarakat dilakukan oleh sektor swasta.



Dengan banyaknya perhatian yang diberikan oleh berbagai pihak terhadap perbaikan ekonomi masyarakat, seringkali masyarakat telah menerima berbagai pelatihan keterampilan. Namun, dalam kenyataannya, banyak kelompok usaha kecil yang telah dibentuk dan dilatih dengan biaya besar dan waktu yang cukup lama tidak mampu bertahan dalam jangka panjang. Akibatnya, tujuan utama mereka untuk meningkatkan pendapatan masyarakat tidak tercapai dengan sendirinya. Kondisi yang serupa terjadi di Kelurahan Karunrung, Kota Makassar, di mana berbagai jenis pelatihan, seperti menjahit, merangkai bunga, memasak, pembuatan aksesoris, dan lainnya, tidak memberikan masyarakat alat yang cukup kuat untuk meningkatkan penghasilan mereka. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang pemasaran yang efektif, administrasi sederhana (pembukuan), dan manajemen yang baik. Akhirnya, keterampilan yang telah dikuasai pun menjadi terlupakan.

1. Permasalahan Mitra

Permasalahan mitra, antara lain:

- a. Keterbatasan pasokan bahan baku. Selama ini, limbah plastik yang digunakan berasal dari sekitar lingkungan, namun jumlahnya sangat terbatas karena kekurangan modal untuk membeli limbah plastik dari pengepul.
- b. Rendahnya rasa percaya diri masyarakat terhadap kesuksesan usaha kecil mereka jika mereka tekun dalam menjalankannya.
- c. Pengelolaan usaha kerajinan tangan ini kurang baik, baik dari segi manajemen maupun administrasi.
- d. Pemasaran produk tidak optimal, baik secara offline maupun online, dan belum memanfaatkan teknologi internet.
- e. Kreativitas dalam produk kerajinan tangan dari limbah plastik masih terbatas dalam bentuknya, sehingga diperlukan modifikasi bentuk yang lebih kreatif.

2. Solusi Dan Target Luaran

Indikator pencapaian target dan keluaran dari proyek Pengolahan Limbah Plastik menjadi Kerajinan Tangan berbasis web ini adalah:

- a. Menjaga lingkungan sekitar dengan memanfaatkan limbah plastik yang sulit terurai oleh tanah.
- b. Menciptakan peluang usaha bagi masyarakat yang tertarik dengan dunia kerajinan tangan.
- c. Meningkatkan pendapatan masyarakat, yang akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan mereka.
- d. Mengajarkan kepada masyarakat ilmu pemasaran, sehingga mereka memahami bahwa produk dapat dipasarkan secara daring, menjangkau berbagai wilayah. Untuk jelasnya, mengenai permasalahan mitra, target dan luaran dari kegiatan IbM ini dapat dilihat pada tabel 9.1 berikut:

No.	Permasalahan Mitra	Solusi dan Target Luaran
1.	Keterbatasan bahan baku. Selama ini limbah plastik yang digunakan berasal dari lingkungan sekitar yang jumlahnya sangat sedikit, hal ini dikarenakan kurangnya modal untuk membayar ke pengepul limbah plastik	Pemberian modal untuk membeli limbah plastik pada pengepul.
2.	Masyarakat tidak memiliki keyakinan dalam dirinya akan mencapai kesuksesan usaha jika tetap tekun dalam menjalankan usaha kecil tersebut.	Diselenggarakan forum motivator dengan mendatangkan pengusaha lokal yang telah sukses
3.	Usaha kerajinan tangan tersebut tidak dikelola dengan baik dari aspek manajemennya maupun administrasinya.	Mengadakan pelatihan manajemen usaha dan administrasi (pembukuan). Luarannya berupa laporan keuangan usaha yang lengkap selama masa kerjasama dengan Mitra IbM
4.	Pemasaran produk tidak dilakukan secara maksimal baik secara offline maupun online, sama sekali tidak ada pemanfaatan teknologi internet.	Membangun kerjasama kemitraan dengan berbagai pihak untuk pemasaran secara offline dan mengadakan pelatihan pembuatan web/blog untuk sarana pemasaran online

5.	Hasil kreasi kerajinan tangan dari limbah plastik tersebut masih terbatas bentuknya sehingga perlu dilakukan modifikasi bentuk yang lebih kreatif	Pelatihan inovatif produk kerajinan tangan. Sebagai keluarannya adalah dihasilkan produk desain kreatif yang bernilai jual tinggi
----	---	---

Tabel 9.2 Rencana Target Capaian Luaran

No	Jenis Luaran	Indikator Capaian
1	Publikasi ilmiah di jurnal/prosiding	Submitted
2	Publikasi pada media masa (cetak/elektronik)	Tidak ada
3	Peningkatan omzet pada mitra yang bergerak dalam bidang ekonomi	Ada
4	Peningkatan kuantitas dan kualitas produk	Ada
5	Peningkatan pemahaman dan ketrampilan masyarakat	Ada
6	Peningkatan ketentraman /kesehatan masyarakat (mitra masyarakat umum)	Tidak ada
7	Jasa, model, rekayasa sosial, sistem, produk/barang	Produk
8	Hak kekayaan intelektual (paten, paten sederhana, hak cipta, merek dagang, rahasia dagang, desain produk industri, perlindungan varietas tanaman, perlindungan topografi)	Tidak ada
9	Buku ajar	Tidak ada

B. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan program pelatihan ini diterapkan secara partisipatif, dengan tahapan sebagai berikut: 1) Tahap awal melibatkan sosialisasi program kepada masyarakat dan pembentukan kelompok. Upaya dilakukan untuk meningkatkan motivasi masyarakat terhadap usaha yang akan mereka jalankan dengan mengundang pengusaha sukses sebagai motivator yang berbagi pengalaman suksesnya. 2) Pelatihan dilakukan dengan pendekatan praktek langsung agar masyarakat dapat menguasai keterampilan dengan cepat. 3) Pendampingan berlangsung sepanjang program pelatihan, termasuk hingga tahap akhir, yaitu pemasaran produk. Langkah terakhir adalah evaluasi yang dilakukan oleh tim pelaksana pelatihan untuk mengukur keseluruhan kegiatan yang telah dilakukan.

Metode pelaksanaan kegiatan penelitian tersebut sesuai dengan serangkaian kegiatan pemberdayaan dengan langkah-langkah berikut: 1) Tahap Persiapan; 2) Tahap Assesment; 3) Tahap Perencanaan Alternatif Kegiatan; 4) Tahap Formulasi Rencana Aksi; 5) Tahap Pelaksanaan Kegiatan; 6) Tahap Evaluasi; dan 7) Tahap Terminasi (Isbandi, 2008).

Rencana Kegiatan:

Sejumlah rencana kegiatan yang akan dilakukan mencakup hal-hal berikut:

1. Identifikasi Potensi

Mitra dan pelaksana akan bersama-sama mengidentifikasi potensi yang ada, seperti jumlah dan keahlian tenaga kerja, ketersediaan bahan baku, peralatan, manajemen, pasar, serta faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang relevan dengan usaha tersebut.

2. Analisis Kebutuhan

Mereka akan menganalisis kebutuhan kelompok pengrajin untuk mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi. Prioritas akan diberikan kepada kebutuhan yang paling mendesak, yang sesuai dengan kapasitas kelompok pengrajin.

3. Rencana kerja

Rencana kerja meliputi: persiapan kegiatan dan pelaksanaan, dimana hal tersebut dilakukan setelah menganalisis kebutuhan kelompok, pelaksana membuat rencana kerja atau kegiatan yang akan diterapkan.

4. Pelatihan yang meliputi dua kegiatan, yaitu

a. Kegiatan pelatihan manajemen organisasi, administrasi keuangan (pembukuan) meliputi:

- 1) Mitra diperkenalkan tentang manajemen usaha kecil. Di dalamnya dijelaskan tentang aspek pemasaran, aspek produksi, aspek permodalan dan keuangan, dan aspek
- 2) Sumber daya manusia.
- 3) Menggali jenis-jenis pembukuan yang telah dilakukan oleh kelompok mitra.
- 4) Menggali kebutuhan utama kelompok berkaitan dengan pembukuan:

- Menggandakan materi pembukuan.
 - Mempersiapkan ATK pembukuan untuk kelompok dan untuk pelaksana
 - Mempersiapkan media pelatihan pembukuan
 - Melaksanakan pelatihan pembukuan kepada Kelompok mitra
- b. Kegiatan pelatihan perluasan jaringan pemasaran dan pemodalannya, meliputi:
- Mengidentifikasi jaringan pasar yang telah dimiliki oleh kelompok.
 - Menetapkan wilayah pasar potensial.
 - Mendesain produk kreatif yang lebih bervariasi.
 - Melakukan temu stakeholder untuk akses pemodalannya.
 - Pelatihan penyusunan proposal pendanaan
 - Monitoring dan evaluasi untuk semua program kegiatan dan mengevaluasinya sesuai target luaran.

Partisipasi Mitra

Partisipasi Mitra merupakan indikator keberhasilan dari pelaksanaan Ipteks Bagi Masyarakat ini, untuk itu peran aktif kelompok pengrajin kerajinan tangan dari limbah plastik sangat diharapkan.

Partisipasi mitra yang diharapkan selama kegiatan yaitu meliputi:

- Anggota kelompok berusaha mengenali permasalahannya sendiri.
- Anggota kelompok berusaha mencari solusi guna memecahkan permasalahannya.
- Anggota Kelompok bersedia membenahi pembukuan usahanya.
- Anggota kelompok ikut mendesain dan memasarkan produk.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Keseluruhan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam Ipteks bagi masyarakat ini diarahkan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi mitra. Dan untuk membantu penyelesaian permasalahan tersebut, berikut kegiatan yang akan dilaksanakan:

1. Forum motivator
2. Pelatihan Manajemen keuangan (pembukuan)

3. Pelatihan Inovatif Produk
4. Pelatihan Pembuatan Web

Kehadiran forum motivator menjadi penting dalam kelompok usaha kerajinan tersebut karena anggota masyarakat yang terlibat kurang yakin akan kesuksesan usaha mereka jika mereka terus tekun dalam menjalankan usaha kecil tersebut. Kegiatan kedua adalah pelatihan manajemen keuangan (pembukuan), yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan dalam pengelolaan usaha kerajinan tangan, baik dari segi manajemen maupun administrasi. Kegiatan ketiga, yaitu pelatihan inovasi produk, dilakukan untuk mendukung kelompok kerajinan tangan agar dapat bersaing dalam pasar yang terus berubah, dengan produk-produk inovatif yang berkembang cepat dari waktu ke waktu. Selain itu, pelatihan inovasi produk akan memberikan beragam pilihan produk kepada konsumen yang berminat. Kegiatan terakhir adalah pelatihan pembuatan website, yang bertujuan sebagai platform untuk berbagi informasi tentang kegiatan kelompok usaha kerajinan ini kepada masyarakat luas, serta sebagai alat pemasaran produk mereka. Hal ini akan memperluas jangkauan pemasaran, baik secara konvensional maupun melalui internet.

Metode yang digunakan dalam lbm ini adalah:

1. Metode ceramah dan tanya jawab
2. Metode demonstrasi.

Alat yang digunakan:

1. LCD, digunakan sebagai media untuk presentasi
2. Laptop, digunakan untuk mempraktikkan materi pelatihan
3. WiFi, digunakan untuk koneksi internet
4. Aplikasi gmail dan dasbor blogger, digunakan untuk pembuatan website blog
5. Lembar kerja pembukuan, digunakan untuk pelatihan manajemen keuangan
6. Kamera digital, digunakan mendokumentasi kegiatan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Acara pelatihan dihadiri oleh 15 peserta, termasuk Ketua RW/RT Kelurahan Karunrung dan anggota masyarakat lain yang hadir secara sukarela untuk berpartisipasi. Pelatihan ini dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 6 Agustus 2016, dan peserta terlihat sangat antusias mengikuti pelatihan ini. Keterlibatan mereka yang begitu antusias bisa dimengerti karena pelatihan ini berbasis web, dan materi yang berfokus pada internet adalah hal yang baru bagi mereka, terutama di daerah tersebut.

1. Materi Kegiatan Pertama: Forum Motivator



Gambar 9.1
Forum Motivator

Dalam forum motivator ini, kami mengundang Dr. Abdi, M.Pd, dengan pertimbangan bahwa beliau adalah seorang praktisi yang memiliki pengalaman bekerja di Balai Lingkungan Hidup di Bantaeng dan saat ini berprofesi sebagai Dosen di Unismuh Makassar. Dengan latar belakang pengalamannya tersebut, Dr. Abdi menjelaskan pentingnya menjaga lingkungan hidup. Dia juga membahas salah satu kegiatan yang dilakukan oleh ibu-ibu dalam kelompok usaha kecil, yaitu mengolah limbah plastik menjadi kerajinan tangan. Hal ini dianggap sebagai upaya terbaik untuk melindungi lingkungan dari pencemaran, karena plastik memerlukan waktu 1000 tahun untuk terurai secara alami. Waktu yang sangat lama ini akan menyebabkan partikel-partikel plastik mencemari tanah dan air tanah. Jika plastik dibakar, itu dapat menghasilkan asap beracun yang berbahaya bagi kesehatan manusia, seperti dioksin, yang dapat menyebabkan penyakit seperti kanker, hepatitis, pembengkakan hati, gangguan sistem saraf, dan depresi. Selain itu, plastik juga menjadi penyebab banjir karena menyumbat

saluran air dan tanggul, yang pada gilirannya merusak infrastruktur, termasuk turbin waduk.

Mengingat dampak pencemaran limbah plastik yang besar, pemerintah saat ini berupaya keras untuk mendorong masyarakat untuk bersama-sama mendaur ulang sampah, terutama sampah plastik. Kegiatan yang dilakukan oleh ibu-ibu dalam mendaur ulang limbah plastik dari kemasan minuman harus diteruskan dan dikembangkan karena ini akan berdampak pada penyelamatan lingkungan. Jika usaha kecil ini dikelola dengan baik, maka di masa depan akan memiliki prospek yang cerah dan akan berkontribusi pada peningkatan pendapatan para anggotanya. Pemaparan di atas merupakan ringkasan dari materi yang disampaikan oleh Dr. Abdi dalam forum motivator tersebut.

2. Materi Kegiatan Kedua: Pelatihan Manajemen Keuangan (Pembukuan)

a. Materi Teori

KEUANGAN USAHA KECIL

Sebagian besar entrepreneur atau pengusaha lebih fokus pada ide-ide bisnis mereka dan sering mengabaikan pentingnya manajemen keuangan, mereka cenderung beranggapan bahwa aspek ini akan berjalan dengan sendirinya. Mereka berkeyakinan bahwa jika bisnis mereka baik, maka keuangan akan mengikuti dengan baik pula, dan jika usaha mereka menghasilkan keuntungan, uang akan secara otomatis mengalir masuk.

Pandangan ini memiliki kebenaran dalam beberapa aspek, namun juga dapat menyesatkan. Memang benar bahwa sumber utama pendapatan bisnis berasal dari penjualan dan keuntungan. Namun, bisnis tidak hanya tentang cara menghasilkan uang, tetapi juga tentang bagaimana mengelola, mengendalikan, dan mengalokasikan uang tersebut.

Manajemen keuangan tidak hanya sebatas pengaturan uang tunai dan aset, melainkan lebih dari itu, manajemen keuangan mencakup bagaimana Anda mengelola kekayaan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan, dan bagaimana Anda memanfaatkan sumber-sumber modal untuk membiayai operasional bisnis. Oleh karena itu, prinsip-prinsip dasar manajemen keuangan tetap penting, bahkan bagi pengusaha kecil dan menengah. Berikut adalah beberapa prinsip dasar manajemen keuangan yang relevan bagi UKM.

1) Pisahkan uang pribadi dan usaha

Kesalahan yang sering terjadi di kalangan pengusaha UKM dalam mengelola keuangan adalah mencampuradukkan dana usaha dengan dana pribadi. Terkadang, ini mungkin disebabkan oleh ukuran usaha yang masih kecil, sehingga pemiliknya merasa tidak masalah jika uang usaha dan uang pribadi bercampur. Namun, dalam banyak kasus, sulit untuk membedakan antara pengeluaran pribadi dan pengeluaran usaha. Hasilnya, kebutuhan pribadi secara perlahan mulai mengurangi saldo dana usaha.

Solusi terbaik adalah memisahkan uang secara fisik. Anda dapat menggunakan dua kotak atau amplop berbeda, atau dompet terpisah untuk menyimpan dana usaha dan pribadi. Jika memungkinkan, lebih baik lagi jika Anda menggunakan layanan perbankan. Anda dapat membuka rekening bank yang khusus digunakan untuk keperluan bisnis Anda. Yang paling penting, Anda harus disiplin dalam menjaga pemisahan ini agar tetap efektif.

2) Rencanakan penggunaan uang

Terlepas dari seberapa besar modal yang Anda miliki, penting untuk merencanakan pengeluaran uang dengan bijak. Tidak bijak jika Anda menghambur-hamburkan uang, bahkan jika saldo kas Anda tampak berlebihan. Tanpa perencanaan yang cermat, Anda berisiko menemukan diri Anda dalam situasi kekurangan dana. Sebaiknya, selalu sesuaikan rencana pengeluaran Anda dengan target penjualan dan penerimaan kas yang Anda tetapkan. Pertimbangkan untuk membatalkan rencana pengeluaran modal jika tidak memberikan manfaat yang jelas dalam meningkatkan penjualan atau mengurangi biaya. Lakukan analisis "cost and benefit" atau "untung rugi" untuk memastikan bahwa penggunaan uang Anda akan menghasilkan hasil yang menguntungkan dan tidak sia-sia.

3) Buat buku catatan keuangan

Bisnis tidak dapat dijalankan berdasarkan ingatan semata, tetapi memerlukan pencatatan yang teliti. Setidaknya, Anda harus memiliki buku kas yang mencatat semua transaksi keuangan. Setiap hari, selaraskan saldo uang Anda dengan catatan transaksi untuk mengendalikan aliran uang dan memastikan tidak ada yang terselip atau hilang. Selanjutnya, tingkatkan kemampuan administrasi Anda untuk mencatat penjualan dan biaya dengan

cermat. Jangan lupa mencatat saldo hutang, piutang, persediaan, dan aset tetap Anda. Jika memungkinkan, manfaatkan sistem komputer untuk memudahkan pencatatan, bahkan lebih baik jika Anda mampu menerapkan sistem akuntansi yang memadai.

4) Menghitung Keuntungan dengan teliti

Sebagai seorang pengusaha, tugas Anda adalah menghasilkan keuntungan. Namun, penting untuk menghitung keuntungan dengan teliti. Bagian kritis dalam perhitungan keuntungan adalah menghitung biaya-biaya. Sebagian besar biaya dapat diidentifikasi karena melibatkan pembayaran tunai, sementara yang lain melibatkan transfer, penyusutan, dan amortisasi. Beberapa biaya mungkin belum terjadi namun perlu dicadangkan untuk pembayaran di masa depan, seperti pajak dan bunga pinjaman.

5) Mengelola arus kas dengan cermat

Selain fokus pada keuntungan, Anda juga perlu memperhatikan manajemen hutang, piutang, dan persediaan barang dagangan. Arus kas yang lambat bisa menjadi masalah, terutama jika pemasukan dari penjualan kredit lebih lama daripada modal yang perlu diputar, atau jika persediaan harus disimpan dalam jumlah besar. Pastikan bahwa pemasukan dari penjualan kredit sejalan dengan pembelian kredit. Selain itu, atur persediaan Anda sedemikian rupa sehingga memenuhi permintaan tanpa membebani keuangan.

6) Pemantauan harta, hutang, dan modal

Secara berkala, Anda perlu memeriksa persediaan di gudang untuk memastikan ketersediaan dan kondisi barang dagangan. Sebelum melakukan ini, pastikan bahwa Anda memiliki administrasi yang memadai untuk mengendalikan semua aspek ini. Sama pentingnya, Anda harus memantau piutang kepada pelanggan dan tagihan dari pemasok. Penting untuk menjaga catatan yang rapi agar tidak ada tagihan yang terlupakan atau pembayaran yang tertunda. Jika Anda merasa kesulitan melakukan ini sendiri, pertimbangkan untuk mempekerjakan staf keuangan dan menetapkan prosedur keuangan yang cukup untuk memastikan aset usaha Anda selalu terjaga.

7) Menyisihkan Keuntungan untuk pengembangan usaha

Sementara Anda berhak menikmati keuntungan dari bisnis Anda, Anda juga perlu menyisihkan sebagian dari keuntungan tersebut untuk pengembangan bisnis. Salah satu aspek penting dalam manajemen keuangan adalah menjaga kelangsungan bisnis dengan mengarahkan investasi ke bidang-bidang yang menguntungkan.

Ketika bisnis Anda berkembang dan semakin kompleks, manajemen keuangan akan menjadi lebih penting. Ketika bisnis melibatkan kreditor dan investor, tuntutan untuk memiliki sistem pencatatan keuangan yang baik akan semakin tinggi. Kesuksesan bisnis tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menjual, tetapi juga oleh kemampuan mengelola keuangan. Semoga tujuh tips dasar manajemen keuangan sederhana ini bermanfaat dan dapat diterapkan untuk membantu bisnis Anda.

Bagi mereka yang baru memulai usaha atau memiliki usaha kecil, sangat penting untuk mengelola keuangan dengan baik. Salah satu kesalahan yang sering dilakukan oleh pengusaha pemula adalah tidak mampu mengelola keuangan dengan baik, meskipun produk atau jasanya laku di pasaran, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kebangkrutan usaha. Berikut adalah beberapa tips sederhana dalam mengelola keuangan usaha kecil:

8) Memisahkan keuangan usaha dan pribadi

Gunakan dompet atau rekening bank yang berbeda untuk keuangan usaha dan pribadi. Jangan mencampuradukkan uang usaha dengan uang pribadi. Jika Anda perlu menggunakan dana pribadi untuk usaha, anggap itu sebagai pinjaman yang harus dikembalikan.

9) Membayar diri sendiri (*reward yourself*)

Pertimbangkan untuk membayar diri sendiri dengan cara yang terstruktur, seperti gaji bulanan atau persentase dari keuntungan bersih, jika usaha Anda mulai menghasilkan keuntungan.

10) Pencatatan keuangan yang rapi

Gunakan perangkat lunak sederhana seperti Microsoft Excel atau software serupa untuk mencatat semua transaksi keuangan. Buat laporan keuangan ringkas setiap bulan yang mencakup pemasukan, pengeluaran, pembelian, penjualan, laba kotor, laba bersih, dan lain-lain.

11) Membuat proyeksi arus kas

Hitung kebutuhan dana awal dan buat proyeksi arus kas (pemasukan dan pengeluaran) untuk memastikan bahwa modal yang Anda miliki cukup untuk menjalankan usaha selama satu tahun ke depan, dan bahkan memperkirakan berapa lama modal tersebut akan kembali. Akses Keuangan yang Lebih Baik bagi Usaha Mikro dan Kecil di Indonesia. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Indonesia.

Dalam menyampaikan materi ini, Muhammad Nur Abdi, SE., MM selaku pemateri mempresentasikannya dalam bentuk powerpoint.

a. Materi Praktek

Mitra di berikan pelatihan langsung teknik pembukuan, dengan latihan soal. Tujuan dari pelatihan pembukuan ini kelak mitra dapat menjalankan usahanya dengan pencatatan keuangan yang baik.

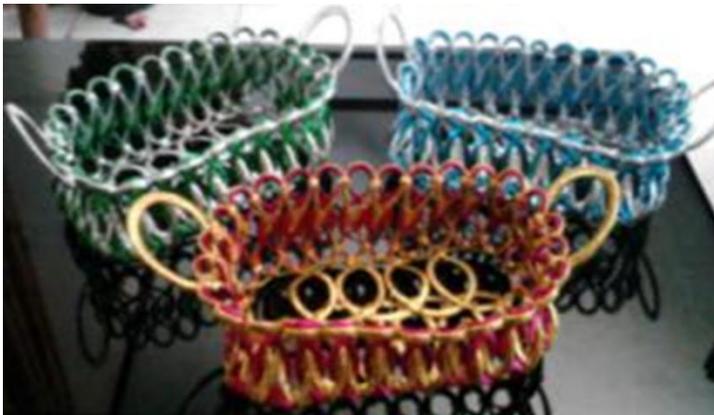


Gambar 9.2
Pelatihan Pembukuan



Gambar 9.4
Keranjang Belanja

Dengan melalui pelatihan ini maka tampilan produk diberi pelapis kawat yang memperindah tampilan model kerajinan tersebut. Tampilan untuk kerajinan tersebut dapat terlihat seperti dalam gambar berikut ini:



Gambar 9.5
Tempat Minuman Gelas dan Tempat Tissue



Gambar 9.6

Bosara (Tempat Tradisional Untuk Kue-Kue) dan Tempat Undangan

Produk berupa bosara (tempat tradisional untuk kue-kue) dan tempat undangan ini adalah hasil inovatif dari pelatihan yang dilaksanakan dalam ipteks bagi masyarakat ini. Dengan inovatif produk ini maka diharapkan secara kuantitas produk dari mitra dapat bertambah jenisnya dan diharapkan pula dapat memperluas pemasaran dari mitra.

4. Pelatihan Pembuatan Website Blog

a. Materi Teori

World Wide Web (biasa disingkat WWW) adalah suatu layanan yang memungkinkan pengguna jaringan komputer untuk berbagi informasi. Web adalah salah satu layanan yang paling populer di internet karena mendukung multimedia, yang berarti informasi dapat disampaikan dalam berbagai bentuk, seperti teks, gambar, video, dan suara (Govoni, 2012).

World Wide Web, atau yang lebih dikenal sebagai WWW atau Web, adalah layanan yang tersedia bagi pengguna komputer yang terhubung ke internet. Web ini digunakan untuk menyajikan berbagai jenis informasi, mulai dari informasi yang ringan hingga informasi serius, termasuk informasi gratis dan komersial. Sebuah situs web atau website adalah kumpulan halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi dalam berbagai bentuk, seperti teks, gambar diam atau bergerak, animasi, suara, atau gabungan dari

semuanya. Halaman-halaman ini membentuk struktur terhubung yang saling berinteraksi melalui hyperlink (tautan).

Dalam <http://raghibnuruddin217.blogspot.co.id>, dijelaskan beberapa definisi tentang website:

- Menurut Suwanto Raharjo S.Si, M.Kom, Web adalah layanan internet yang paling umum digunakan dibandingkan dengan layanan lain seperti ftp, gopher, berita, atau bahkan email.
- Menurut Wahana Komputer, Web adalah bentuk komunikasi interaktif yang digunakan di jaringan komputer.
- Menurut A. Taufiq Hidayatullah, Web adalah bagian yang paling terlihat dari jaringan internet global.
- Menurut Haer Talib, Web adalah lokasi di internet yang memiliki nama dan alamat.
- Menurut Boone (Thomson), Web adalah koleksi sumber informasi berbasis grafis yang saling terhubung di internet yang lebih besar.
- Menurut Feri Indayudha, Web adalah program yang mampu memuat konten seperti film, gambar, suara, dan musik yang ditampilkan di internet.
- Menurut Yuhefizar, Web adalah metode untuk menampilkan informasi di internet dalam berbagai bentuk, termasuk teks, gambar, suara, dan video. Hal ini juga memungkinkan hyperlink (tautan) yang menghubungkan satu dokumen dengan dokumen lainnya untuk akses melalui peramban (browser).

❖ **Cara Kerja Web**

Adapun cara kerja web adalah sebagai berikut:

- 1) web page adalah tempat penyimpanan Informasi web dalam bentuk dokumen
- 2) Halaman web tersebut disimpan dalam computer server web.
- 3) Sementara di pihak pemakai ada computer yang bertindak sebagai computer client dimana ditempatkan program untuk membaca halaman web yang ada di server web (browser).
- 4) Browser membaca halaman web yang ada di server web.

Secara umum, memiliki sebuah website memberikan tiga keuntungan atau manfaat yang signifikan, baik untuk individu, bisnis, maupun lembaga seperti sekolah dan instansi pemerintah. Berikut adalah tiga manfaat utama:

- 1) Membangun Brand dan Reputasi Ketersediaan informasi yang lengkap dan mudah diakses melalui website dapat meningkatkan citra profesional bisnis Anda di mata konsumen atau calon konsumen, dan dengan demikian, reputasi bisnis Anda akan terangkat.
- 2) Media Promosi dan Transaksi 24 Jam Website memungkinkan promosi dan transaksi secara otomatis selama 24 jam sehari, setiap hari dalam seminggu. Ini membuka peluang untuk mendapatkan konsumen baru tanpa mengganggu aktivitas Anda yang lain.
- 3) Menjadi Aset Virtual Bisnis Anda Seperti halnya apa pun yang menghasilkan pendapatan, website dianggap sebagai aset. Dengan website, nilai bisnis Anda juga meningkat.

Lebih lanjut, berikut penjelasan lebih rinci tentang manfaat dari memiliki sebuah website:

- 1) Menciptakan Kesan Profesional Website membantu meningkatkan kesan profesional yang ditampilkan oleh bisnis Anda. Ini sebanding dengan perbedaan antara berbelanja di pasar tradisional dan mal, di mana lingkungan yang modern dan rapi menunjukkan tingkat profesionalisme yang lebih tinggi.
- 2) Branding dengan Biaya Terjangkau Branding bisnis dapat menjadi mahal, tetapi website menyediakan alternatif yang lebih terjangkau untuk mencapai hal ini.
- 3) Meningkatkan Visibilitas Website memungkinkan bisnis Anda untuk dikenal oleh jutaan pengguna internet yang mencari informasi dan produk atau layanan yang Anda tawarkan.
- 4) Sarana Publikasi Resmi Website Anda dapat menyediakan sumber informasi resmi yang dapat membantu menghindari informasi palsu dan transaksi penipuan di internet.
- 5) Kemudahan Akses Informasi Anda tidak perlu menjelaskan rincian bisnis Anda kepada calon konsumen satu per satu. Dengan website, informasi lengkap tentang bisnis Anda tersedia untuk diakses oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja.

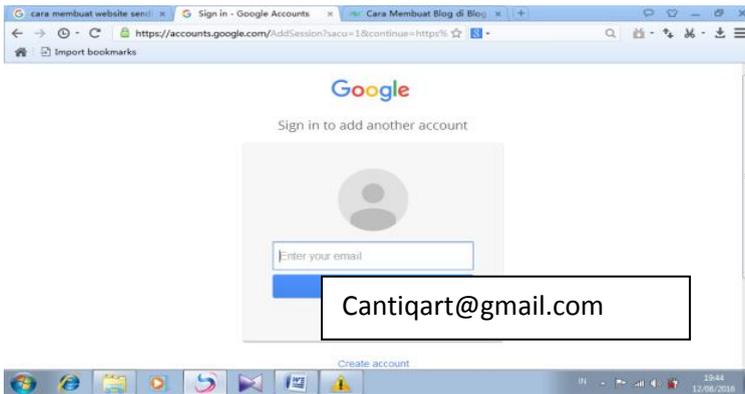
- 6) Fasilitasi Komunikasi Website dapat mencantumkan informasi kontak lengkap, memungkinkan konsumen atau calon konsumen untuk memilih cara berkomunikasi yang mereka sukai, seperti telepon, chatting, atau formulir kontak yang otomatis mengirim pesan ke alamat email Anda.
- 7) Memikat Calon Konsumen Website yang banyak dikunjungi dapat menarik perhatian calon konsumen yang dapat menghubungi Anda melalui berbagai metode komunikasi.
- 8) Menemukan Mitra Bisnis Website dapat digunakan untuk mencari mitra bisnis, memperluas jaringan, dan mengembangkan bisnis Anda lebih lanjut.
- 9) Sarana Penjualan Website Anda dapat berfungsi sebagai platform penjualan, memungkinkan pelanggan untuk melakukan transaksi pembelian barang atau jasa melalui situs Anda.
- 10) Pengumpulan Feedback dan Survey Website dapat digunakan untuk mengumpulkan saran, masukan, feedback, dan hasil survei dari konsumen, membantu perbaikan dan perkembangan bisnis Anda.

Website merupakan alat berharga dalam dunia bisnis modern yang dapat meningkatkan eksposur, kredibilitas, dan hubungan dengan konsumen serta membantu dalam pertumbuhan bisnis. Dengan website yang sesuai, bisnis Anda akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk sukses dan memenangkan persaingan di dunia maya.

b. Materi Praktek

Setelah berdiskusi dengan peserta pelatihan, atas permintaan mereka, diputuskan bahwa website yang akan dibuat adalah versi gratis menggunakan platform blogspot. Keputusan ini diambil karena para peserta masih dalam tahap pembelajaran mengenai aplikasi ini. Mereka akan mempelajari bagaimana cara masuk ke dasbor blogger dan cara mengunggah artikel, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang ingin mereka publikasikan. Dengan membuat blog gratis ini, jika suatu saat mereka sibuk dan melupakan blog mereka, tetap memungkinkan bagi publik untuk mengaksesnya. Sebaliknya, jika mereka memilih domain berbayar seperti .com, mereka harus memperbarui domain tersebut setiap tahun, dan jika mereka lupa melakukannya, secara otomatis website mereka tidak dapat diakses lagi. Oleh

karena itu, mitra lebih memilih untuk menggunakan blog gratis dan akan mengevaluasi perkembangannya selama 3 bulan pertama. Dalam tahap awal pembuatan blog ini, mitra akan membuat alamat email (Gmail) untuk para peserta. Caranya adalah dengan memilih opsi "Create Account" seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini:



Selanjutnya akan muncul Tampilan seperti berikut ini :



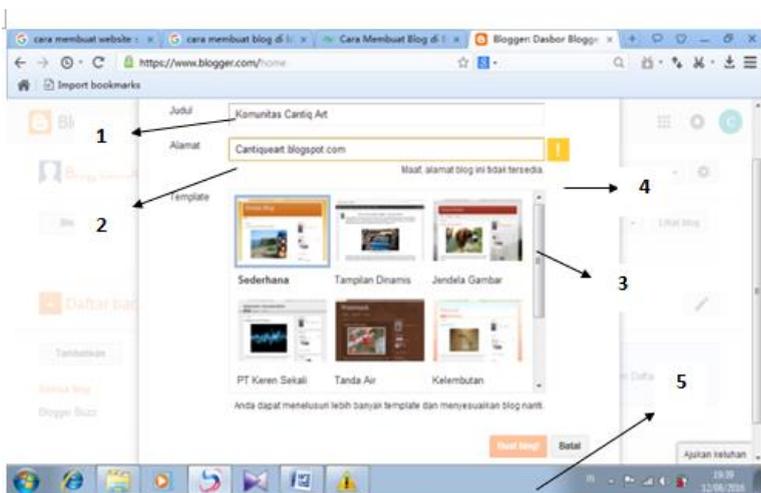
Setelah login kita akan menghadapi pilihan untuk menggunakan identitas, kita dapat memilih profil Google plus atau menggunakan profil Blogspot. Lebih di sarankan memilih profil Google plus.

Silahkan tekan tombol **"Lanjutkan ke Blogger "**.

Setelah itu kita akan melihat halaman membuat blog di blogspot seperti gambar berikut. Pada halaman ini kita akan melihat daftar blog yang telah dibuat, karena kita baru akan memulai dalam membuat blog maka kita belum melihat daftar blog tersebut, untuk memulai membuat blog silahkan klik tombol **" Blog Baru "**.



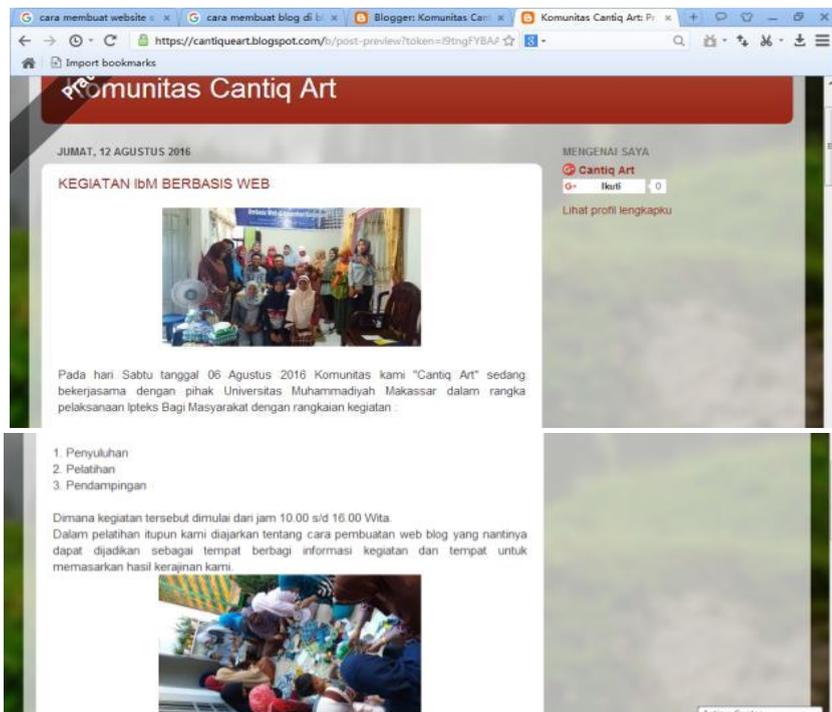
Selanjutnya akan muncul menu berikut untuk diisi sesuai selera pembuat web blog.

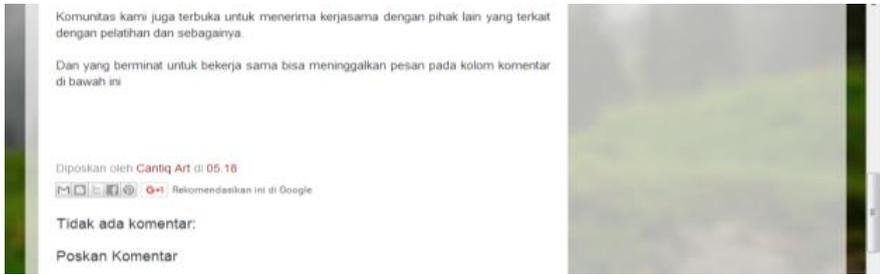


Keterangan nomor pada gambar:

- Nomor 1 adalah tempat kita untuk memberi judul atau nama blog
- Nomor 2 adalah tempat kita untuk memberi alamat blog kita
- Nomor 3 adalah tempat kita untuk memilih template blog kita, kita bisa merubahnya nanti pada halaman template, jadi untuk sementara pilih saja yang standar
- Nomor 4 merupakan keterangan alamat blog yang kita ketik tersedia atau tidak, pastikan alamat blog tersedia.
- Nomor 5 adalah tombol untuk mengakhiri, tekan tombol ini jika anda sudah merasa puas dengan nama dan alamat yang anda pilih.

Setelah memilih tombol “Buat Blog”. Maka kita telah berhasil membuat web blognya, dan tampilan web blog mitra yang dilihat dari Pratinjau adalah sebagai berikut:





Demikianlah pelatihan tentang pembuatan website blog, dengan menghasilkan web blog yang berjudul “www. Cantiqueart.blogspot.com”.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmat, Z. (2009). *Merancang Pelatihan Yang Efektif*. 5(2), 177. Retrieved from <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/psikologi/article/download/36003/18679>
- Adawiyah, E. (2020). *Kemiskinan_Dan_Penyebabnya*. 1(April), 43–50.
- Adikara, G. J., Kurnia, N., Adhrianti, L., Astuty, S., Wijayanto, X. A., Desiana, F., & Astuti, S. I. (2021). *Aman bermedia digital* (I; G. J. Adikara & N. Kurnia, eds.). Retrieved from <https://literasidigital.id/books/modul-aman-bermedia-digital/>
- Astuti, S. I., Prananingrum, E. N., Astuti, S. I., Prananingrum, E. N., Ratri, L., Nurhajati, L., ... Kurnia, N. (2021). *Budaya bermedia digital*. Retrieved from <http://literasidigital.id/books/modul-budaya-bermedia-digital/>
- Agusintadewi, N. K., Muktiwibowo, A. K., Manik, I. W. Y., Pebriyanti, N. L. P. E., & Wiryawan, I. W. (2022). Pendampingan Kegiatan Prarancangan Sentra Produksi Anyaman Bambu sebagai Pendorong Ekonomi Perdesaan Desa Kayubih, Bangli. *Wikrama Parahita : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 1–10. <https://doi.org/10.30656/jpmwp.v6i1.3713>
- Baskoro, D. A., Maipita, I., Fitrawaty, F., & Dongoran, F. R. (2023). Digitalisasi Sistem Informasi dan Administrasi Desa Sebagai Upaya Menuju Desa Cerdas di Desa Kolam, Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Sumatera Utara. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(3), 624–635. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v7i3.14339>
- Dewanto, I. Joko. (2006). *Web Desain (Metode Aplikasi dan Implementasi)*. Yogyakarta: Graha Ilmu. <http://www.sambureki.comhttp://raghibnuruddin217.blogspot.co.id>
- Govoni, N. A. (2012). World Wide Web (WWW). *Dictionary of Marketing Communications*, 1–7. <https://doi.org/10.4135/9781452229669.n3973>
- Haris, A. (2014). Melalui Pemanfaatan Media Informasi. *Melalui Pemanfaatan Media Informasi, XIV* (1), 66–71.
- Hendra Hamid, M. S. (2018). Manajemen Pemberdayaan Masyarakat. In *De La Macca* (Vol. 1, Issue 1).
- Haerana, Tahir, N., Fatmawada, & Harakan, A. (2022). *Pelatihan Pengolahan Limbah Plastik Minuman Kemasan Menjadi Kerajinan Tangan*. 241–250.

- Retrieved from <https://ejournal.lppmunsera.org/index.php/parahita/authorDashboard/submission/3791>
- Haerana. (2021). *Dinamika Administrasi Publik* (I; R. N. Revisa, ed.). Bukit Kili, Koto Baru, Kubung, Solok Sumatra Barat: Mitra Cendekia Media.
- Haerana, Abdi, & Amartiwi, I. (2019). *IbM Pelatihan Teknik Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis*. 1(April), 21–35. Retrieved from <http://journal.ildikti9.id/JCPKM/article/view/57>
- Herlina S, D. (2014). *Membangun Karakter Bangsa Melalui Literasi Digital*. 55, 3909. Retrieved from <http://staffnew.uny.ac.id/upload/132309682/pengabdian/membangun-karakter-bangsa-melalui-literasi-digital.pdf>
- Maryani dkk, 2019. *Pemberdayaan Masyarakat*. Deepublish Publisher. Yogyakarta.
https://books.google.co.id/books?id=67nHDwAAQBAJ&pg=PA24&hl=id&source=gbs_selected_pages&cad=1#v=onepage&q&f=false
- Hendri, R., & Yulinda, E. (2019). Optimalisasi Pemanfaatan Media Sosial Untuk Meningkatkan Pemasaran Produk Olahan Ikan di Desa Hangtuh Kabupaten Kampar Provinsi Riau. *Journal of Rural and Urban Community Empowerment*, 1(1), 51–60.
- Heri, Mappamiring, & Mahsyar, A. (2015). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kerajinan Anyaman Bambu Di Desa Sawakong Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar. *Digilibadmin Unismuh*, 53(9), 1689–1699. Retrieved from https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/94-Full_Text.pdf
- Isbandi R. Adi. 2008. *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Achmat, Z. (2009). *Merancang Pelatihan Yang Efektif*. 5(2), 177. Retrieved from <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/psikologi/article/download/36003/18679>
- Adawiyah, E. (2020). *Kemiskinan Dan Penyebabnya*. 1(April), 43–50.
- Adikara, G. J., Kurnia, N., Adhrianti, L., Astuty, S., Wijayanto, X. A., Desiana, F., & Astuti, S. I. (2021). *Aman bermedia digital* (I; G. J. Adikara & N. Kurnia, eds.). Retrieved from <https://literasidigital.id/books/modul-aman-bermedia-digital/>
- Agusintadewi, N. K., Muktiwibowo, A. K., Manik, I. W. Y., Pebriyanti, N. L. P. E., & Wiryawan, I. W. (2022). Pendampingan Kegiatan Prarancangan Sentra Produksi Anyaman Bambu sebagai Pendorong Ekonomi Perdesaan Desa

- Kayubihi, Bangli. *Wikrama Parahita: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 1–10. <https://doi.org/10.30656/jpmwp.v6i1.3713>
- Ahmad Syamsu Rijal. (2020). Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Web Untuk Meningkatkan Kreativitas Guru. *Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Volume 6 N(1)*, 1–9. <https://doi.org/10.32884/ideas.v6i1.238>
- Astuti, S. I., Prananingrum, E. N., Astuti, S. I., Prananingrum, E. N., Ratri, L., Nurhajati, L., ... Kurnia, N. (2021). *Budaya bermedia digital*. Retrieved from <http://literasidigital.id/books/modul-budaya-bermedia-digital/>
- Baskoro, D. A., Maipita, I., Fitrawaty, F., & Dongoran, F. R. (2023). Digitalisasi Sistem Informasi dan Administrasi Desa Sebagai Upaya Menuju Desa Cerdas di Desa Kolam, Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Sumatera Utara. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(3), 624–635. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v7i3.14339>
- Hadiyanti, P. (2008). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keterampilan Produktif Di Pkbm Rawasari, Jakarta Timur. *Perspektif Ilmu Pendidikan*, 17(IX), 90–99. <https://doi.org/10.21009/pip.171.10>
- Haerana. (2021). *Dinamika Administrasi Publik* (I; R. N. Revisa, ed.). Retrieved from <https://library.unismuh.ac.id/opac/detail-opac?id=106792>
- Haerana, Tahir, N., Fatmawada, & Harakan, A. (2022). *Pelatihan Pengolahan Limbah Plastik Minuman Kemasan Menjadi Kerajinan Tangan*. 241–250. Retrieved from <https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/parahita/authorDashboard/submission/3791>
- Haris, A. (2014). Melalui Pemanfaatan Media Informasi. *Melalui Pemanfaatan Media Informasi*, XIV (1), 66–71.
- Hendri, R., & Yulinda, E. (2019). Optimalisasi Pemanfaatan Media Sosial Untuk Meningkatkan Pemasaran Produk Olahan Ikan di Desa Hangtuah Kabupaten Kampar Provinsi Riau. *Journal of Rural and Urban Community Empowerment*, 1(1), 51–60.
- Heri, Mappamiring, & Mahsyar, A. (2015). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kerajinan Anyaman Bambu Di Desa Sawakong Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar. *Digilibadmin Unismuh*, 53(9), 1689–1699. Retrieved from https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/94-Full_Text.pdf
- Herlina S, D. (2014). *Membangun Karakter Bangsa Melalui Literasi Digital*. 55, 3909. Retrieved from <http://staffnew.uny.ac.id/upload/132309682/pengabdian/membangun-karakter-bangsa-melalui-literasi-digital.pdf>
- Indrayani, E. (2016). *e-government Konsep, Implementasi dan Perkembangannya di Indonesia (Buku Literatur MK E-government)*.

- Ir. Hendra Hamid, M. S. (2018). Manajemen Pemberdayaan Masyarakat. In *De La Macca* (Vol. 1).
- Kehik, B. S. (2018). Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa di Bidang Ekonomi Kemasyarakatan. *Agrimor*, 3(1), 4–6. <https://doi.org/10.32938/ag.v3i1.315>
- Khairani, S., & Pratiwi, R. (2018). Peningkatan Omset Penjualan Melalui Diversifikasi Produk dan Strategi Promosi Pada UMKM Kerajinan Souvenir Khas Palembang. *CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 36–43. <https://doi.org/10.31960/caradde.v1i1.18>
- Kurniadi, D. (2007). *Prinsip Prinsip Dasar Manajemen Pelatihan*. 1–46. Retrieved from http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_BIASA/195603221982031-DEDY_KURNIADI/ULASAN/Pelatihan_Kajian_Mandiri.pdf
- Kusumastuti, F., Astuti, S. I., Astuti, Y. D., Birowo, M. A., Esti, L., Hartanti, P., ... Kurnia, N. (2021). *Modul Etis bermedia digital*. Retrieved from <http://literasidigital.id/books/modul-etis-bermedia-digital/>
- Mochamad Mas'ud. (2017). Pemanfaatan Teknologi Sistem Informasi untuk Meningkatkan Penjualan Hasil Produk UMKM Logam di Kota Pasuruan. *Engagement: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 185–197. <https://doi.org/10.29062/engagement.v1i2.14>
- Monggilo, Z. M. Z. (2021). *Cakap Bermedia Digital*. Retrieved from <http://literasidigital.id/books/modul-cakap-bermedia-digital/>
- Mukti, T. A., & Ahmadi, S. (2022). Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Mikro Melalui Peningkatan Pemasaran Produk Secara Online. *Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat*, 1634–1640. <https://doi.org/10.18196/ppm.44.592>
- Munawar, N. (2011). Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah CIVIS*, 1(2), 87–99.
- Musabry, Burhanuddin, & Haerana. (2021). Inovasi Pelayanan Pada Pembuatan Akte Kelahiran Dan Akte Kematian Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar. *Kajian Ilmiah ...*, 2(April). Retrieved from <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/view/3756>
- Mustofa, M. L. (2012). *Monitoring dan Evaluasi: Konsep dan Penerapannya bagi Pembinaan Mahasiswa*.
- Nasrullah, R. (2017). *MATERI PENDUKUNG: Literasi Digital* (L. A. Mayani, ed.). Jakarta Timur: TIM GLN Kemendikbud.
- Nugrahaningsih, P., Hanggana, S., Murni, S., Hananto, S. T., Asrihapsari, A., Syafiqurrahman, M., ... Hantoro, S. (2021). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN DAN PEMASARAN DIGITAL PADA BUMDes BLULUKAN GEMILANG. *Kumawula: Jurnal*

- Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 8.
<https://doi.org/10.24198/kumawula.v4i1.29574>
- Nuraini, M. I. M. (2018). *KETIMPANGAN SOSIAL SEBAGAI DAMPAK PERUBAHAN SOSIAL DITENGAH GLOBALISASI*. Retrieved from [https://repositori.kemdikbud.go.id/19432/1/Kelas XII_Sosiologi_KD 3.3.pdf](https://repositori.kemdikbud.go.id/19432/1/Kelas_XII_Sosiologi_KD_3.3.pdf)
- Purwanto, E. A. (2007). Mengkaji Potensi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk pembuatan Kebijakan Anti Kemiskinan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 10(3), 295–324.
- Rahayu, S., Muhairah, N. Al, & Nazipawati. (2021). Pemanfaatan Digital Marketing Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada Masa Pandemi COVID-19. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 5(5), 2217–2230. Retrieved from <http://journal.ummat.ac.id/index.php/jmm/article/view/5248/3099>
- Reskiaddin, L. O., Yulia Anhar², V., Sholikah, S., & Wartono, W. (2020). Tantangan Dan Hambatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengendalian Penyakit Tidak Menular di Daerah Semi-Perkotaan: Sebuah Evidence Based Practice di Padukuhan Samirono, Sleman Yogyakarta. *Jurnal Kesmas Jambi*, 4(2), 43–49. <https://doi.org/10.22437/jkmj.v4i2.10569>
- Rizki Indrawan. (2023). Implementation of Digital Marketing Strategy and Preparation of Financial Reports for Oti Snack & Catering UMKM in Cimahi City. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(2), 533–541. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v7i2.13848>
- Rukayat, Y. (2017). Kualitas pelayanan publik bidang administrasi kependudukan di kecamatan pasirjambu. *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi (JIMIA)*, 11(2), 56–65. Retrieved from <http://jurnal.unnur.ac.id/index.php/jimia/article/view/32/12>
- Saputro, A. E., & Hastomo, W. (2020). *Edukasi Perencanaan Keuangan Bagi Calon Pemegang ke Jepang*. 3(1), 116–122. Retrieved from <https://journal.ilinstitute.com/index.php/caradde/article/view/483/328>
- Saripuddin, D. (2021). *ABDI: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*. 3(1). Retrieved from <http://abdi.ppj.unp.ac.id/index.php/abdi/article/view/76/41>
- Satria, C., & Nofiansyah, D. (2021). Tehnik Penyusunan Rencana Usaha Kecil Menengah (Ukm) Komunitas Perempuan Kepala Rumah Tangga (Pekka) Masjid Agung Palembang. *AKM: Aksi Kepada Masyarakat*, 1(2), 19–32. <https://doi.org/10.36908/akm.v1i2.185>
- Septiani, A., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2022). Mengatasi Dan Menyikapi

- Kesenjangan Sosial Dengan Menggunakan Penerapan Ekonomi Syariah. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 15(1), 140–148. <https://doi.org/10.46306/jbbe.v15i1.130>
- Sujarwo. (2021). *Model dan pendekatan pemberdayaan masyarakat: Sebuah kajian teoretis*.
- Sumarno, Gimin, Mujiono, & Pernantah, P. S. (2020). *Pembinaan diversifikasi produk untuk pengembangan usaha mikro*. 27(4), 366–373. Retrieved from <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jpkm/article/download/27003/pdf>
- Sutangsa, & Endang, S. (2023). *Perencanaan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran Di Kabupaten Subang: Sebuah Tinjauan*. 4(1), 330–342. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/369779471_PERENCANAAN_PEMBERDAYAAN_MASYARAKAT_MELALUI_PEMBENTUKAN_RELAWAN_PEMADAM_KEBAKARAN_DI_KABUPATEN_SUBANG_SEBUAH_TINJAUAN
- Tanjung, M. Z. (2017). PERANAN DINAS SOSIAL DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Pemberdayaan Perempuan Melalui Program UEP-KM di Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung). *UIN Raden Intan Lampung*.
- Tanjung, Y., Saputra, S., & Hardiyanto, S. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Penggunaan Media Sosial Untuk Pemasaran Produk Inovasi Jeruk Siam. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 5(6), 3091–3103. Retrieved from <http://journal.ummat.ac.id/index.php/jmm/article/view/5435/pdf>
- Utami, M. A. (2020). *Peningkatan Literasi Media Digital Sebagai Langkah Edukasi New Normal Di Masa Pandemi*. Retrieved from https://kkn.unnes.ac.id/lapknunnes/32004_3329052011_6_DesaSridadi_20200921_103508.pdf
- Kusumastuti, F., Astuti, S. I., Astuti, Y. D., Birowo, M. A., Esti, L., Hartanti, P., ... Kurnia, N. (2021). *Modul Etis bermedia digital*. Retrieved from <http://literasidigital.id/books/modul-etis-bermedia-digital/>
- Kehik, B. S. (2018). Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa di Bidang Ekonomi Kemasyarakatan. *Agrimor*, 3(1), 4–6. <https://doi.org/10.32938/ag.v3i1.315>
- Khairani, S., & Pratiwi, R. (2018). Peningkatan Omset Penjualan Melalui Diversifikasi Produk dan Strategi Promosi Pada UMKM Kerajinan

- Souvenir Khas Palembang. *CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 36–43. <https://doi.org/10.31960/caradde.v1i1.18>
- LAPOR! - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat <https://lapor.go.id/>. Di akses pada tanggal 06 November 2017
- Mansur. 2022. Pemberdayaan Masyarakat: Konsep dan Strategi. https://www.researchgate.net/publication/361611930_Pemberdayaan_Masyarakat_Konsep_dan_Strategi
- Mustofa, M. L. (2012). *Monitoring dan Evaluasi: Konsep dan Penerapannya bagi Pembinaan Kemahasiswaan* (Issue 1).
- Munawar, N. (2011). Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah CIVIS*, 1(2), 87–99.
- Mukti, T. A., & Ahmadi, S. (2022). Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Mikro Melalui Peningkatan Pemasaran Produk Secara Online. *Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat*, 1634–1640. <https://doi.org/10.18196/ppm.44.592>
- Monggilo, Z. M. Z. (2021). *Cakap Bermedia Digital*. Retrieved from <http://literasidigital.id/books/modul-cakap-bermedia-digital/>
- Musabry, Burhanuddin, & Haerana. (2021). Inovasi Pelayanan Pada Pembuatan Akte Kelahiran Dan Akte Kematian Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar. *Kajian Ilmiah ...*, 2(April). Retrieved from <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/view/3756>
- M. Noor. 2011. Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah CIVIS*. <https://journal.upgris.ac.id/index.php/civis/article/view/591/541>
- Nasrullah, R. (2017). *MATERI PENDUKUNG: Literasi Digital* (L. A. Mayani, ed.). Jakarta Timur: TIM GLN Kemendikbud.
- Nugrahaningsih, P., Hanggana, S., Murni, S., Hananto, S. T., Asrihapsari, A., Syafiqurrahman, M., ... Hantoro, S. (2021). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN DAN PEMASARAN DIGITAL PADA BUMDes BLULUKAN GEMILANG. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 8. <https://doi.org/10.24198/kumawula.v4i1.29574>
- Purwanto, E. A. (2007). Mengkaji Potensi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk pembuatan Kebijakan Anti Kemiskinan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 10(3), 295–324.
- Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis E-Government <https://media.neliti.com/media/publications/28623>. Di akses tanggal 8 November 2017
- Rachmawati. [Online]. Tersedia: http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/527/jbptunikompp-gdl-rachmawati-26318-5-unikom_r-i.pdf. [29 September 2012, 17.35 WIB].

- Rahayu, S., Muhairah, N. Al, & Nazipawati. (2021). Pemanfaatan Digital Marketing Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada Masa Pandemi COVID-19. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 5(5), 2217–2230. Retrieved from <http://journal.ummat.ac.id/index.php/jmm/article/view/5248/3099>
- Rizki Indrawan. (2023). Implementation of Digital Marketing Strategy and Preparation of Financial Reports for Oti Snack & Catering UMKM in Cimahi City. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(2), 533–541. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v7i2.13848>
- Rukayat, Y. (2017). Kualitas pelayanan publik bidang administrasi kependudukan di kecamatan pasirjambu. *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi (JIMIA)*, 11(2), 56–65. Retrieved from <http://jurnal.unnur.ac.id/index.php/jimia/article/view/32/12>
- Saputro, A. E., & Hastomo, W. (2020). *Edukasi Perencanaan Keuangan Bagi Calon Pemegang ke Jepang*. 3(1), 116–122. Retrieved from <https://journal.ilinstitute.com/index.php/caradde/article/view/483/328>
- Saripuddin, D. (2021). *ABDI: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*. 3(1). Retrieved from <http://abdi.pjj.unp.ac.id/index.php/abdi/article/view/76/41>
- Satria, C., & Nofiansyah, D. (2021). Teknik Penyusunan Rencana Usaha Kecil Menengah (Ukm) Komunitas Perempuan Kepala Rumah Tangga (Pekka) Masjid Agung Palembang. *AKM: Aksi Kepada Masyarakat*, 1(2), 19–32. <https://doi.org/10.36908/akm.v1i2.185>
- Sumarno, Gimin, Mujiono, & Pernantah, P. S. (2020). *Pembinaan diversifikasi produk untuk pengembangan usaha mikro*. 27(4), 366–373. Retrieved from <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jpkm/article/download/27003/pdf>
- Saleh, Abdul Rahman. (2010). *Membangun Perpustakaan Digital: Step by Step*. Jakarta: Sagung Seto.
- Saputro, Hendra W. (2007). Pengertian Website dan Unsur-unsurnya. [Online]. Tersedia: <http://www.balebengong.net/topik/teknologi/2007/08/01/pengertian-website-dan-unsur-unsurnya.html>. [29 September 2012, 17.30 WIB].
- Septiani, A., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2022). Mengatasi Dan Menyikapi Kesenjangan Sosial Dengan Menggunakan Penerapan Ekonomi Syariah. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 15(1), 140–148. <https://doi.org/10.46306/jbbe.v15i1.130>

- Suyanto, Asep Herman. (2007). *Step by Step: Web Design Theory and Practices*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Sujarwo. (2021). *Model dan pendekatan pemberdayaan masyarakat: Sebuah kajian teoretis*.
- Tanjung, M. Z. (2017). PERANAN DINAS SOSIAL DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Pemberdayaan Perempuan Melalui Program UEP-KM di Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung). *UIN Raden Intan Lampung*.
<http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/1169>
- Tanjung, Y., Saputra, S., & Hardiyanto, S. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Penggunaan Media Sosial Untuk Pemasaran Produk Inovasi Jeruk Siam. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 5(6), 3091–3103. Retrieved from <http://journal.ummat.ac.id/index.php/jmm/article/view/5435/pdfAchmat>
- at, Z. (2009). *Merancang Pelatihan Yang Efektif*. 5(2), 177. Retrieved from <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/psikologi/article/download/36003/18679>
- Adawiyah, E. (2020). *Kemiskinan_Dan_Penyebabnya*. 1(April), 43–50.
- Adikara, G. J., Kurnia, N., Adhrianti, L., Astuty, S., Wijayanto, X. A., Desiana, F., & Astuti, S. I. (2021). *Aman bermedia digital* (I; G. J. Adikara & N. Kurnia, eds.). Retrieved from <https://literasidigital.id/books/modul-aman-bermedia-digital/>
- Agusintadewi, N. K., Muktiwibowo, A. K., Manik, I. W. Y., Pebriyanti, N. L. P. E., & Wiryawan, I. W. (2022). Pendampingan Kegiatan Prarancangan Sentra Produksi Anyaman Bambu sebagai Pendorong Ekonomi Perdesaan Desa Kayubih, Bangli. *Wikrama Parahita: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 1–10. <https://doi.org/10.30656/jpmwp.v6i1.3713>
- Ahmad Syamsu Rijal. (2020). Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Web Untuk Meningkatkan Kreativitas Guru. *Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Volume 6 N(1)*, 1–9. <https://doi.org/10.32884/ideas.v6i1.238>
- Astuti, S. I., Prananingrum, E. N., Astuti, S. I., Prananingrum, E. N., Ratri, L., Nurhajati, L., ... Kurnia, N. (2021). *Budaya bermedia digital*. Retrieved from <http://literasidigital.id/books/modul-budaya-bermedia-digital/>
- Baskoro, D. A., Maipita, I., Fitrawaty, F., & Dongoran, F. R. (2023). Digitalisasi Sistem Informasi dan Administrasi Desa Sebagai Upaya Menuju Desa Cerdas di Desa Kolam, Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Sumatera Utara. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(3), 624–635. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v7i3.14339>

- Hadiyanti, P. (2008). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keterampilan Produktif Di Pkbn Rawasari, Jakarta Timur. *Perspektif Ilmu Pendidikan*, 17(IX), 90–99. <https://doi.org/10.21009/pip.171.10>
- Haerana. (2021). *Dinamika Administrasi Publik* (I; R. N. Revisa, ed.). Retrieved from <https://library.unismuh.ac.id/opac/detail-opac?id=106792>
- Haerana, Tahir, N., Fatmawada, & Harakan, A. (2022). *Pelatihan Pengolahan Limbah Plastik Minuman Kemasan Menjadi Kerajinan Tangan*. 241–250. Retrieved from <https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/parahita/authorDashboard/submission/3791>
- Haris, A. (2014). Melalui Pemanfaatan Media Informasi. *Melalui Pemanfaatan Media Informasi*, XIV(1), 66–71.
- Hendri, R., & Yulinda, E. (2019). Optimalisasi Pemanfaatan Media Sosial Untuk Meningkatkan Pemasaran Produk Olahan Ikan di Desa Hangtuh Kabupaten Kampar Provinsi Riau. *Journal of Rural and Urban Community Empowerment*, 1(1), 51–60.
- Heri, Mappamiring, & Mahsyar, A. (2015). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kerajinan Anyaman Bambu Di Desa Sawakong Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar. *Digilibadmin Unismuh*, 53(9), 1689–1699. Retrieved from https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/94-Full_Text.pdf
- Herlina S, D. (2014). *Membangun Karakter Bangsa Melalui Literasi Digital*. 55, 3909. Retrieved from <http://staffnew.uny.ac.id/upload/132309682/pengabdian/membangun-karakter-bangsa-melalui-literasi-digital.pdf>
- Indrayani, E. (2016). *e-government Konsep, Implementasi dan Perkembangannya di Indonesia (Buku Literatur MK E-government)*.
- Ir. Hendra Hamid, M. S. (2018). Manajemen Pemberdayaan Masyarakat. In *De La Macca* (Vol. 1).
- Kehik, B. S. (2018). Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa di Bidang Ekonomi Kemasyarakatan. *Agrimor*, 3(1), 4–6. <https://doi.org/10.32938/ag.v3i1.1315>
- Khairani, S., & Pratiwi, R. (2018). Peningkatan Omset Penjualan Melalui Diversifikasi Produk dan Strategi Promosi Pada UMKM Kerajinan Souvenir Khas Palembang. *CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 36–43. <https://doi.org/10.31960/caradde.v1i1.18>
- Kurniadi, D. (2007). *Prinsip Prinsip Dasar Manajemen Pelatihan*. 1–46. Retrieved from http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_BIASA/195603221982031-DEDY_KURNIADI/ULASAN/Pelatihan_Kajian_Mandiri.pdf

- Kusumastuti, F., Astuti, S. I., Astuti, Y. D., Birowo, M. A., Esti, L., Hartanti, P., ... Kurnia, N. (2021). *Modul Etis bermedia digital*. Retrieved from <http://literasidigital.id/books/modul-etis-bermedia-digital/>
- Mochamad Mas'ud. (2017). Pemanfaatan Teknologi Sistem Informasi untuk Meningkatkan Penjualan Hasil Produk UMKM Logam di Kota Pasuruan. *Engagement: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 185–197. <https://doi.org/10.29062/engagement.v1i2.14>
- Monggilo, Z. M. Z. (2021). *Cakap Bermedia Digital*. Retrieved from <http://literasidigital.id/books/modul-cakap-bermedia-digital/>
- Mukti, T. A., & Ahmadi, S. (2022). Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Mikro Melalui Peningkatan Pemasaran Produk Secara Online. *Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat*, 1634–1640. <https://doi.org/10.18196/ppm.44.592>
- Munawar, N. (2011). Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah CIVIS*, 1(2), 87–99.
- Musabry, Burhanuddin, & Haerana. (2021). Inovasi Pelayanan Pada Pembuatan Akte Kelahiran Dan Akte Kematian Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar. *Kajian Ilmiah ...*, 2(April). Retrieved from <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/view/3756>
- Mustofa, M. L. (2012). *Monitoring dan Evaluasi: Konsep dan Penerapannya bagi Pembinaan Kemahasiswaan*.
- Nasrullah, R. (2017). *MATERI PENDUKUNG: Literasi Digital* (L. A. Mayani, ed.). Jakarta Timur: TIM GLN Kemendikbud.
- Nugrahaningsih, P., Hanggana, S., Murni, S., Hananto, S. T., Asrihapsari, A., Syafiqurrahman, M., ... Hantoro, S. (2021). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN DAN PEMASARAN DIGITAL PADA BUMDes BLULUKAN GEMILANG. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 8. <https://doi.org/10.24198/kumawula.v4i1.29574>
- Nuraini, M. I. M. (2018). *KETIMPANGAN SOSIAL SEBAGAI DAMPAK PERUBAHAN SOSIAL DITENGAH GLOBALISASI*. Retrieved from [https://repositori.kemdikbud.go.id/19432/1/Kelas XII_Sosiologi_KD_3.3.pdf](https://repositori.kemdikbud.go.id/19432/1/Kelas_XII_Sosiologi_KD_3.3.pdf)
- Purwanto, E. A. (2007). Mengkaji Potensi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk pembuatan Kebijakan Anti Kemiskinan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 10(3), 295–324.
- Rahayu, S., Muhairah, N. Al, & Nazipawati. (2021). Pemanfaatan Digital Marketing Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada Masa Pandemi COVID-19. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 5(5), 2217–2230. Retrieved from

- <http://journal.ummat.ac.id/index.php/jmm/article/view/5248/3099>
- Reskiaddin, L. O., Yulia Anhar², V., Sholikhah, S., & Wartono, W. (2020). Tantangan Dan Hambatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengendalian Penyakit Tidak Menular di Daerah Semi-Perkotaan: Sebuah Evidence Based Practice di Padukuhan Samirono, Sleman Yogyakarta. *Jurnal Kesmas Jambi*, 4(2), 43–49. <https://doi.org/10.22437/jkmj.v4i2.10569>
- Rizki Indrawan. (2023). Implementation of Digital Marketing Strategy and Preparation of Financial Reports for Oti Snack & Catering UMKM in Cimahi City. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(2), 533–541. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v7i2.13848>
- Rukayat, Y. (2017). Kualitas pelayanan publik bidang administrasi kependudukan di kecamatan pasirjambu. *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi (JIMIA)*, 11(2), 56–65. Retrieved from <http://jurnal.unnur.ac.id/index.php/jimia/article/view/32/12>
- Saputro, A. E., & Hastomo, W. (2020). *Edukasi Perencanaan Keuangan Bagi Calon Pemegang ke Jepang*. 3(1), 116–122. Retrieved from <https://journal.ilinstitute.com/index.php/caradde/article/view/483/328>
- Saripuddin, D. (2021). *ABDI: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*. 3(1). Retrieved from <http://abdi.ppj.unp.ac.id/index.php/abdi/article/view/76/41>
- Satria, C., & Nofiansyah, D. (2021). Tehnik Penyusunan Rencana Usaha Kecil Menengah (Ukm) Komunitas Perempuan Kepala Rumah Tangga (Pekka) Masjid Agung Palembang. *AKM: Aksi Kepada Masyarakat*, 1(2), 19–32. <https://doi.org/10.36908/akm.v1i2.185>
- Septiani, A., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2022). Mengatasi Dan Menyikapi Kesenjangan Sosial Dengan Menggunakan Penerapan Ekonomi Syariah. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 15(1), 140–148. <https://doi.org/10.46306/jbbe.v15i1.130>
- Sujarwo. (2021). *Model dan pendekatan pemberdayaan masyarakat: Sebuah kajian teoretis*.
- Sumarno, Gimin, Mujiono, & Pernantah, P. S. (2020). *Pembinaan diversifikasi produk untuk pengembangan usaha mikro*. 27(4), 366–373. Retrieved from <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jpkm/article/download/27003/pdf>
- Sutangsa, & Endang, S. (2023). *Perencanaan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran Di Kabupaten Subang: Sebuah Tinjauan*. 4(1), 330–342. Retrieved from

https://www.researchgate.net/publication/369779471_PERENCANAAN_PEMBERDAYAAN_MASYARAKAT_MELALUI_PEMBENTUKAN_RELAWAN_PEMADAM_KEBAKARAN_DI_KABUPATEN_SUBANG_SEBUAH_TINJAUAN

- Tanjung, M. Z. (2017). PERANAN DINAS SOSIAL DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Pemberdayaan Perempuan Melalui Program UEP-KM di Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung). *UIN Raden Intan Lampung*.
- Tanjung, Y., Saputra, S., & Hardiyanto, S. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Penggunaan Media Sosial Untuk Pemasaran Produk Inovasi Jeruk Siam. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 5(6), 3091–3103. Retrieved from <http://journal.ummat.ac.id/index.php/jmm/article/view/5435/pdf>
- Utami, M. A. (2020). *Peningkatan Literasi Media Digital Sebagai Langkah Edukasi New Normal Di Masa Pandemi*. Retrieved from https://kkn.unnes.ac.id/lapkknunnes/32004_3329052011_6_Desa_Sridadi_20200921_103508.pdf

Dokumen:

Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

PROFIL PENULIS

Haerana



Penulis adalah Dosen Universitas Muhammadiyah Makassar pada program studi Ilmu Administrasi Negara. Tamat S1 di Jurusan Administrasi Negara pada FISIPOL Universitas Hasanuddin; tamat pada program Akta IV di Universitas Negeri Makassar; tamat S2 pada Jurusan Administrasi Pendidikan di Universitas Negeri Makassar; tamat S3 pada Jurusan Ilmu Administrasi Publik di Universitas Negeri Makassar. Saat menjalani masa studi Program Doktorat di Universitas Negeri Makassar berhasil mendapatkan Beasiswa pada Program Peningkatan Kualitas Publikasi Internasional (PKPI) tahun 2019 dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan negara tujuan Amerika Serikat (Northern Illinois University). Penulis telah berhasil terbitkan sebuah buku berjudul Manajemen Pembelajaran Berbasis Standar Proses Pendidikan (2016). Buku referensi yang berjudul Dinamika Administrasi Publik (2021). Bookchapter: Manajemen Sumber Daya Manusia (2022). Buku referensi dengan judul Manajemen Pelayanan Publik (2022).

Fatmawati A. Mappasere



Penulis menyelesaikan pendidikan sebagai sarjana Antropologi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin pada tahun 1990. Pendidikan Magister diselesaikan pada tahun 1996 pada bidang Perencanaan dan Administrasi Lingkungan di Universitas Hasanuddin. Pendidikan Doktorat diselesaikan di Universitas Negeri Makassar pada tahun 2014 dalam bidang keilmuan Administrasi Publik. Mengabdikan sebagai dosen sejak tahun 1992 Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada tahun 2009 mendapatkan kesempatan mengikuti Sandwich Program dari DIKTI ke University of Southern Queensland, Australia. Sebagai dosen, selain melakukan tugas sebagai pengajar, penulis aktif melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Beberapa penelitian dan pengabdian baik yang pendanaan dari hibah internal perguruan tinggi maupun yang didanai oleh Kemenristek Dikti. Tahun 2015 bermitra dengan Pemerintah Kota Makassar dan JICA (*Japan International Cooperation Agency*) *Junior Expert* melakukan pendampingan

pada 25 sekolah dasar sebagai pilot project “Bank Sampah Sekolah” di Kota Makassar. Hasil kegiatan ini melahirkan buku berjudul “Gerakan Bank Sampah Sekolah”. Beberapa hasil penelitian yang juga telah tertuang dalam bentuk buku, antara lain berjudul: Model Kemitraan dalam Publik; Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kemitraan dalam Pengelolaan Sampah.

Asdar



Penulis lahir di Arallae, Kabupaten Bone, 03 Maret 1991. Gelar Sarjana diperoleh dari Universitas Muhammadiyah Makassar tahun 2013 dan Gelar Magister diperoleh dari Universitas Muslim Indonesia tahun 2017. Saat ini merupakan Dosen di Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Fatmawada S



Penulis menyelesaikan pendidikan sebagai sarjana Pendidikan Administrasi Perkantoran di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar pada tahun 2013. Pendidikan Magister diselesaikan pada tahun 2016 pada bidang Pendidikan Administrasi Umum di Universitas Negeri Makassar. Pendidikan Doktoral diselesaikan di Universitas Negeri Makassar pada tahun 2019 dalam bidang keilmuan Administrasi Publik. Mengabdikan sebagai dosen sejak tahun 2015 di Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) YAPIS Biak, Papua. Pada tahun 2018 mendapatkan kesempatan mengikuti pelatihan “*Research Skill and Journal Writing*” program internasional yang diselenggarakan di Institute of Countinoing & Tesol Education the University of Queensland Australia. Sebagai dosen, selain melakukan tugas sebagai pengajar, penulis aktif melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Salah satu penelitian yang mendapatkan pendanaan dari Kemeristekdikti pada tahun 2018 yaitu hibah penelitian dosen pemula yang berjudul “Transformasi pengelolaan Sumber Daya Manusia pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kabupaten Biak Numfor Papua”, dan telah diterbitkan di jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik pada tahun 2019. Selain itu, Adapun penelitian lainnya adalah yang berjudul “*Hazardous and Toxic Medical Waste Management at General Regional Hospital*” terbit di jurnal WASTE FORUM pada tahun 2023.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Teori dan Praktik

Buku "Pemberdayaan Masyarakat Teori dan Praktik" adalah panduan komprehensif yang menguraikan esensi pemberdayaan masyarakat, menyajikan teori-teori yang mendasarinya, dan menunjukkan bagaimana teori tersebut dapat diaplikasikan dalam praktik kehidupan nyata dalam bentuk pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Dalam era yang terus berubah dan kompleksitas tantangan sosial yang semakin besar menjadikan pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu pendekatan yang krusial dalam mengatasi masalah kemiskinan, ketidaksetaraan, dan isu-isu sosial lainnya. Buku ini menggali konsep pemberdayaan masyarakat secara mendalam, menguraikan landasan teoritisnya, dan menyediakan sejumlah contoh atau studi kasus pada pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sehingga diharapkan setelah membaca dan memahami isi buku ini maka pembaca akan mendapatkan wawasan tentang cara menerapkan konsep pemberdayaan dalam kehidupan nyata. Buku ini mengilustrasikan studi kasus, strategi pelaksanaan, dan pendekatan praktis untuk merancang dan menjalankan program pemberdayaan yang berhasil. Buku ini tidak hanya memandang pemberdayaan sebagai solusi, tetapi juga mencermati berbagai tantangan yang mungkin timbul selama proses pemberdayaan dan bagaimana mengatasinya.

"Buku "Pemberdayaan Masyarakat Teori dan Praktik" dapat menjadi acuan bagi praktisi, peneliti, mahasiswa, dan semua kalangan yang tertarik untuk berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup dan atau untuk memperbaiki tingkat perekonomian pelaku UMKM. Buku ini memberikan panduan yang sangat detail dalam pelaksanaan pemberdayaan yang efektif dan berdampak.

Tim Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi atas Pendanaan Program Penelitian dan Pengabdian Tahun 2023 (No. 0557/E5.5/AL.04/2023) pada skema Program Kemitraan Masyarakat dan buku ini adalah luaran tambahan atas kegiatan PKM yang telah dilaksanakan.